

HUMAN RIGHTS EDUCATION

AMNESTY
INTERNATIONAL



MENJADI SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL)

SEBUAH BUKU PANDUAN UNTUK
SEKOLAH DI SELURUH DUNIA



Amnesty International adalah gerakan global yang memiliki lebih dari 3 juta pendukung, anggota, dan aktivis di lebih dari 150 negara dan wilayah yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran berat hak asasi manusia.

Visi kami adalah agar setiap orang dapat menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar hak asasi manusia internasional lainnya. Kami independen dari pemerintah mana pun, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama dan didanai oleh anggota serta donasi publik.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2012
oleh Amnesty International Ltd
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

© Amnesty International 2012

Indeks: Pol 32/001/2012 Bahasa Inggris
Bahasa asli: bahasa Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, United Kingdom

Hak cipta dilindungi undang-undang. Publikasi ini dilindungi hak cipta, namun dapat diperbanyak dengan cara apa pun tanpa biaya untuk tujuan advokasi, kampanye, dan pendidikan, tetapi tidak untuk dijual kembali. Pemegang hak cipta meminta agar semua penggunaan tersebut didaftarkan kepada mereka untuk keperluan penilaian dampak. Untuk memproduksi ulang dalam keadaan lain, atau untuk penggunaan kembali dalam publikasi lain, atau untuk terjemahan atau adaptasi, izin tertulis sebelumnya harus diperoleh dari penerbit, dan mungkin dikenakan biaya. Untuk meminta izin, atau untuk pertanyaan lain, silakan hubungi copyright@amnesty.org

Gambar Sampul: © Amnesty International

amnesty.org

CATATAN PENERJEMAHAN DARI AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA

Dalam proses penerjemahan dokumen panduan ini, Amnesty International Indonesia tidak menerjemahkan nama program Human Rights Friendly School menjadi Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia. Nama program akan tetap dituliskan dalam bahasa aslinya, yaitu Human Rights Friendly School, atau menggunakan singkatan “HRFS”.

Keputusan ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dengan nama program serupa yang dijalankan oleh organisasi lain di Indonesia, serta untuk menjaga penggunaan bahasa bersama dalam komunitas HRFS di tingkat global.

Oleh karena itu, dalam dokumen ini pembaca akan menemukan istilah “Sekolah HRFS” untuk merujuk pada sekolah yang ingin terlibat atau sudah terlibat dalam program HRFS Amnesty International Indonesia. Kami menyadari bahwa secara harfiah istilah tersebut mengandung redundansi, namun penggunaannya dipertahankan demi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan dengan istilah yang digunakan dalam jejaring HRFS secara internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Amnesty International mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu dan keahlian mereka untuk mengembangkan, menguji coba, dan menyempurnakan program Human Rights Friendly School (HRFS) kami selama tiga tahun. Kami berterima kasih kepada Samuel Mejias, Ruth Gallagher, Sneh Aurora, dan Helen Trivers atas kontribusi wawasan dan keahlian mereka dalam perancangan dan pengembangan program ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendukung dan berkontribusi dalam revisi serta pembaruan dokumen-dokumen program Human Rights Friendly School, termasuk Ganchimeg Sodnomdoo, Ann-Marie D'Souza, Laura Jayatillake, Claire Glavey, Lilia Savciuc, Dieudonné Dagbeto, Aurelia Donnard, Helen Trivers, dan Sneh Aurora.

Kami mengucapkan terima kasih khusus kepada para siswa, pihak administrasi sekolah, guru, orang tua, dan anggota masyarakat dari 15 sekolah berikut serta rekan-rekan dari 14 kantor nasional Amnesty International yang mendukung mereka, atas partisipasi mereka dalam menguji coba program Human Rights Friendly School selama dua tahun dan berbagi pengalaman mereka dengan kami: Collège d'Enseignement Général de Pahou dan Amnesty International Benin, Collège Moderne La Colombe de Koumassi dan Amnesty International Côte d'Ivoire, Kontiki Skolen dan Amnesty International Denmark, Accra High School dan Amnesty International Ghana, Presentation Secondary School Warrenmount dan Castleknock Community College serta Amnesty International Irlandia, Leo Baeck Education Center dan Amnesty International Israel, Liceo Norberto Rosa School dan Amnesty International Italia, Ion Creangă Lyceum dan Amnesty International Moldova, Mongolia-India Joint dan Amnesty International Mongolia, Sekolah Menengah Ibn Youssef dan Amnesty International Maroko, Colegio Técnico Nacional dan Amnesty International Paraguay, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. c.K. Norwida dan Amnesty International Polandia, Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis dan Amnesty International Senegal, Sekolah Menengah Atas Villiers dan Amnesty International Inggris.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut yang dengan murah hati telah menyumbangkan waktu dan keahlian mereka dalam meninjau draf pedoman awal: Felisa Tibbitts (Human Rights Education Associates), Colin Moorhouse (European Safer Schools Partnerships Project), Ölþ Ólafsdóttir (Dewan Eropa), Carmen Perez (Escuela Nueva, Kolombia), Vicky Colbert, (Escuela Nueva, Kolombia), Anne Hudson (Central Foundation Girls' School, Inggris), Ian Massey (Dewan Hampshire, Inggris), Katherine Covell (Pusat Hak Anak CBU, Universitas Cape Breton, Kanada).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	ii
BAGAIMANA MENGGUNAKAN BUKU PEDOMAN INI	vi
SATU/ PENDAHULUAN - MENGAPA HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS	1
■ Apa itu pendidikan HAM?	2
■ Mengapa pendidikan HAM penting untuk sekolah?	3
■ Apa itu Human Rights Friendly School (HRFS)?	3
■ Apa saja manfaat menjadi Human Rights Friendly School (HRFS)?	4
DUA/ GAMBARAN UMUM PROGRAM	8
■ Apa saja yang termasuk dalam program Human Rights Friendly School (HRFS)?	10
■ Bagaimana cara kerja Program Human Rights Friendly School?	10
■ Apa saja langkah-langkah untuk menjadi Human Rights Friendly School	11
■ Tips Utama Sekolah HRFS	16
TIGA/ 10 PRINSIP GLOBAL UNTUK HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL	18
EMPAT/ EMPAT AREA KUNCI KEHIDUPAN SEKOLAH	24
■ Area Kunci 1: Tata Kelola	26
■ Area Kunci 2: Hubungan	38
■ Area Kunci 3: Kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	51
■ Area Kunci 4: Lingkungan Sekolah	60
LIMA/ LANGKAH-LANGKAH MENJADI SEKOLAH HRFS	68
■ Tahap Persiapan	69
■ Tahap Implementasi Dan Tinjauan Proyek	79
ENAM/ ALAT BANTU	94
■ Analisis SWOT	86
■ Kegiatan mengukur "Temperatur" Hak Asasi Manusia	87
■ Tingkat Keramahan Hak Asasi Manusia	91
■ Rencana Aksi Sekolah HRFS	103

DAFTAR ISTILAH

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Seluruh jajaran hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sering kali dibagi menjadi dua kelompok: (i) hak sipil dan politik, serta (ii) hak ekonomi, sosial, dan budaya (lihat bagian di bawah untuk yang terakhir). Contoh hak sipil dan politik antara lain hak atas kesetaraan di hadapan hukum, persidangan yang adil, kebebasan berekspresi, bergerak, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara Anda. Hak-hak ini diwujudkan dalam bentuk hukum yang mengikat dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966). Komite Hak Asasi Manusia PBB dibentuk untuk memantau kepatuhan terhadap Kovenan ini oleh negara-negara yang menjadi pihak di dalamnya, serta untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara atas pelanggaran hak-hak tersebut.

KONVENSI/PERJANJIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Konvensi dan perjanjian adalah traktat. Masing-masing merupakan perjanjian internasional tertulis antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional dan mengikat secara hukum.

KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang secara khusus dan unik membahas hak-hak anak, meskipun standar hak asasi manusia universal lainnya berlaku bagi orang dewasa maupun anak-anak. Pada tahun 1989, para pemimpin dunia memutuskan bahwa anak-anak memerlukan konvensi khusus yang ditujukan khusus bagi mereka karena orang yang berusia di bawah 18 tahun sering kali membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus yang tidak diperlukan oleh orang dewasa. Para pemimpin dunia juga ingin menegaskan kembali bahwa anak-anak juga memiliki hak asasi manusia. Dengan menyetujui untuk menjalankan kewajiban Konvensi (melalui ratifikasi atau akses), pemerintah nasional berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak serta bersedia bertanggung jawab atas komitmen ini di hadapan komunitas internasional.

Untuk informasi lebih lanjut: <http://www.unicef.org/crc/>

Seluruh jajaran hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sering kali dibagi menjadi dua kelompok: (i) hak sipil dan politik, serta (ii) hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak-hak seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, serta air dan sanitasi.



Hak-hak ini bukan sekadar daftar niat baik dari pemerintah. Hak-hak ini adalah hak asasi manusia yang dapat ditegakkan dan melibatkan kewajiban negara, yang diabadikan dalam standar hak asasi manusia internasional. Standar-standar ini mencakup Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) serta standar yang ditetapkan oleh badan-badan khusus seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dibentuk untuk memantau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak atau jaminan mendasar yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan maupun kelalaian yang mengganggu kebebasan mendasar dan martabat manusia. Hak-hak ini melekat pada setiap manusia, yang berarti bahwa tidak seorang pun di mana pun di dunia ini boleh dirampas haknya, kapan pun dan dengan alasan apa pun. Perkembangan hak asasi manusia berakar pada perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, layak didapatkan, diraih, atau diwariskan. Hak-hak tersebut melekat pada setiap orang hanya karena mereka adalah manusia. Hak asasi manusia sering digambarkan sebagai sesuatu yang "tidak dapat dicabut", "tidak dapat dipisahkan", dan "saling bergantung":

- **"Tak dapat dicabut"** berarti hak asasi manusia tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, termasuk dalam perang atau situasi darurat.
- **"Tak terpisahkan"** berarti bahwa semua hak asasi manusia sama pentingnya. Tidak ada yang dapat memutuskan bahwa hak tertentu lebih penting daripada yang lain.
- **"Saling bergantung"** berarti bahwa ketika suatu hak disalahgunakan, hal itu berdampak negatif terhadap hak-hak lainnya. Demikian pula, ketika suatu hak dipenuhi, hal itu turut berkontribusi pada terpenuhinya hak-hak lainnya.

Dengan mengukuhkan hak asasi manusia dalam undang-undang, pemerintah menerima tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Standar hak asasi manusia menetapkan apa yang harus dilakukan pemerintah bagi warga di wilayahnya, serta apa yang tidak boleh mereka lakukan terhadap warga tersebut. Pengukuhan hak asasi manusia dalam peraturan resmi-baik dalam hukum nasional maupun internasional yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkannya. Ketika aparat negara gagal menjamin hak asasi manusia yang ditetapkan dalam standar hak asasi manusia internasional, mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan serupa yang dilakukan oleh kelompok politik bersenjata atau aktor non-negara lainnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kerangka konseptual bagi proses pembangunan manusia yang didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional dan secara operasional ditujukan untuk mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksetaraan yang menjadi akar permasalahan pembangunan serta memperbaiki praktik-praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kemajuan pembangunan. Prinsip-prinsip dasar pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah: kerangka hukum hak asasi manusia, transparansi, partisipasi, pemberdayaan,



non-diskriminasi, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Untuk informasi lebih lanjut: <http://www.ohchr.org/documents/publications/fagen.pdf>

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Instrumen yang disusun oleh badan regional atau internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar. Instrumen tersebut mencakup perjanjian yang mengikat secara hukum, seperti konvensi PBB, serta instrumen non-perjanjian, seperti deklarasi (termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Standar hak asasi manusia lainnya mencakup prinsip, pedoman, dan aturan yang disusun oleh organisasi antar pemerintah dan para ahli.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <https://www.ohchr.org/default/files/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>

STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Standar hak asasi manusia internasional merupakan pedoman perilaku bagi pemerintah di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan persahabatan antarbangsa, serta mendorong kemajuan sosial, peningkatan standar hidup, dan hak asasi manusia. Berkat karakter internasionalnya yang unik, serta kewenangan yang diberikan dalam Piagam pendiriannya, PBB dapat mengambil tindakan dalam berbagai isu, dan menyediakan forum bagi 193 negara anggotanya untuk menyampaikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan dan komite lainnya.

DEKADE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK HAK ASASI MANUSIA (1995-2004)

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993) bahwa pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan publik mengenai hak asasi manusia sangat penting untuk mempromosikan dan mewujudkan hubungan yang stabil dan harmonis di antara masyarakat, serta untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, dan perdamaian. Konferensi tersebut merekomendasikan agar negara-negara berupaya memberantas buta huruf dan mengarahkan pendidikan menuju pengembangan kepribadian manusia secara utuh serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Konferensi tersebut menyerukan kepada semua negara dan lembaga untuk memasukkan hak asasi manusia, hukum humaniter, demokrasi, dan supremasi hukum sebagai mata pelajaran dalam kurikulum semua lembaga pendidikan di lingkungan formal dan non-formal. Majelis Umum PBB kemudian mengumumkan Dimulainya Dekade PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Januari 1995.

DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA (PBB) TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia merupakan instrumen penting yang mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia di semua tingkatan serta mendorong tingkat komitmen yang lebih tinggi di antara negara-negara anggota untuk melaksanakan program-program pendidikan hak asasi manusia yang sistematis dan komprehensif, di seluruh sektor pendidikan – formal, informal, dan non-formal. Deklarasi ini disahkan secara konsensus oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2011. Dalam Pasal 1-nya dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengetahui, mencari, dan mendapatkan informasi mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta harus memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia”.

DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) secara umum diakui sebagai landasan hukum hak asasi manusia internasional. UDHR disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Pada akhir Perang Dunia II, seiring dengan berdirinya PBB, masyarakat internasional bertekad untuk tidak pernah membiarkan kekejaman seperti yang terjadi dalam konflik tersebut terulang lagi. Para pemimpin dunia memutuskan untuk mengadopsi peta jalan guna menjamin hak setiap individu di mana pun. Prinsip-prinsip inti hak asasi manusia pertama kali ditetapkan dalam UDHR, seperti universalitas, saling ketergantungan dan tak terpisahkan, kesetaraan, serta non-diskriminasi. UDHR juga mencatat bahwa hak asasi manusia mencakup baik hak individu maupun kewajiban negara, sebuah gagasan yang telah ditegaskan kembali dalam berbagai konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia internasional.

WORLD PROGRAMME FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION

Pada tanggal 10 Desember 2004, Majelis Umum PBB mengumumkan Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia guna mendorong pelaksanaan program-program pendidikan hak asasi manusia di semua sektor pendidikan. Dengan mengacu pada pencapaian Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia PBB (1995-2004), Program Dunia ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip dasar dan metodologi pendidikan hak asasi manusia, menyediakan kerangka kerja konkret untuk tindakan, serta memperkuat kemitraan dan kerja sama dari tingkat internasional hingga ke tingkat akar rumput. Fase pertama (2005-2009) dari Program Pendidikan Hak Asasi Manusia Dunia berfokus pada pendidikan hak asasi manusia di sistem sekolah dasar dan menengah. Fase kedua (2010-2014) berfokus pada pendidikan hak asasi manusia untuk pendidikan tinggi serta program pelatihan hak asasi manusia bagi guru dan pendidik, pegawai negeri, petugas penegak hukum, dan personel militer. Program ini juga menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia ke dalam sekolah.

Untuk informasi lebih lanjut: <http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm>

SUMBER

The Amnesty International Handbook International (Indeks: ORG 20/001/2002), <http://www.amnesty.org/en/library/info/ORG20/001/2002/en>

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, <http://www2.ohchr.org/english>

CARA MENGGUNAKAN BUKU PANDUAN INI

Selamat datang di program Human Rights Friendly Schools (Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia, selanjutnya akan ditulis sebagai HRFS) dari Amnesty International!

Panduan ini bertujuan untuk mendukung Anda dalam mengimplementasikan program Human Rights Friendly School (HRFS) di sekolah Anda. Bagian Satu dan Dua sangat penting untuk Anda pelajari karena menyajikan latar belakang dan gambaran umum mengenai seluruh program. Meskipun kami mengundang Anda untuk membaca panduan ini secara keseluruhan, Bagian Tiga hingga Empat dapat dijadikan referensi sebagai sumber daya saat Anda berupaya menjadikan sekolah Anda ramah hak asasi manusia. Panduan ini mencakup studi kasus dari sekolah-sekolah yang telah memulai perjalanan mereka menuju sekolah yang ramah hak asasi manusia. Panduan ini juga menunjukkan kepada Anda di mana Anda dapat menemukan sumber daya dan perangkat pendukung lainnya.

ISI PANDUAN

SATU/PENDAHULUAN – MENGAPA HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS?

Bagian ini menjelaskan mengapa hak asasi manusia penting bagi sekolah serta menguraikan latar belakang program Human Rights Friendly Schools, dan merupakan bacaan yang wajib dibaca. Bagian Satu berguna untuk: memahami latar belakang program; memahami apa itu Sekolah HRFS dan bagaimana program ini dapat bermanfaat bagi sekolah Anda.

DUA/GAMBARAN UMUM PROGRAM

Bagian ini memberikan gambaran singkat mengenai program HRFS dan wajib dibaca. Bagian Dua berguna untuk: mengenal 10 Prinsip Global HRFS; empat bidang utama kehidupan sekolah; serta langkah-langkah yang akan diambil sekolah Anda dalam proses menjadi HRFS.

TIGA/10 PRINSIP GLOBAL UNTUK HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL

Bagian ini menguraikan dan mengeksplorasi 10 Prinsip Global yang menjadi dasar program ini dan yang berasal dari standar

dan norma hak asasi manusia internasional. Bagian Tiga berguna untuk: memahami apa saja 10 Prinsip Global untuk HRFS; mempertimbangkan cara mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam semua aspek kehidupan sekolah; dan mengembangkan visi Anda untuk menjadi sekolah yang ramah hak asasi manusia.

EMPAT/EMPAT BIDANG UTAMA KEHIDUPAN SEKOLAH

Bagian ini membahas empat bidang utama kehidupan sekolah di mana sekolah Anda akan mengintegrasikan 10 Prinsip Global dalam proses menjadi ramah hak asasi manusia. Bagian Empat berguna untuk: mengevaluasi sejauh mana sekolah Anda sudah ramah hak asasi manusia di setiap bidang utama; mengidentifikasi bidang-bidang awal yang perlu difokuskan oleh sekolah Anda untuk menjadi lebih ramah hak asasi manusia; mempelajari apa yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah lain yang terlibat dalam program ini untuk menjadi ramah hak asasi manusia; serta menyusun rencana aksi Anda untuk menjadi ramah hak asasi manusia.

LIMA/LANGKAH MENJADI HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL (HRFS)

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil sekolah Anda dalam perjalanannya menjadi HRFS. Bagian Lima berguna untuk: mendapatkan kerangka kerja untuk pelaksanaan program; menilai situasi hak asasi manusia saat ini di sekolah Anda dan menyusun rencana aksi untuk menjadi sekolah ramah hak asasi manusia; menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif; mengidentifikasi cara bekerja sama dengan seluruh warga sekolah; mengevaluasi kemajuan Anda dan menilai dampak dari upaya Anda; serta mengetahui cara terhubung dan berbagi pembelajaran dengan sekolah lain yang terlibat dalam program ini.

ENAM/PERANGKAT YANG BERGUNA

Bagian ini mencakup beberapa perangkat dan contoh kerangka utama untuk membantu Anda dalam perencanaan program, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Perangkat-perangkat ini juga dapat ditemukan dalam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks sekolah Anda. Perangkat-perangkat dalam bagian ini meliputi: format analisis SWOT, kegiatan mengukur temperatur Hak Asasi Manusia dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disederhanakan, Tingkat Keramahan Hak Asasi Manusia, dan format Rencana Aksi Sekolah HRFS.





© Amnesty International

Para siswa mata pelajaran desain ikut serta dalam pameran seni rupa bertema hak asasi manusia di Sekolah Menengah Bersama Mongolia-India, Ulaanbaatar, Mongolia, tahun 2011.



Grup Sekolah Amnesty International di Polandia berkampanye
untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, 2008.

SATU MENGAPA HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS?



PENDAHULUAN

TENTANG PROGRAM

Program Human Rights Friendly School (HRFS) bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Program HRFS adalah program pendidikan hak asasi manusia global Amnesty International untuk sekolah. Program ini mendorong dan mendukung pengembangan budaya hak asasi manusia global dengan memberdayakan siswa dan guru di sekolah menengah di seluruh dunia untuk menciptakan komunitas sekolah yang ramah hak asasi manusia. Sekolah-sekolah yang berpartisipasi berupaya mengembangkan pendekatan menyeluruh di seluruh sekolah terhadap pendidikan hak asasi manusia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam bidang-bidang utama kehidupan sekolah, termasuk tata kelola, hubungan antar individu, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan sekolah. Program HRFS menjangkau lebih luas dari ruang kelas dan menuju komunitas untuk mengubah cara orang berpikir tentang hak asasi manusia dan berpartisipasi secara aktif dalam menangani isu-isu hak asasi manusia. Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan meningkatkan pengetahuan serta mengubah sikap dan perilaku di seluruh komunitas, budaya hak asasi manusia global menjadi mungkin terwujud.

LATAR BELAKANG PROGRAM

Program Human Rights Friendly School (HRFS) dikembangkan oleh Amnesty International dalam rangka Program Dunia PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia. Fase pertama Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia (2005-2009) menekankan integrasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh dunia. Program ini menganjurkan pendekatan holistik terhadap pendidikan hak asasi manusia, mendorong pemerintah nasional tidak hanya untuk mendukung sekolah dalam mengajarkan hak asasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa cara pengelolaan sekolah sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Fase kedua Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia dimulai pada tahun 2010 dan berfokus pada pendidikan tinggi, sekaligus menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia ke dalam sekolah.

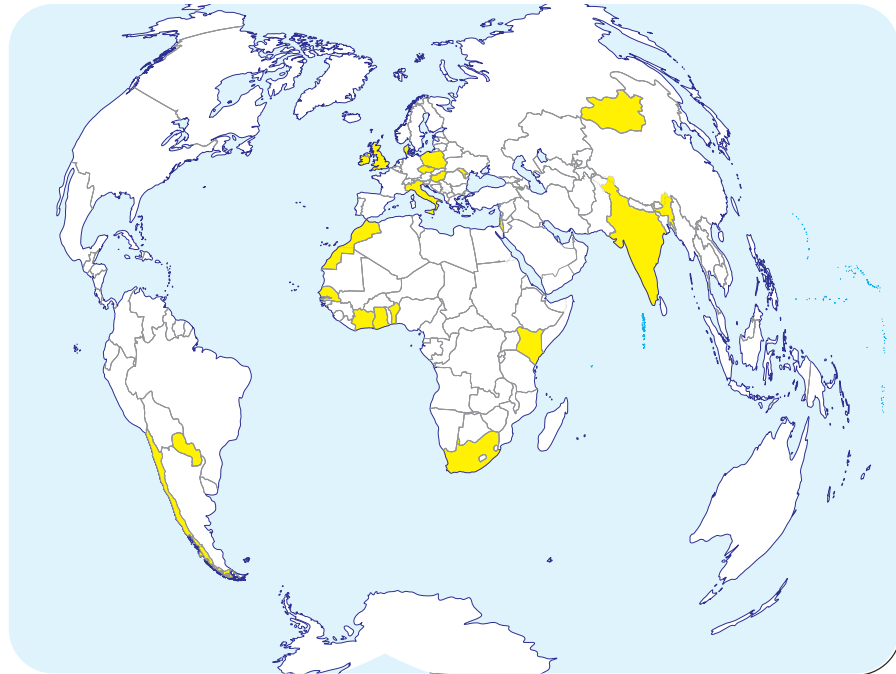
Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara untuk mendorong dan memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat partisipasi, inklusivitas, dan tanggung jawab: "Setiap orang berhak untuk mengetahui, mencari, dan menerima informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta harus memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia"

Program HRFS dibangun berdasarkan berbagai inisiatif serta upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di tingkat lokal dan nasional di banyak negara, mulai dari India hingga Irlandia, Kolombia, dan Inggris. Program HRFS merupakan kesempatan yang menarik bagi Amnesty International untuk mendukung negara-negara di seluruh dunia dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional mereka.

Fase percontohan Program HRFS berlangsung dari September 2009 hingga Juli 2011 dan melibatkan 15 sekolah menengah dari 14 negara. Seiring dengan perluasan program ke lebih banyak sekolah di negara-negara tersebut, serta peluncurannya di negara-negara baru, Amnesty International telah memperbarui pedoman sebelumnya guna mengkonsolidasikan, merefleksikan, dan berbagi pengalaman serta pembelajaran dari fase percontohan.

THE HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS NETWORK 2009-2012

BENIN
BERMUDA
CHILE
CÔTE D'IVOIRE
CZECH REPUBLIC
DENMARK
GHANA
HUNGARY
INDIA
IRELAN
ISRAEL/OT/PA
ITALY
KENYA
MOLDOVA
MONGOLIA
MOROCCO
PARAGUAY
POLAND
SENEGAL
SOUTH AFRICA
UNITED KINGDOM



APA ITU PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA?

Pendidikan hak asasi manusia adalah praktik partisipatif yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan masyarakat, serta membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menikmati dan menggunakan hak-hak mereka, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

Pendidikan Hak Asasi Manusia meliputi:

- Pendidikan tentang hak asasi manusia – pengetahuan dan pemahaman mengenai norma, prinsip, instrumen, serta nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia.
- Pendidikan melalui hak asasi manusia – pembelajaran melalui metode yang inklusif, partisipatif, dan demokratis yang menghormati hak-hak baik pendidik maupun peserta didik.
- Pendidikan untuk hak asasi manusia – pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan penerapan hak asasi

manusia dalam kehidupan sehari-hari serta memberdayakan individu untuk menikmati dan melaksanakan hak-hak mereka serta menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

MENGAPA PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH PENTING?

Sekolah memegang peran penting dalam kehidupan kita dan kehidupan masyarakat. Sebagai cerminan masyarakat luas, sekolah merupakan kunci dalam proses sosialisasi generasi muda, mempersiapkan para pelajar untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan terlibat. Di abad ke-21 yang saling terhubung dan terglobalisasi ini, kaum muda dihadapkan pada dunia di sekitar mereka yang beragam dan terus berubah, sebuah dunia di mana kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan lainnya masih sangat melekat dalam kehidupan jutaan orang.

Hak asasi manusia dapat memberikan sekolah-sekolah di seluruh dunia sebuah bahasa bersama mengenai kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, martabat, dan partisipasi yang sangat penting bagi tujuan mencapai



masyarakat global yang lebih damai dan adil. Pendidikan hak asasi manusia merupakan sarana penting untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan budaya hak asasi manusia. Amnesty International mendefinisikan budaya hak asasi manusia sebagai suasana di mana semua anggota suatu komunitas memahami, menghargai, dan melindungi hak asasi manusia, di mana nilai-nilai kesetaraan, martabat, penghormatan, non-diskriminasi, inklusi, dan partisipasi menjadi landasan kebijakan dan dasar proses pengambilan keputusan di dalam komunitas tersebut.

Pendidikan untuk hak asasi manusia – pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta memberdayakan individu untuk menikmati dan melaksanakan hak-hak mereka serta menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

APA ITU *HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL*?

Sekolah dalam program Human Rights Friendly School adalah sekolah yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai prinsip inti dalam operasional dan organisasinya. Ini adalah komunitas sekolah tempat hak asasi manusia **dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dihormati, dilindungi, dan dipromosikan**. Ini adalah tempat di mana semua orang dilibatkan dan didorong untuk berpartisipasi, tanpa memandang status atau peran, serta tempat di mana keragaman budaya dihargai. Singkatnya, Sekolah yang ramah hak asasi manusia memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia berada di pusat pengalaman belajar dan hadir di semua aspek utama kehidupan sekolah; ini adalah sekolah yang “ramah” terhadap hak asasi manusia.

Sekolah yang ramah hak asasi manusia mendorong:

- Suasana sekolah yang menyeluruh yang didasarkan pada kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, martabat, dan partisipasi.
- Pendekatan yang sepenuhnya demokratis dan partisipatif dalam tata kelola sekolah, di mana semua warga sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.
- Pemberdayaan siswa, guru, dan staf agar dapat berpartisipasi secara bermakna dan setara dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta praktik sekolah.

- Rasa keterlibatan dan keterkaitan yang semakin kuat, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta solidaritas lokal dan global.

- Pemikiran kritis siswa dan keterlibatan mereka dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan perubahan sosial.

- Pengalaman belajar yang kaya tentang hak asasi manusia di dalam dan di luar kelas.

Sekolah yang ramah hak asasi manusia menerapkan pendekatan **menyeluruh** atau **holistik** untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam berbagai aspek utama kehidupan sekolah. Pendekatan ini juga dikenal sebagai **pendekatan berbasis hak** dalam pendidikan hak asasi manusia. Melalui pendekatan menyeluruh ini, komunitas sekolah tidak hanya memperhatikan materi yang diajarkan namun juga metode pengajarannya, dengan tujuan menumbuhkan budaya hak asasi manusia di dalam komunitas tersebut.

APA SAJA MANFAAT MENJADI HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL?

Meskipun sulit untuk mengukur perkembangan budaya hak asasi manusia, kita dapat mengidentifikasi perubahan nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat luas sebagai hasil dari program Human Rights Friendly School. Pengalaman dari tahap percontohan menunjukkan bahwa pendekatan menyeluruh di seluruh sekolah terhadap pendidikan hak asasi manusia dapat memberikan dampak sebagai berikut:

BAGI INDIVIDU:

- Tenaga pengajar yang terlatih dalam konten dan metode pengajaran hak asasi manusia, dimana mereka melaporkan meningkatnya kepercayaan diri dalam membentuk lingkungan kelas yang positif serta interaksi yang lebih baik dengan para peserta didik.
- Peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan memahami lebih mendalam perihal hak dan kewajiban mereka.
- Siswa menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu kemasyarakatan dan sosial yang lebih luas, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dan dapat mempengaruhi kebijakan dan kegiatan sekolah.

- Meningkatnya kemampuan pengajar dan peserta didik untuk bekerja dan belajar bersama secara kolaboratif.
- Seluruh anggota sekolah/lembaga pendidikan mendapatkan pengetahuan perihal Hak Asasi Manusia dan kemampuan mendiskusikan serta menemukan cara-cara baru untuk melindungi hak asasi manusia dan bergerak untuk perubahan positif baik secara lokal atau global.

BAGI SEKOLAH:

- Seiring dengan diberikannya kesempatan yang bermakna kepada siswa, staf, dan komunitas sekolah secara luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap sekolah pun semakin meningkat.
- Transparansi dan akuntabilitas pun meningkat, dan hubungan antarwarga pun menjadi lebih erat, termasuk antara guru dan siswa, antarsiswa, serta antar anggota staf.
- Rasa hormat, kerja sama, dan penerimaan yang lebih besar ditunjukkan di antara warga sekolah, sehingga mengurangi keterlibatan dalam perilaku antisosial, seperti perundungan.
- Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia akan mengubah sekolah menjadi tempat belajar yang lebih aman dan inklusif, terutama bagi mereka yang terpinggirkan atau berasal dari latar belakang kurang beruntung.

BAGI KOMUNITAS:

- Anggota komunitas sekolah yang lebih luas turut terlibat dalam kehidupan sekolah, serta berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kegiatan sekolah yang mendukung hak asasi manusia.
- Seiring meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, para remaja bekerja sama dengan masyarakat luas untuk mewujudkan perubahan nyata dalam hal hak asasi manusia di luar lingkungan kelas.

DAMPAK SECARA NASIONAL:

- Program Human Rights Friendly School menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi lokal dan nasional untuk mencari cara-cara bersama dalam mengambil tindakan demi hak asasi manusia..
- Program ini berfungsi sebagai model sistem pendidikan yang membuktikan manfaat pengintegrasian pendidikan hak asasi manusia ke dalam sistem pendidikan formal.

SEKOLAH HRFS DALAM PRAKTIKNYA

DENMARK

Di KonTiki Skolen di Hillerød, perjalanan menuju sekolah yang ramah hak asasi manusia dimulai setiap hari dengan upacara pagi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Pertemuan komunitas sekolah secara keseluruhan ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi terbaru dan pengumuman, serta memiliki peran penting dalam menyediakan ruang bagi komunitas sekolah untuk memperkuat kerangka kerja hak asasi manusia yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pertemuan-pertemuan ini dipimpin oleh siswa secara bergiliran, yang mendorong partisipasi demokratis mereka. Sesi khusus yang diadakan setiap Jumat, yang disebut “proses demokratis”, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pandangan dan memberikan masukan mengenai semua aspek kehidupan sekolah kepada kepala sekolah dan guru. Sebagai bagian dari proses ini, dua perwakilan siswa terpilih per kelas berkoordinasi dengan seluruh siswa untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang dibahas setiap minggu dengan guru dan pimpinan sekolah.

Sekolah memberdayakan siswa dengan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan mengorganisir kegiatan mereka sendiri di sekolah, seperti acara penggalangan dana, yang juga memungkinkan siswa mengelola uang melalui proses konsensus. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah juga dianggap sebagai prioritas, dengan orang tua duduk di dewan sekolah, ikut serta dalam upacara pagi, dan mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler seperti berkebun komunitas.

Secara keseluruhan, integrasi perspektif dan kosakata hak asasi manusia dalam kegiatan sehari-hari sekolah telah membantu menumbuhkan suasana yang mendukung partisipasi demokratis dan tindakan proaktif terhadap isu-isu global. Sekolah melaporkan bahwa program Human Rights Friendly School telah membawa perubahan positif dalam hubungan kekuasaan antara dewan sekolah dan guru, dan siswa merasa bahwa proses demokratis khususnya memungkinkan mereka memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di sekolah.

“Suasana yang mendukung partisipasi demokratis dan tindakan proaktif dalam menangani isu-isu global”



© Amnesty International Denmark

Pertemuan sekolah harian, KonTiki Skolen, Denmark, 2010.





GAMBARAN UMUM PROGRAM

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai program Human Rights Friendly School (HRFS) dan wajib dibaca untuk memahami keseluruhan program ini. Bagian ini memperkenalkan 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly School, empat bidang utama kehidupan sekolah, serta merangkum langkah-langkah yang akan diambil sekolah Anda dalam proses menjadi Human Rights Friendly School.

PROGRAM HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL (HRFS) MELIPUTI APA SAJA?

Program Ini bukanlah program biasa di mana pelajaran hak asasi manusia diajarkan dan anak-anak hanya mendengarkan. Program HRFS mengubah sekolah menjadi tempat di mana hak asasi manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari segala hal yang dilakukan oleh komunitas sekolah. Mulai dari cara pengambilan keputusan di sekolah, kegiatan yang diselenggarakan, hingga lingkungan belajar siswa, sekolah menjadi teladan dalam pendidikan hak asasi manusia. Sekolah-sekolah didorong untuk berinovasi dan melibatkan sebanyak mungkin masukan saat menyusun rencana aksi mereka..

10 PRINSIP GLOBAL UNTUK HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS (HRFS)

Program ini didasarkan pada 10 Prinsip Global untuk sekolah yang ramah hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada standar, norma, dan instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Prinsip-prinsip Global tersebut menguraikan bagaimana sekolah dapat mengadopsi nilai-nilai dan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah.

Informasi lebih lanjut mengenai 10 Prinsip Global untuk sekolah yang ramah hak asasi manusia dapat ditemukan pada Bagian Tiga panduan ini.

10 PRINSIP GLOBAL HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS (HRFS)

NON-DISKRIMINASI DAN INKLUSI

- 1 Sekolah HRFS adalah komunitas di mana kesetaraan, non-diskriminasi, martabat, dan rasa hormat menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan sekolah.
- 2 Sekolah HRFS menyediakan lingkungan belajar di mana semua hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan.
- 3 Sekolah HRFS mengedepankan inklusi dalam seluruh aspek kehidupan sekolah.

PARTISIPASI

- 4 Sekolah HRFS mendorong semua warga sekolah untuk berpartisipasi secara bebas, aktif, dan bermakna dalam kehidupan sekolah, termasuk dalam pembentukan kebijakan dan praktik sekolah.
- 5 Sekolah HRFS memastikan bahwa setiap orang dalam komunitas sekolah memiliki informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

AKUNTABILITAS

- 6 Sekolah HRFS bersifat adil, akuntabel, dan transparan dalam seluruh perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya.
- 7 Sekolah HRFS melindungi semua warga sekolah dengan menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas serta tanggung jawab bersama.

PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

- 8 Sekolah HRFS mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek pengajaran dan kurikulum.
- 9 Sekolah HRFS berupaya memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan, khususnya mereka yang terpinggirkan karena gender, status, atau perbedaan lainnya.
- 10 Sekolah HRFS memberdayakan siswa dan staf untuk menjadi anggota aktif komunitas global, berbagi pengetahuan, pemahaman, dan belajar dengan orang lain serta mengambil tindakan untuk menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan.

ASPEK UTAMA SEKOLAH HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS (HRFS)

Sekolah didorong untuk mengintegrasikan 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly Schools (HRFS) ke dalam empat bidang utama kehidupan sekolah.

TATA KELOLA – cara pengelolaan sekolah.

Sekolah HRFS berupaya menjadikan struktur tata kelola mereka sepenuhnya demokratis dan partisipatif, dengan mendorong seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi secara bebas, aktif, dan bermakna dalam kehidupan sekolah, serta turut membentuk kebijakan dan praktik sekolah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari mendorong agar suara siswa didengar di tingkat dewan sekolah, membentuk badan perwakilan siswa, dan memperkuat asosiasi orang tua yang sudah ada, hingga melibatkan sesama siswa dalam proses disiplin siswa.

HUBUNGAN – bagaimana warga sekolah berinteraksi satu sama lain.

Program ini mempromosikan suasana kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, dan martabat di seluruh komunitas sekolah. Sekolah HRFS berupaya membangun rasa saling menghormati, kepercayaan, dan pemahaman bersama mengenai hak dan tanggung jawab antara staf, siswa, dan masyarakat luas. Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan untuk mencapai hal ini, termasuk: pelatihan atau pertemuan terbuka mengenai hak dan tanggung jawab; program penjangkauan di masyarakat; pelatihan mengenai komunikasi dan penyelesaian konflik; hari terbuka sekolah; pameran bertema hak asasi manusia; serta kemitraan dengan pihak lain, termasuk komunitas HRFS di seluruh dunia.

KURIKULUM DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER – pengajaran hak asasi manusia, baik dari segi substansi maupun metodologi.

Kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran tentang hak asasi manusia dapat ditawarkan baik melalui kurikulum maupun melalui klub dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah HRFS. Sebagai bagian dari program ini, para guru dilatih mengenai hak asasi manusia dan metodologi pendidikan hak asasi manusia agar dapat menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia secara efektif di dalam kelas. Mereka belajar dari Sekolah HRFS lainnya, serta memanfaatkan sumber daya pendidikan hak asasi manusia dan alat kampanye Amnesty International yang sudah ada.

Kegiatan ekstrakurikuler dapat mencakup klub drama yang menampilkan pertunjukan bertema hak asasi manusia, kampanye melawan perundungan, acara peringatan untuk memperingati hari-hari internasional atau nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta pembentukan klub hak asasi manusia untuk mengkampanyekan isu-isu hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

LINGKUNGAN SEKOLAH – lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pembelajaran tentang hak asasi manusia akan paling efektif jika dilakukan dalam lingkungan yang menghormati prinsip-prinsip yang diajarkan. Sekolah HRFS secara fisik diubah menjadi tempat yang mencerminkan, atau merupakan wujud dari, nilai-nilai hak asasi manusia. Kegiatan di bidang ini dapat beragam, mulai dari memberi nama koridor dan gedung dengan nama-nama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam perbaikan dan renovasi gedung yang ada, hingga membangun area hak asasi manusia di sekolah Anda, seperti taman atau ruang diskusi. Informasi lebih lanjut mengenai empat bidang utama kehidupan sekolah dan cara mengintegrasikan 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly School ke dalam empat bidang utama tersebut dapat ditemukan di Bagian Empat panduan ini.

BAGAIMANA PROGRAM HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL (HRFS) BEKERJA?

Program HRFS dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Kerangka kerja program ini dikembangkan oleh Amnesty International, sedangkan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program diberikan oleh kantor Amnesty International setempat atau organisasi pendukung yang ditunjuk. Dukungan diberikan pada setiap tahap perjalanan menuju status sekolah ramah hak asasi manusia.

Q: Bagaimana Amnesty Internasional mendukung perjalanan sekolah menjadi Human Rights Friendly School (HRFS)?

Sejak sebuah sekolah menyatakan minatnya untuk menjadi Sekolah HRFS, Amnesty International dapat membahas prosesnya, memberikan informasi, keahlian, bahan, dan perangkat, serta bertemu dengan pihak manajemen sekolah dan anggota masyarakat sekolah sesuai kebutuhan. Dukungan ini akan terus diberikan selama pelaksanaan

program sesuai dengan kesepakatan bersama antara sekolah Anda dan kantor Amnesty International setempat.

Q: Bagaimana bentuk kemitraan antara sekolah dengan Amnesty International?

Kemitraan antara sekolah dan Amnesty International dapat berkembang dengan cara apa pun yang dianggap tepat agar program tersebut dapat berjalan secara efektif. Pengalaman menunjukkan bahwa pada awal program sering kali diperlukan dukungan organisasi, namun seiring dengan meningkatnya rasa kepemilikan komunitas sekolah terhadap program tersebut, kemitraan ini pun dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Q: Bagaimana sekolah mengintegrasikan hak asasi manusia ke kehidupan sekolah?

Sekolah Anda memiliki kebebasan penuh untuk menentukan cara mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kehidupan sekolah, dengan mempertimbangkan sistem pendidikan nasional yang menjadi bagiannya serta konteks sosial dan budaya di mana sekolah tersebut berada. Kreativitas dan inovasi sangat didorong. Dukungan, bimbingan, serta contoh-contoh kegiatan yang menginspirasi tersedia di setiap tahap prosesnya

APA SAJA TAHAP UNTUK MENJADI HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS?

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil sekolah Anda dalam perjalanannya menjadi Human Rights Friendly Schools, mulai dari memutuskan

untuk berpartisipasi dalam program ini, merencanakan dan melaksanakannya, hingga mengevaluasi efektivitas dan dampak dari upaya-upaya tersebut.

Langkah-langkah ini dimaksudkan sebagai panduan, dan sekolah Anda akan menempuh perjalanannya sendiri untuk menjadi sekolah HRFS. **Program HRFS bersifat fleksibel dan setiap langkahnya dapat disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks khusus sekolah Anda, baik dalam hal isi, urutan langkah, maupun jadwal pelaksanaan program.** Namun, ingatlah bahwa menjadi ramah hak asasi manusia adalah tujuan jangka panjang, bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam atau bahkan dalam satu tahun akademik. Menjadi sekolah HRFS akan membutuhkan upaya berkelanjutan yang harus dipertahankan oleh sekolah dalam jangka panjang.

Berikut ini adalah gambaran umum dari dua fase dalam perjalanan menjadi Human Rights Friendly School (HRFS).

■ **Fase Persiapan** – Fase penyiapan, perencanaan, dan menyusun fondasi program.

■ **Fase Pelaksanaan dan Evaluasi** – yang mencakup pelaksanaan rencana aksi sekolah Anda untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kehidupan sekolah, serta memantau kemajuannya.

Informasi lebih rinci mengenai setiap tahap fase awal serta fase pelaksanaan dan evaluasi program dapat ditemukan pada Bagian Lima.

© Amnesty International



Anak-anak terlibat dalam sesi pemetaan komunitas bersama Amnesty International, Port-au-Prince, Haiti, Maret 2008.

FASE PERSIAPAN

1 KENALI PROGRAM INI LEBIH DALAM

- Pelajari dan pahami 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly Schools serta empat bidang utama kehidupan sekolah.
- Pelajari proses untuk menjadi Sekolah HRFS.
- Hubungi kantor Amnesty International setempat jika Anda memiliki pertanyaan

 Rincian mengenai cara menerapkan 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly Schools serta empat bidang utama kehidupan sekolah dapat ditemukan pada Bagian Tiga dan Empat panduan ini. Anda juga akan menemukan studi kasus yang relevan di sepanjang panduan ini, yang akan memberikan informasi tambahan. Kantor Amnesty International setempat mungkin dapat menyediakan sumber daya atau dukungan tambahan terkait pemahaman Anda mengenai program ini.

2 TENTUKAN APAKAH PROGRAM HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL COCOK DENGAN SEKOLAHMU

- Dengan dukungan kantor Amnesty International setempat, tentukan apakah program HRFS sesuai untuk sekolah Anda

 Pastikan Anda memahami apa saja yang termasuk dalam program ini dan bahwa sekolah Anda memiliki komitmen serta kemampuan untuk melaksanakannya. Keputusan ini sebaiknya diambil bersama dengan kantor Amnesty International setempat, atau organisasi pendukung yang ditunjuk.

3 DAPATKAN PERSETUJUAN DARI PIMPINAN SEKOLAH ANDA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM INI

- Pastikan pihak manajemen dan pimpinan sekolah anda berkomitmen penuh terhadap program ini.

- Resmikan kerjasama melalui Nota Kerjasama (Memorandum of Understanding atau MoU) antara sekolah dan kantor Amnesty International setempat.

 Dukungan dari pimpinan sekolah Anda (misalnya, dewan direksi, pengurus yayasan, kepala sekolah, atau kepala lembaga) sangat penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif di sekolah. Nota Kesepahaman (MOU) program HRFS dapat diperoleh dari kantor Amnesty International setempat.

4 BUATLAH KELOMPOK KERJA UNTUK PROGRAM HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL

- Bentuklah kelompok kerja program atau struktur manajemen lainnya untuk memastikan adanya bimbingan dan kepemimpinan yang efektif dalam program tersebut.
- Pastikan bahwa kelompok kerja program tersebut mencakup perwakilan dari seluruh warga sekolah (guru, siswa, pihak administrasi sekolah, orang tua, anggota komunitas sekolah, dll.).
- Tingkatkan kapasitas anggota kelompok kerja program di bidang-bidang yang mereka anggap berguna untuk mengelola program tersebut.

 Saat membentuk kelompok kerja program, buatlah dokumen kerangka acuan yang memaparkan tujuan umum, sasaran, dan tanggung jawab kelompok tersebut. Kantor Amnesty International setempat dapat membantu Anda dalam hal ini.

5 TINGKATKAN KESADARAN GURU, MURID, & SELURUH KOMUNITAS SEKOLAH TERHADAP PROGRAM INI

- Libatkan semua orang!
- Laksanakan kegiatan sosialisasi agar semua orang memahami dan terinspirasi oleh program ini.
- Kegiatan dan diskusi semacam itu juga berguna untuk mengumpulkan masukan dalam penyusunan rencana aksi sekolah.

 Anda dapat mengadakan pertemuan atau lokakarya malam hari untuk para orang tua dan anggota masyarakat lainnya, mengirim surat kepada organisasi masyarakat, atau menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui cara lain yang Anda anggap tepat. Kantor Informasi Amnesty setempat mungkin dapat membantu Anda pada tahap program ini.

6 LATIHLAH GURU-GURU ANDA

■ Selenggarakan sesi pelatihan bagi para guru Anda yang mencakup informasi mengenai program tersebut, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan metodologi pendidikan hak asasi manusia.

 Pelatihan guru merupakan langkah penting dalam program ini untuk memastikan bahwa program tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan baik di dalam kelas. Kantor Amnesty International setempat mungkin dapat membantu Anda dalam menyelenggarakan pelatihan guru. Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para guru, serta diselenggarakan selama beberapa hari, secara berkala, dengan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

7 LAKUKAN PENILAIAN TERHADAP TINGKAT KERAMAHAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIMILIKI SEKOLAH SEKARANG

- Renungkanlah 10 Prinsip Global untuk *Human Rights Friendly Schools*.
- Ukur tingkat kepedulian sekolah Anda terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan kuesioner yang disediakan
- Lakukan analisis SWOT (menilai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sekolah Anda).
- Gunakan Tingkat Keramahan Hak Asasi Manusia sebagai panduan

 Menilai sejauh mana sekolah Anda ramah hak asasi manusia pada awal program akan membantu dalam pengembangan visi, tujuan, dan rencana aksi sekolah Anda. Hal ini juga akan menjadi titik acuan penting untuk mengevaluasi kemajuan dalam upaya menjadi Sekolah HRFS.

8 KEMBANGKAN VISI SEKOLAH DALAM MENJADI RAMAH HAK ASASI MANUSIA

- Buatlah visi sekolah berdasarkan 10 Prinsip Global dan penilaian sekolah Anda terhadap sejauh mana sekolah tersebut ramah terhadap hak asasi manusia.
- Libatkan seluruh warga sekolah dalam proses ini.

 Pengembangan visi sekolah Anda merupakan langkah penting sebelum menyusun rencana aksi. Jadilah kreatif! Pikirkan apa yang ingin Anda capai dan cita-citakan untuk sekolah Anda. 10 Prinsip Global dan informasi mengenai empat bidang utama kehidupan sekolah dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk merancang pernyataan visi sekolah Anda.

9 KEMBANGKAN RENCANA AKSI SEKOLAH ANDA

- Rencanakan langkah-langkah Anda untuk menjadi lembaga yang ramah hak asasi manusia – susunlah rencana aksi.
- Pastikan Anda memasukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi ke dalam rencana aksi Anda.
- Melibatkan sebanyak mungkin warga sekolah, mulai dari siswa, staf administrasi, orang tua, hingga organisasi masyarakat setempat – ini adalah cara yang bagus untuk melibatkan semua pihak
- Ingatlah bahwa Anda dapat fokus pada satu atau dua bidang prioritas dalam kehidupan sekolah pada awalnya, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah Anda.
- Pastikan semua pihak yang terlibat merasa puas dengan rencana aksi tersebut dan mendukungnya.

 Penyusunan dan pemantauan rencana aksi sekolah sebaiknya dipimpin oleh kelompok kerja program, dan akan lebih efektif jika dilakukan dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah. Sepuluh Prinsip Global serta informasi mengenai empat bidang utama kehidupan sekolah dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana aksi Anda. Gunakan contoh kerangka rencana aksi yang terdapat pada halaman 101 sebagai panduan.

TAHAP PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

1 TERAPKAN RENCANA AKSI-MU

- Pastikan kelompok kerja program mengadakan pertemuan rutin untuk memimpin dan mengarahkan program tersebut.
- Selenggarakan acara peluncuran untuk meningkatkan kesadaran, dan libatkan media jika Anda berkenan.
- Manfaatkan dukungan yang tersedia dari kantor Amnesty International setempat.

👏 Saat menyusun rencana aksi sekolah Anda, Anda dapat mempelajari studi kasus yang disertakan dalam panduan ini sebagai inspirasi, serta belajar dari mereka yang telah memulai langkahnya menuju sekolah yang ramah hak asasi manusia.

2 JALINLAH HUBUNGAN DENGAN SELURUH KOMUNITAS SEKOLAH DAN SEKOLAH LAINNYA

- Pastikan seluruh warga sekolah terlibat dalam semua aspek program ini.
- Selain sekolah-sekolah lain di negara Anda, Anda juga dapat menghubungi Sekolah HRFS di seluruh dunia dengan bantuan Amnesty International.
- Jalin komunikasi dengan sekolah-sekolah lain untuk berbagi pengalaman dan ide serta mendapatkan inspirasi.
- Bangun kemitraan dengan organisasi eksternal untuk memperluas wawasan dan mendapatkan dukungan.

👏 Keterlibatan seluruh warga sekolah menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Kerja sama dengan Sekolah HRFS di berbagai negara dapat dilakukan melalui telekonferensi, surat-menyurat, email, atau pertukaran pelajar internasional. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana untuk mendukung pertukaran pelajar internasional tersebut.

Peluncuran Human Rights Friendly Schools, Benin, 2009.

3 MONITOR, REVIU, DAN EVALUASI PROGRAM

- Nilai dampak program Sekolah HRFS di sekolah Anda.
- Diskusikan persyaratan evaluasi dengan kantor Amnesty International setempat.

👏 Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dari program ini dan harus diperhitungkan saat Anda menyusun rencana aksi. Seluruh warga sekolah dapat ikut serta dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi.

4 REVISI RENCANA AKSI MU DAN SIAPKAN RENCANA AKSI UNTUK TAHUN DEPAN

- Setelah mengevaluasi kemajuan sekolah Anda, perbarui rencana aksi yang ada atau susun rencana aksi baru untuk tahun ajaran berikutnya.
- Kembangkan upaya Anda hingga mencakup keempat bidang utama dalam kehidupan sekolah.

👏 Ingatlah bahwa program Sekolah HRFS merupakan siklus berkelanjutan yang terdiri dari penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.



© Amnesty International

MENJADI SEKOLAH HRFS

GHANA

Sekolah Menengah Atas Accra di Ghana bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kaum muda dengan mempromosikan lingkungan sekolah yang demokratis, metode pengajaran inovatif, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Sekolah ini memberdayakan siswa dengan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan melalui Dewan Perwakilan Siswa (SRC) yang mereka pilih sendiri, yang berfungsi sebagai parlemen bagi komunitas sekolah. Semua saran mengenai kebijakan, prosedur, dan program sekolah diajukan ke SRC untuk mendapatkan rekomendasi dan tanggapan dari siswa, kemudian diteruskan kepada para guru dan pihak administrasi sekolah.

© Amnesty International



Hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam beberapa mata pelajaran kurikulum sekolah, dan metode pengajaran mengintegrasikan proses partisipatif. Tidak hanya terjadi perubahan dalam hierarki kekuasaan di kelas, tetapi guru juga merasa dapat lebih fokus pada program yang berorientasi visual dan acara dramatis, termasuk bermain peran (role play) yang dapat menangani isu hak asasi manusia dan memiliki dampak positif pada pembelajaran. Baik siswa maupun guru sama-sama menyatakan bahwa mereka kini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab mereka.

Sekolah memiliki beberapa klub dan organisasi yang telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Siswa dan staf juga telah membangun Taman Hak Asasi Manusia tempat mereka dapat menghabiskan waktu luang, mendiskusikan isu-isu hak asasi manusia, serta memamerkan dan berbagi cerita tentang hak asasi manusia. Siswa merasa ada keterbukaan dan toleransi yang lebih besar terhadap keyakinan dan agama yang beragam (Islam dan Kristen, serta agama lain, diwakili di sekolah ini). Mulai dari pelatihan guru mengenai konten hak asasi manusia dan metodologi partisipatif, hingga pemberdayaan siswa untuk mewakili diri mereka sendiri dan mengambil tindakan terhadap isu-isu hak asasi manusia nasional seperti hukuman mati, komunitas Sekolah Menengah Atas Accra telah mengalami transformasi, memimpin jalan menuju budaya hak asasi manusia di mana rasa hormat, martabat, dan non-diskriminasi menjadi landasan kehidupan sehari-hari. Pada 20 Oktober 2011, Presiden Ghana saat itu, Professor John Atta Mills, mengunjungi sekolah tersebut dan, terkesan dengan keberhasilannya menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan sekolah, berkata, "Saya sangat mengagumi Accra High School sebagai pelopor."

Program HRFS sedang berlangsung di Sekolah Menengah Atas Accra, Ghana, tahun 2011.

TIPS UTAMA

HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS

1 LUANGKAN WAKTU — JANGAN TERBURU-BURU

Menjadi Sekolah HRFS membutuhkan dukungan seluruh komunitas sekolah. Penting untuk meluangkan waktu dan energi sejak awal agar seluruh komunitas sekolah memahami program ini, mengetahui bagaimana cara terlibat, serta merasakan kepemilikan terhadap program tersebut.

2 PASTIKAN DUKUNGAN DARI PIMPINAN SEKOLAH

Memastikan adanya dukungan dari pimpinan sekolah dan kepala sekolah sangat penting bagi program ini dan keberhasilannya. Dukungan ini membantu menjelaskan program kepada orang lain dalam kelompok kerja program serta memastikan bahwa program menjadi berkelanjutan dalam jangka panjang. Dukungan pimpinan sekolah juga menempatkan program dalam proses perencanaan sekolah dan memastikan waktu serta dukungan yang cukup dialokasikan.

3 TUNJUK PENGHUBUNG DENGAN AMNESTY INTERNATIONAL

Pastikan seseorang di sekolah Anda ditunjuk sebagai kontak utama untuk bekerja dengan Amnesty International. Hal ini akan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara kedua pihak dan membantu mereka bekerja sama selama proses berlangsung, serta memungkinkan sekolah untuk meminta dan menerima dukungan yang efektif dan tepat waktu dari Amnesty International.

4 LIBATKAN SELURUH KOMUNITAS SEKOLAH

Berikan semua warga sekolah kesempatan untuk terlibat dalam menilai sejauh mana sekolah menerapkan prinsip ramah HAM. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dalam komunitas sekolah dan mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Keterlibatan ini juga penting dalam pelaksanaan kegiatan program, serta dalam peninjauan dan penilaian program. Mendapatkan perspektif yang berbeda dari berbagai pihak akan memperkaya proses dan pengalaman belajar bagi semua pihak, serta memastikan program dapat berkembang lebih jauh ke dalam komunitas.

5 LATIH GURU ANDA

Meluangkan waktu untuk melatih guru merupakan hal yang penting untuk keberhasilan program. Memastikan bahwa guru memahami HAM dan pendidikan HAM akan memberikan mereka perangkat yang diperlukan untuk sepenuhnya menjalankan program dan berkontribusi terhadap keberhasilannya.

6 BELAJAR DARI DAN BERSAMA ORANG LAIN

Aspek khusus dari program HRFS adalah keterlibatan jaringan internasional sekolah-sekolah di seluruh dunia. Yang lebih baik lagi, Anda dapat memastikan keberhasilan program di sekolah Anda dengan terhubung dengan sekolah lain yang berpartisipasi dalam program ini untuk berbagi keberhasilan dan mendiskusikan cara mengatasi tantangan yang dihadapi. Bekerjalah dengan kantor Amnesty International setempat untuk mengidentifikasi dan menghubungi sekolah-sekolah HRFS lainnya.

7 JANGAN TAKUT MELAKUKAN KESALAHAN

Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan melihat apakah hal tersebut berhasil. Jika tidak berjalan sesuai harapan, Anda dapat belajar dari pengalaman tersebut dan membagikan cerita Anda agar orang lain dapat belajar serta meningkatkan program di sekolah mereka.

8 BERSIKAP REALISTIS

Menjadi sekolah yang ramah HAM membutuhkan waktu. Tetapkan tujuan SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu). Misalnya, dapat ditetapkan tujuan yang dapat dicapai dalam setiap tahun akademik. Jangan mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus, dan pastikan Anda merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya sekolah Anda.

9 BERPIKIR JANGKA PANJANG DAN TERUS BERJALAN

Tidak ada sekolah yang akan langsung sempurna dalam menerapkan HRFS. Cobalah untuk tidak melihat program ini sebagai sesuatu yang hanya difokuskan pada satu tujuan tertentu dan kemudian beralih ke hal lain. Sebaliknya, lihatlah program ini sebagai dasar yang menopang pekerjaan sekolah dalam jangka panjang.

10 RAYAKAN KEBERHASILAN ANDA

Anda akan secara rutin memantau dan mengevaluasi upaya Anda untuk menjadi sekolah ramah HAM, jadi mengapa tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk merayakan keberhasilan Anda? Biarkan komunitas sekolah mengetahui keberhasilan Anda melalui sebuah acara atau hasil positif melalui pertemuan umum atau buletin. Rayakan upaya sekolah Anda dalam menjadi komunitas di mana HAM dipraktikkan, ditunjukkan, dan dijalankan.



Kampanye Amnesty International Korea bertajuk "Kami lebih suka buku daripada senjata mainan" di kamp Gyonggi English Village Paju, Korea Selatan, tahun 2007

TIGA

10 PRINSIP GLOBAL UNTUK HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL



10 PRINSIP GLOBAL

10 Prinsip Global HRFS dikembangkan untuk mendukung komunitas sekolah di seluruh dunia dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kehidupan sekolah. Sebagai landasan program HRFS, prinsip-prinsip ini didasarkan pada standar, norma, dan instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak-Hak Anak
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia

Instrumen-instrumen internasional ini memiliki tujuan yang sama: untuk memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia bagi semua orang. Semuanya juga secara jelas rinci pendidikan sebagai suatu hak, serta metode utama untuk mewujudkan hak-hak lainnya. 10 Prinsip Global ini menguraikan bagaimana sekolah dapat mengambil nilai-nilai dan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen tersebut dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah.

APA ARTI 10 PRINSIP GLOBAL TERSEBUT BAGI SEKOLAH?

10 Prinsip Global untuk HRFS tercantum dalam tabel di halaman 8 panduan ini. Setiap prinsip dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

PRINSIP NON-DISKRIMINASI DAN INKLUSI

PRINSIP 1: Sekolah HRFS adalah komunitas di mana kesetaraan, non-diskriminasi, martabat, dan rasa hormat menjadi landasan semua aspek kehidupan sekolah. aspek kehidupan sekolah.

Agar sebuah sekolah ramah terhadap hak asasi manusia, sekolah tersebut harus mengakui dan mendukung nilai-nilai

yang mendasari hak asasi manusia, yang menjamin kesetaraan dan martabat bagi setiap orang dalam komunitas sekolah. Sekolah HRFS mempromosikan kesetaraan, non-diskriminasi, martabat, dan rasa hormat, secara aktif menunjukkan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga menciptakan landasan untuk meningkatkan etos sekolah yang menghormati hak asasi manusia.

PRINSIP 2: Sekolah HRFS menyediakan lingkungan belajar di mana semua hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan.

Sekolah HRFS akan menciptakan lingkungan belajar di mana hak asasi manusia semua orang dihormati, di mana praktik pembelajaran dan pengajaran menumbuhkan rasa hormat di antara warga serta mempromosikan hak asasi manusia siswa, guru, staf, dan pimpinan sekolah. Sekolah yang ramah HAM akan berupaya mempromosikan semua hak asasi manusia siswa, guru, dan warga sekolah lainnya, baik hak sipil maupun politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Meskipun pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan terwujudnya hak asasi manusia masyarakat, Sekolah HRFS dapat memainkan peran penting dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia, dan dengan demikian menumbuhkan rasa aman, keamanan, serta rasa martabat dan keadilan bersama.

PRINSIP 3: Sekolah HRFS mengedepankan inklusi dalam semua aspek kehidupan sekolah. PRINSIP 3: Sekolah HRFS mengedepankan inklusi dalam semua aspek kehidupan sekolah.

Sekolah dapat mempertemukan orang-orang dari latar belakang, budaya, agama, generasi, dan pengalaman yang beragam. Tanpa upaya yang kuat dan kewaspadaan dari semua warga sekolah, perbedaan dapat dengan mudah ditonjolkan secara negatif, atau mereka yang berasal dari kelompok yang lebih rentan atau kurang beruntung dapat terpinggirkan dan/atau terstigmatisasi di dalam sekolah. Sekolah HRFS berkomitmen pada kesetaraan, non-diskriminasi, rasa hormat, dan martabat, serta memberdayakan siswa dan warga sekolah lainnya. Sekolah tidak hanya harus memprioritaskan inklusi dalam kebijakan dan praktiknya, tetapi juga menjadikannya sebagai inti dari budaya sekolah. Sekolah HRFS harus memastikan bahwa semua warga sekolah terlibat dan diberdayakan untuk berpartisipasi secara setara, tanpa memandang jenis kelamin, status, atau perbedaan.

PARTISIPASI

PRINSIP 4: Sekolah HRFS mendorong seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi secara bebas, aktif, dan bermakna dalam kehidupan sekolah, termasuk dalam membentuk kebijakan dan praktik sekolah.

Partisipasi memiliki implikasi yang signifikan bagi pendidikan, dan Sekolah HRFS menyadari bahwa anak-anak khususnya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu yang mempengaruhi mereka. Partisipasi siswa dalam kehidupan sekolah telah dikaitkan dengan peningkatan hasil belajar. Tingkat partisipasi orang tua yang meningkat dalam lingkungan akademik telah terbukti memberikan dampak positif bagi sekolah dan masyarakat. Sekolah yang ramah HAM akan memberikan kesempatan yang nyata kepada siswa dan warga sekolah lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, sekolah yang ramah HAM menciptakan kerangka kerja untuk memberdayakan siswa agar menjadi warga negara yang terinformasi dan aktif.

PRINSIP 5: Sekolah HRFS memastikan bahwa setiap warga sekolah memiliki informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sekolah.

Memberikan kesempatan berpartisipasi bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya tidak cukup untuk menjamin partisipasi yang aktif dan bermakna. Sekolah yang ramah HAM perlu menyediakan semua informasi yang diperlukan bagi seluruh warga sekolah agar mereka mengetahui bagaimana, di mana, dan kapan mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dan efektif. Sekolah yang ramah HAM akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan prosedur sekolah serta informasi relevan lainnya tersedia secara bebas bagi semua warga sekolah. Sekolah yang ramah HAM akan memfasilitasi partisipasi individu, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks khusus mereka.

AKUNTABILITAS

PRINSIP 6: Sekolah HRFS bersifat adil, akuntabel, dan transparan dalam seluruh perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya.

Kepercayaan terbangun di sekolah melalui kebijakan yang transparan, adil, dan inklusif, serta budaya yang mendorong seluruh warga sekolah untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta tindakan di lingkungan sekolah. Sekolah yang memprioritaskan pembangunan budaya kepercayaan dan akuntabilitas dalam perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya akan mendukung seluruh warga sekolah untuk menjadi peserta aktif dalam kehidupan mereka sendiri. Sekolah HRFS akan mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas, serta memastikan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan bersifat transparan. Para pemimpin sekolah, termasuk siswa dan warga, bertindak untuk saling meminta pertanggungjawaban, memastikan bahwa semua praktik sekolah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.



© Amnesty International

“How to integrate the 10 Global Principles in four key areas of school life” pada lokakarya Orientasi Human Rights Friendly School, London, Inggris 2009.

PRINSIP 7: Sekolah yang Ramah HAM melindungi seluruh warga sekolah dengan menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama.

Seluruh upaya yang dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada siswa akan terganggu jika siswa, guru, atau staf sekolah lainnya merasa terancam di lingkungan sekolah. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warga sekolah merupakan tugas bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Keamanan dan keselamatan kelompok yang terpinggirkan atau rentan harus mendapat perhatian khusus dari sekolah. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, Sekolah HRFS akan menumbuhkan rasa solidaritas, martabat, dan tanggung jawab bersama yang mendukung dan memfasilitasi proses mengajar dan belajar.

PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PRINSIP 8: Sekolah HRFS mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam semua aspek pengajaran dan kurikulum.

Hak asasi manusia berasal dari serangkaian nilai dan prinsip yang kompleks dan telah disepakati secara internasional. Oleh karena itu, hak asasi manusia sering dipandang secara abstrak dan tanpa pemahaman yang utuh mengenai cakupan serta potensi penerapannya. Agar hak asasi manusia dapat dipahami dan dipromosikan di seluruh komunitas sekolah, hak asasi manusia harus diperkenalkan kepada siswa di dalam kelas serta kepada guru, administrator sekolah, dan staf lainnya dalam lingkungan pengembangan profesional, tidak hanya melalui konten kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga melalui metodologi pengajaran. Hak asasi manusia harus hadir dalam cara pengalaman belajar dibentuk, melalui pendekatan pedagogis yang menghormati hak asasi manusia dan mendorong partisipasi.

PRINSIP 9: Sekolah HRFS berupaya memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan, khususnya siswa yang terpinggirkan karena gender, status, atau perbedaan mereka.

Pendidikan hak asasi manusia bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar memahami dan

menuntut hak-hak mereka serta menerima tanggung jawab mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pendidikan harus “mengembangkan manusia seutuhnya” dan “meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia”. Sekolah HRFS akan menciptakan peluang bagi semua siswa, terutama mereka yang terpinggirkan karena jenis kelamin, status, atau perbedaan mereka. Akses yang setara terhadap pendidikan, kesetaraan dalam komunitas sekolah, peluang untuk partisipasi yang bermakna, dan etos yang mengajarkan siswa cara menyeimbangkan hak dan tanggung jawab memberdayakan siswa untuk berpartisipasi secara aktif di luar komunitas sekolah. Hal ini memberikan mereka alat untuk mengembangkan potensi penuh mereka.

PRINSIP 10: Sekolah HRFS memberdayakan siswa dan staf untuk menjadi anggota aktif komunitas global, berbagi pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran dengan orang lain, serta mengambil tindakan untuk menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan.

Kaum muda tumbuh sebagai bagian dari komunitas global yang semakin terhubung. Sekolah yang HAM akan mendukung kaum muda untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia guna memahami dunia ini, terhubung dengan teman sebaya di seluruh dunia, mengembangkan pemahaman tentang penghormatan terhadap budaya dan cara hidup yang berbeda, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu global yang mendesak. Mendorong siswa untuk menjadi warga dunia yang aktif dan berpengetahuan akan menjadi bagian utama dari sekolah yang ramah hak asasi manusia, sehingga siswa menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk membawa perubahan positif terhadap hak asasi manusia di dunia.

POIN REFLEKSI: Menerapkan 10 Prinsip Global HRFS

Mendorong para siswa, guru, dan yang lainnya untuk menelaah 10 Prinsip Global HRFS dan mempertimbangkan maknanya dalam konteks sekolah Anda:

- Apakah Anda setuju dengan 10 Prinsip Global tersebut? Adakah hal yang ingin Anda tambahkan atau ubah agar Prinsip Global tersebut dapat diterapkan di sekolah Anda?
- Pertimbangkan setiap Prinsip Global secara bergantian. Bagaimana prinsip ini dipromosikan atau dihormati di sekolah Anda saat ini? Apa yang perlu Anda lakukan untuk lebih mengembangkan prinsip ini di sekolah Anda?

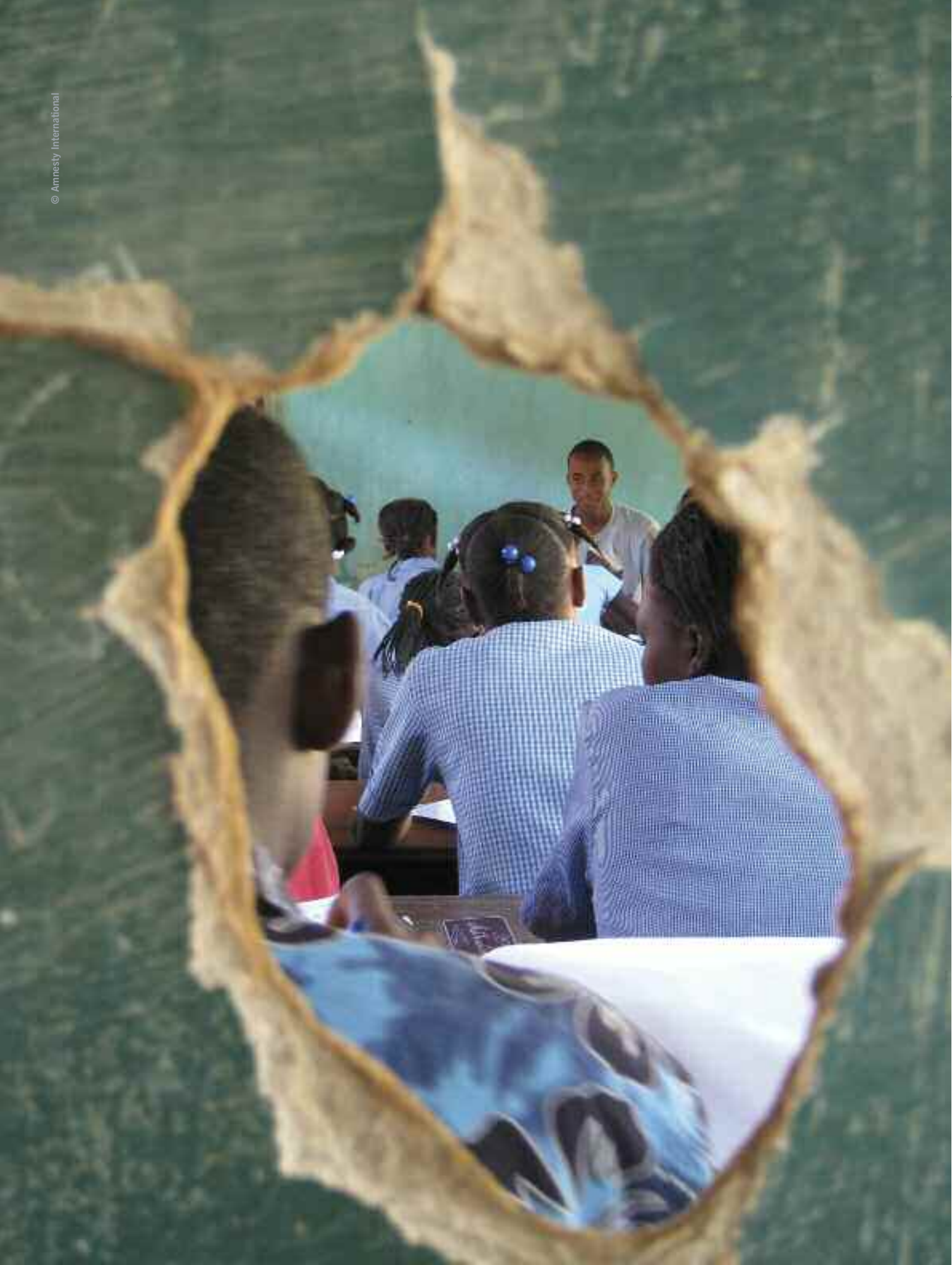
AKTIVITAS: Bagaimana menurutmu bentuk ideal dari Human Rights Friendly School?

Setelah mempelajari 10 Prinsip Global HRFS, mintalah para siswa, guru, dan orang tua untuk bekerja sama menciptakan gambaran visual tentang seperti apa Sekolah yang Ramah HAM di sekolah Anda nantinya. Yang kreatif ya!



© Amnesty International

Nicaragua's Butterflies of Hope, Kampanye Amnesty International dalam melindungi hak perempuan di Nicaragua, 2011.



Sebuah ruangan kelas di Lavanneau, Haiti, terlihat sebuah lubang di papan yang digunakan sebagai pembatas antara kelas, 2008.

EMPAT EMPAT BIDANG UTAMA KEHIDUPAN SEKOLAH



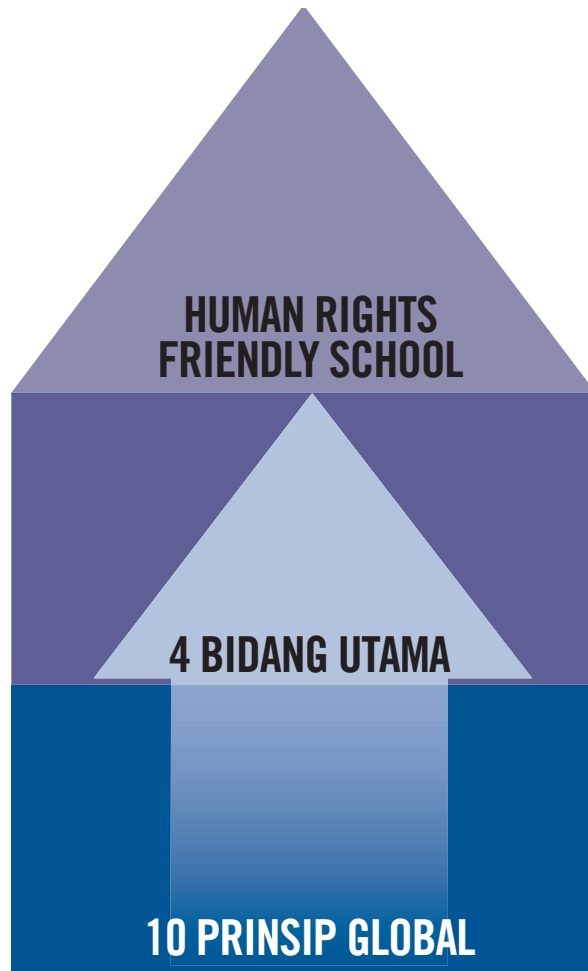
EMPAT BIDANG UTAMA KEHIDUPAN SEKOLAH

Menjadi Sekolah HRFS berarti lebih dari sekadar memungkinkan siswa untuk belajar tentang hak asasi manusia. Sekolah akan berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam semua aspek operasional dan kegiatannya, pada dasarnya segala hal yang dilakukannya sebagai sebuah sekolah. Hal ini disebut pendekatan sekolah secara menyeluruh atau pendekatan holistik terhadap pendidikan hak asasi manusia.

Sekolah HRFS akan berupaya mengintegrasikan 10 Prinsip Global HRFS ke dalam empat bidang utama kehidupan sekolah: Tata Kelola, Hubungan, Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler, serta Lingkungan Sekolah.

Bidang-bidang utama ini tidak saling eksklusif, melainkan saling tumpang tindih, dan beberapa kegiatan yang dilakukan sekolah mungkin mencakup lebih dari satu bidang utama. Namun, keempat bidang utama ini mencerminkan spektrum luas pekerjaan yang menjadi fokus sekolah sehari-hari.

Penting untuk dicatat bahwa mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam empat bidang kehidupan sekolah dapat menjadi proses bertahap. Tujuan akhir dari Sekolah HRFS adalah integrasi hak asasi manusia di seluruh empat bidang utama tersebut, namun hal ini harus dicapai sesuai dengan kecepatan yang ditentukan oleh sekolah dengan dukungan dari Amnesty International.



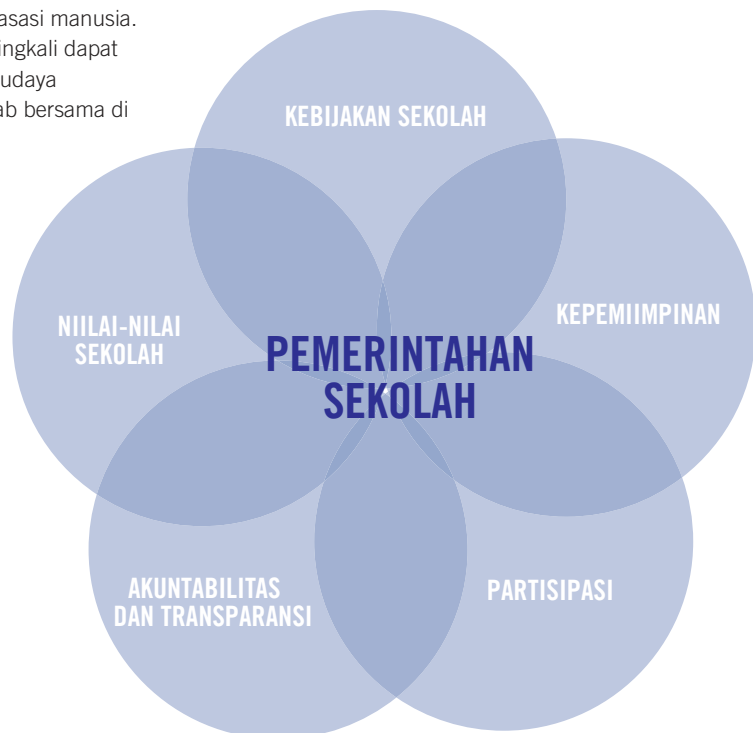
BIDANG UTAMA 1: TATA KELOLA

MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DAN PARTISIPASII DALAM KEPENGURUSAN SEKOLAH

Cara pengelolaan sekolah memainkan peran penting dalam bagaimana warga sekolah berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Sekolah HRFS memastikan bahwa semua orang dalam komunitas sekolah memiliki peran dalam pengelolaan dan administrasi sekolah, termasuk kepemimpinan, pengembangan visi dan misi sekolah, penyusunan dan penerapan kebijakan serta prosedur sekolah, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Sebuah sekolah mungkin sudah memiliki OSIS, badan pemerintahan, atau serikat yang diajak berkonsultasi mengenai praktik-praktik sekolah. Hanya dewan sekolah atau badan pengelola yang melibatkan siswa dan warga sekolah lainnya yang dapat berkontribusi secara berarti terhadap tata kelola sekolah yang ramah hak asasi manusia. Berbagai tanggung jawab dalam tata kelola seringkali dapat memberikan peluang untuk menumbuhkan budaya kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama di antara warga sekolah.

Tabel-tabel dalam bagian ini menguraikan bagaimana sekolah Anda dapat mengintegrasikan 10 Prinsip Global HRFS ke dalam berbagai elemen tata kelola sekolah, termasuk: nilai-nilai sekolah, kebijakan sekolah, kepemimpinan, partisipasi, serta akuntabilitas dan transparansi. Daftar ini tidak bersifat mutlak, dan Anda mungkin ingin memodifikasinya atau merumuskan elemen-elemen terkait tata kelola sekolah yang lebih relevan bagi sekolah Anda.



1. NILAI-NILAI SEKOLAH

Pengoperasian dan pelaksanaan Sekolah HRFS harus didasarkan pada nilai-nilai inti hak asasi manusia seperti keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, rasa hormat, dan martabat. Sebuah sekolah mungkin sudah memiliki visi atau pernyataan misi, motto sekolah, atau seperangkat prinsip operasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia harus diintegrasikan ke dalamnya. Menjadi ramah hak asasi manusia tidak berarti mengabaikan nilai-nilai yang sudah ada, terutama karena banyak di antaranya mungkin sudah selaras dengan hak asasi manusia. Sebuah sekolah tidak perlu mengubah etos atau pernyataan misinya yang sudah ada, melainkan harus merenungkan bagaimana hak asasi manusia dapat dipromosikan melalui nilai-nilai yang telah dinyatakan dan dianut bersama oleh sekolah.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah sekolah sudah memiliki visi, misi, etos, moto, atau pedoman operasional yang mencerminkan nilai-nilai sekolah?
- Bagaimana visi, misi, atau pedoman operasional sekolah yang sudah ada dapat disesuaikan atau ditambahkan agar mencakup nilai-nilai hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, inklusivitas, rasa hormat, dan martabat?
- Bagaimana visi, misi, atau pedoman operasional sekolah yang sudah ada dapat disesuaikan atau ditambahkan agar mencakup nilai-nilai hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, inklusivitas, rasa hormat, dan martabat?

AKTIVITAS YANG MUNGKIN DILAKUKAN

- Buat atau perbarui pernyataan nilai, visi, misi, atau etos sekolah, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses tersebut.
- Gunakan 10 Prinsip HRFS guna menyusun serangkaian nilai inti sekolah.

“My dream school” di
Workshop pengenalan
Sekolah HRFS, London,
Britania Raya, 2011.



© Amnesty International



STUDI KASUS NILAI SEKOLAH

ITALIA

Di Liceo Norberto Rosa di Susa, para warga sekolah, termasuk siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah, turut serta dalam penyusunan Perjanjian Tanggung Jawab Bersama. Perjanjian tersebut memaparkan pernyataan nilai-nilai yang disepakati secara demokratis oleh sekolah, yang merinci tanggung jawab bersama mereka dalam mempromosikan hak asasi manusia di seluruh lingkungan sekolah. Manfaat dari pembuatan Perjanjian ini ada dua: pertama, kini terdapat kerangka nilai bersama yang jelas bagi sekolah, dan kedua, proses pengembangan kerangka tersebut mendorong terciptanya suasana saling menghormati dan kerja sama di antara staf, siswa, dan guru. Sekolah juga bekerja sama dengan kantor Amnesty International setempat untuk menyusun Perjanjian Tanggung Jawab Bersama antara Amnesty International dan sekolah, yang menguraikan bagaimana staf Amnesty International dapat mendukung realisasi kerangka nilai di sekolah.

PARAGUAY

Di Colegio Técnico Nacional di Asunción, para pimpinan sekolah menggalakkan visi mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke dalam kehidupan sehari-hari sekolah dengan menyelenggarakan beberapa Hari Kesadaran Hak Asasi Manusia. Seluruh warga sekolah diundang untuk berpartisipasi dalam serangkaian diskusi mengenai cara terbaik untuk memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam pernyataan visi sekolah secara keseluruhan. Sebuah pernyataan visi baru pun disusun untuk sekolah tersebut, yang telah dimasukkan ke dalam anggaran dasar sekolah yang telah direvisi.

“
Kini terdapat
kerangka nilai
bersama yang
jelas untuk
sekolah tersebut”
”



2. KEBIJAKAN SEKOLAH

Dalam Human Rights Friendly Schools, kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan operasional dan praktik sekolah, seperti kebijakan perlindungan anak, anti-perundungan, dan kebijakan kesetaraan, akan mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sekolah dapat meninjau kembali kebijakannya untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin berdampak pada hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam proses penyusunan kebijakan sekolah yang baru.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Seberapa ramahkah kebijakan sekolah saat ini terhadap hak asasi manusia, seperti kebijakan disiplin atau kebijakan anti-perundungan?
- Apakah kebijakan sekolah merujuk pada hak asasi manusia pada bagian-bagian yang relevan?
- Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mendorong inklusi dan kesetaraan kesempatan? Apakah sekolah memiliki kebijakan yang mendorong kesetaraan dan non-diskriminasi?
- Bagaimana cara agar staf dan siswa dapat lebih terlibat dalam penyusunan atau revisi kebijakan sekolah?
- Apakah ada ruang bagi staf dan siswa untuk mengemukakan masalah terkait kebijakan sekolah secara konstruktif?

AKTIVITAS YANG MUNGKIN DILAKUKAN

- Lakukan penilaian “Suhu Hak Asasi Manusia” di sekolah (lihat halaman 80 dan 86–89) untuk membantu menentukan sejauh mana kebijakan dan praktik di sekolah dianggap ramah hak asasi manusia oleh para pihak, menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana sekolah dapat memperbaiki kebijakannya.
- Lakukan audit terhadap kebijakan sekolah yang ada untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap hak asasi manusia
- Lakukan audit terhadap kebijakan sekolah yang ada untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap hak asasi manusia
- Pastikan bahwa warga sekolah terlibat dalam pengembangan atau revisi kebijakan sekolah, terutama kelompok-kelompok yang mungkin terdampak oleh kebijakan tersebut



© Amnesty International

Siswa dan guru dari sekolah Lycée Ibn Youssef di Marrakech, Maroko, berdiskusi tentang cara mengintegrasikan hak asasi manusia di sekolah mereka, 2010.

STUDI KASUS KEBIJAKAN SEKOLAH

IRLANDIA

Di Castleknock Community College di Dublin, para pimpinan sekolah mengundang seorang mahasiswa program doktoral setempat untuk melakukan audit eksternal terhadap kebijakan dan praktik sekolah guna memahami dengan lebih baik bagaimana mereka merespons perubahan yang terjadi di masyarakat setempat. Audit tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam mempertimbangkan kebutuhan dan keprihatinan masyarakat setempat saat menyusun kebijakan sekolah

PANTAI GADING

Di Collège Moderne La Colombe de Koumassi di Abidjan, para pimpinan sekolah memperkenalkan struktur tata kelola baru yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Sekolah tersebut membentuk dewan yang dipimpin oleh guru dan siswa, yang bertugas memberikan masukan kepada pimpinan sekolah terkait kebijakan dan operasional sekolah. Sebuah Piagam Sekolah yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga telah disusun dan dipasang di semua ruang kelas di sekolah tersebut.

“
Struktur tata
kelola baru yang
bertujuan untuk
mendorong
partisipasi aktif
”



3. KEPEMIMPINAN

Karena Sekolah HRFS mendorong peningkatan partisipasi demokratis, terdapat peluang yang jelas untuk mempromosikan kepemimpinan bersama atau terdesentralisasi di antara warga sekolah. Hal ini dapat mencakup penunjukan atau pemilihan pemimpin dari kalangan siswa, guru, dan masyarakat yang bertugas menyampaikan keprihatinan dan gagasan dari konstituen mereka. Hal ini juga dapat mencakup penyerahan wewenang kepada dewan siswa sekolah untuk memimpin inisiatif-inisiatif tertentu yang bertujuan mempromosikan hak asasi manusia di dalam komunitas sekolah. Karena gaya dan pendekatan kepemimpinan bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu sekolah ke sekolah lain, sekolah pada akhirnya harus memutuskan bagaimana cara mempromosikan kepemimpinan bersama untuk mencapai tujuan hak asasi manusianya.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Siapa saja yang dapat berperan sebagai “pelopor” hak asasi manusia di lingkungan sekolah?
- Bagaimana rapat dan acara kepemimpinan diselenggarakan, dan seberapa besar ruang yang tersedia untuk melibatkan siswa dan guru?
- Bagaimana peran kepemimpinan dapat lebih inklusif terhadap siswa, guru, administrator, dan warga sekolah lainnya (misalnya, orang tua)?
- Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa siswa, staf, dan pihak lain memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Minta siswa dan staf untuk memberikan contoh-contoh kepemimpinan yang baik di lingkungan sekolah.
- Di kalangan siswa, bagikan tanggung jawab kepemimpinan berdasarkan kelas atau angkatan, sehingga setiap kelas dapat memilih seorang ketua kelas atau ketua angkatan, yang bertugas mewakili kepentingan siswa di kelas atau angkatannya serta membantu penerapan hak asasi manusia di kelas tersebut.
- Ciptakan peluang kepemimpinan di semua tingkatan di seluruh sekolah, terutama bagi siswa. Memberikan wewenang yang nyata kepada para pemimpin dapat menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab di antara warga sekolah.

© Amnesty International



Deborah Abbey, representasi dari Accra High School, berdebat pada Inter-Human Rights Friendly Schools Debate di Ghana, Mei 2012.



STUDI KASUS KEPEMIMPINAN SEKOLAH

GHANA

Sekolah Menengah Atas Accra mengembangkan sistem kepemimpinan bersama sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menjadi sekolah yang ramah hak asasi manusia. Sekolah tersebut membentuk Dewan Perwakilan Siswa (SRC) yang terdiri dari para pemimpin siswa terpilih, dan baik SRC maupun prefecture (tim kepemimpinan) sekolah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Amnesty International. Salah satu hasil utama dari pelatihan tersebut adalah terbentuknya proses akuntabilitas antara SRC dan kepengurusan sekolah, yang mencakup sesi tanya jawab rutin yang dirancang untuk mendorong transparansi dalam kepemimpinan sekolah. Asosiasi Orang Tua dan Guru juga dibentuk, dan sekolah mengadakan beberapa sesi forum terbuka untuk membahas teknik manajemen dan penyelesaian konflik sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjadi sekolah yang ramah hak asasi manusia. Sebagai hasil dari inisiatif-inisiatif ini, siswa kini terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah dan diajak berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.

HUNGARIA

Salah satu inisiatif pertama yang diambil oleh Sekolah Dr. Ambedkar, dengan bantuan Amnesty International Hongaria, adalah menyelenggarakan Perkemahan Dewan Siswa untuk melatih para siswa dalam keterampilan tertentu, seperti kepemimpinan. Dalam perkemahan tersebut, para siswa bekerja sama untuk menyusun aturan dasar bersama, serta mengikuti lokakarya dan debat mengenai keragaman budaya, kesetaraan gender, dan inklusi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan-kegiatan ini, para peserta belajar untuk mengemukakan pendapat mereka sambil mendengarkan, memahami, dan menghormati pendapat orang lain. Langkah selanjutnya bagi para siswa ini adalah menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sekolah sehari-hari dan dalam peran mereka sebagai mediator antara pimpinan sekolah dan seluruh siswa.

“

Sekolah Menengah Atas Accra mengembangkan sistem kepemimpinan bersama sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menjadi sekolah yang ramah hak asasi manusia’ ”



4. PARTISIPASI

Proses tata kelola sekolah dapat meningkatkan pemberdayaan dengan menjamin suara dari seluruh bagian komunitas sekolah (termasuk guru, siswa, pimpinan dan staf administrasi sekolah, serta orang tua) didengarkan, dan memberikan ruang dan wadah bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Pimpinan sekolah dapat bekerja sama dengan badan tata kelola yang representatif (seperti OSIS) untuk mendelegasikan tanggung jawab atau mengumpulkan masukan mengenai kebijakan sekolah. Tata kelola sekolah yang demokratis dan partisipatif dapat membangun dukungan yang kuat terhadap hak asasi manusia di seluruh lingkungan sekolah.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana agar seluruh warga sekolah dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, atau status lainnya?
- Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan tata kelola? Bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi?
- Keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, guru, dan staf lainnya agar dapat berpartisipasi dalam tata kelola sekolah?
- Bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa masyarakat luas turut terlibat dalam tata kelola sekolah?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Selenggarakan pemilihan untuk membentuk badan perwakilan siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah sekolah.
- Pastikan terdapat mekanisme bagi guru, orang tua, dan staf lainnya untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola.
- Berikan pelatihan bagi guru, siswa, dan komunitas sekolah secara luas mengenai partisipasi serta tata kelola yang ramah hak asasi manusia.
- Bentuk kelompok-kelompok isu yang memungkinkan orang-orang yang tertarik pada bidang tertentu untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, misalnya kelompok ramah lingkungan, kelompok anti-perundungan.
- Pastikan informasi yang diperlukan disediakan bagi warga sekolah yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses tata kelola.

Para siswa berpartisipasi dalam lokakarya untuk hak asasi manusia di Moldova, Januari 2010.



© Amnesty International Moldova

STUDI KASUS PARTISIPASI

IRLANDIA

Sekolah Menengah Warrenmount di Dublin mendorong partisipasi seluruh sekolah dalam isu-isu hak asasi manusia tertentu melalui sejumlah pendekatan inovatif. Selain menyelenggarakan pemilihan umum untuk dewan siswa (OSIS) di awal setiap tahun ajaran, para siswa dan staf bekerja sama mengembangkan inisiatif untuk menangani masalah-masalah yang dirasakan di sekolah. Menanggapi kekhawatiran tentang perundungan (terutama perundungan daring) di wilayah setempat yang mempengaruhi siswa sekolah, program Positive February diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang cara terbaik dalam berinteraksi dengan teman sebaya secara daring. Positive February mencakup serangkaian kegiatan selama sebulan di mana siswa dan staf berupaya ekstra untuk bersikap baik kepada teman sebaya mereka. OSIS juga menghadiri pertunjukan teater tentang perundungan daring dan lokakarya yang dipimpin oleh para aktor; siswa membagikan pembelajaran mereka kepada kelas-kelas yang mereka wakili. Sekolah juga mengundang seorang pakar terkemuka tentang perundungan daring dari Trinity College Dublin untuk mengunjungi sekolah dan memfasilitasi lokakarya tentang topik tersebut, dengan kunjungan lanjutan direncanakan untuk membantu siswa, orang tua, dan staf merumuskan kebijakan anti-perundungan. Untuk lebih mendorong partisipasi komunitas dalam isu ini, polisi komunitas lokal dan petugas penghubung junior Garda juga mengunjungi sekolah dan menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang perundungan dan penanganan konflik.

Model ini, yang mendorong partisipasi lintas sektor dari masyarakat melalui lokakarya dan inisiatif selama satu bulan, sangat berhasil. Model ini meningkatkan kesadaran di seluruh sekolah, memberdayakan siswa untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian mereka, serta melibatkan orang tua dan guru dalam bekerja sama untuk mengembangkan suasana sekolah yang positif.

SENEGAL

Di Senegal, tepatnya di Lycée Technique André Peytavin di Saint-Louis, warga sekolah membentuk Komite Program yang terdiri dari guru, siswa, dan anggota manajemen sekolah. Setiap tahun, Komite Program menyelenggarakan konferensi untuk meningkatkan kesadaran tentang mencegah kekerasan terhadap siswi, yang dihadiri oleh siswa dari sekolah tersebut maupun sekolah lain. Dalam konferensi tersebut, siswa didorong untuk mengemukakan pendapat dan kekhawatiran mereka mengenai isu-isu hak asasi manusia di sekolah mereka. Mengangkat dan mendorong diskusi mengenai hak asasi manusia di komunitas sekolah telah menghasilkan partisipasi yang lebih aktif dari guru, siswa, dan orang tua dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan hak asasi manusia

Cyberbullying adalah penggunaan internet dan teknologi terkait untuk menyakiti orang lain secara sengaja, berulang, dan penuh kebencian.



5. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Salah satu aspek penting dalam tata kelola sekolah mana pun adalah mengembangkan dan menerapkan mekanisme serta prosedur akuntabilitas guna memastikan bahwa sekolah tersebut mencapai tujuan dan targetnya. Sangatlah penting agar setiap upaya yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan pendekatan yang ramah hak asasi manusia menyertakan prosedur akuntabilitas, memastikan bahwa prosedur tersebut transparan dan adil, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pengembangan dan penerapannya.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana sekolah mempertanggungjawabkan penerapan konsep-konsep yang tercantum dalam 10 Prinsip Global HRFS?
- Seberapa transparan kebijakan dan praktik sekolah bagi seluruh anggotanya?
- Langkah-langkah apa yang dapat diambil sekolah untuk menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi seluruh komunitas sekolah?
- Prosedur apa saja yang tersedia untuk menangani keluhan atau pengaduan?
- Apakah warga sekolah dilibatkan dalam menangani keluhan atau pengaduan?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Selenggarakan forum sekolah atau pertemuan komunitas di mana warga sekolah diberi kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana kebijakan dan praktik sekolah dapat menjadi lebih akuntabel dan transparan.
- Bagikan kebijakan sekolah yang berlaku saat ini atau yang telah diperbarui kepada seluruh warga sekolah, misalnya melalui kampanye poster atau lomba.
- Berikan wewenang kepada OSIS, atau tim akuntabilitas, untuk melakukan audit rutin terhadap sekolah guna memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah disepakati di sekolah.
- Libatkan siswa atau warga sekolah lainnya dalam pengembangan dan/atau pelaksanaan prosedur disiplin.

© Amnesty International



Para siswa memperdebatkan misi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Sekolah Dr Ambedkar, Hungaria, 2012.

STUDI KASUS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

BENIN

Di Collège d'Enseignement Général de Pahou di Ouidah, sebuah badan perwakilan siswa dibentuk untuk memastikan bahwa siswa terwakili dalam rapat dewan sekolah. Sekolah tersebut juga meningkatkan frekuensi pertemuan antara pihak sekolah dan manajemennya, guna memastikan komunikasi yang baik serta keterlibatan yang lebih besar dari seluruh komunitas sekolah, terutama para siswa. Hasilnya, para siswa menjadi lebih paham mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan sekolah mereka dan memiliki suara yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah transparansi juga telah meningkat karena pihak administrasi sekolah menyebarluaskan dan menyediakan kebijakan sekolah kepada komunitas. Peningkatan transparansi terkait hak dan kewajiban telah meningkatkan akuntabilitas di sekolah. Siswa di Benin sudah mampu mengidentifikasi dan mempertanyakan sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh sekolah, serta bekerja sama dengan guru dan pihak lain untuk memastikan akuntabilitas dari semua warga. Selain itu, siswa telah diberdayakan untuk mengevaluasi kebijakan disiplin dan hukuman yang diberikan oleh guru, serta menuntut perubahan pada kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan tidak mendukung lingkungan yang ramah hak asasi manusia.

“

Peningkatan
transparansi
terkait hak dan
kewajiban telah
meningkatkan
akuntabilitas di
sekolah

”

GHANA

Untuk memastikan sistem tata kelola sekolah yang lebih transparan dan demokratis, Accra High School telah membentuk saluran komunikasi rutin antara seluruh siswa dengan pimpinan dan staf sekolah. Dewan Perwakilan Siswa (SRC) mewakili seluruh siswa dalam setiap rapat komite sekolah. SRC bertemu dengan seluruh siswa setiap hari Jumat untuk membahas gagasan yang disampaikan selama rapat sekolah, serta masalah-masalah lainnya. Dengan demikian, semua siswa mengetahui apa yang terjadi di sekolah, dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Pertemuan mingguan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertukar pendapat, mengajukan usulan baru, dan mengangkat masalah-masalah yang penting bagi mereka.



© Amnesty International



Peserta debat antar Sekolah HRFS saling mengucapkan selamat atas penampilan mereka, Ghana, 2012.

BIDANG UTAMA 2: HUBUNGAN

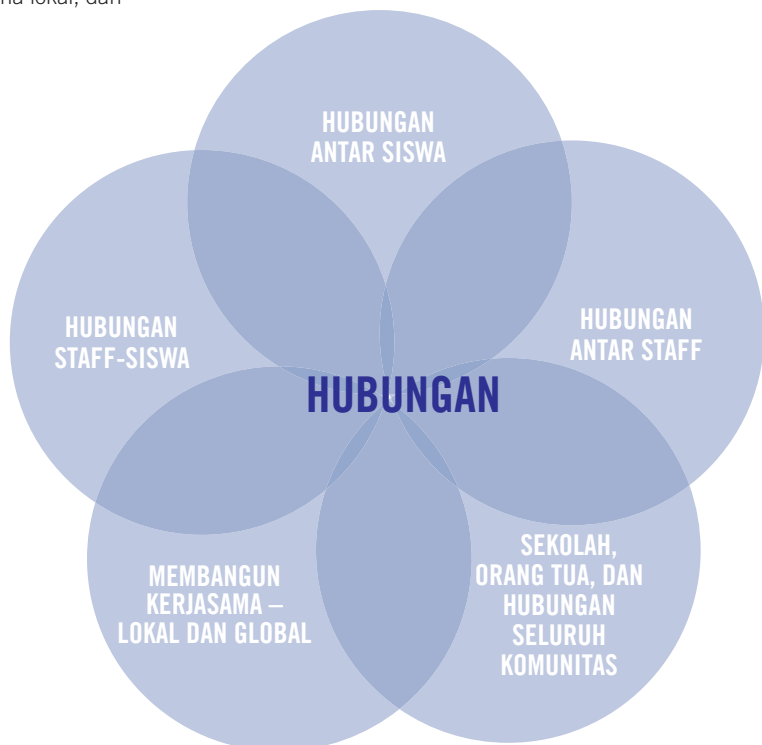
Mendukung hubungan yang ramah hak asasi manusia di antara warga sekolah

Salah satu tujuan utama Sekolah HRFS adalah menumbuhkan suasana kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, dan martabat di antara seluruh warga sekolah, termasuk pimpinan sekolah, guru, staf lainnya, siswa, serta pihak lain yang turut serta dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Tanpa saling menghormati, kepercayaan, dan pemahaman bersama mengenai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, semua upaya lain untuk menciptakan Sekolah yang ramah HAM tidak akan mencapai tujuannya.

Sekolah HRFS juga memupuk hubungan positif dengan warga sekolah yang melampaui batas-batas sekolah. Orang tua, pegawai negeri, otoritas pendidikan, usaha lokal, dan

organisasi masyarakat semuanya terhubung erat dengan sekolah, dan memiliki kepentingan dalam apa yang terjadi di sana. Interaksi dengan masyarakat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasi isu-isu dan kebutuhan hak asasi manusia di dalam masyarakat yang lebih luas serta bermitra dengan pihak lain untuk mengambil tindakan.

Tabel-tabel pada halaman-halaman berikut ini menguraikan bagaimana sekolah Anda dapat mengintegrasikan 10 Prinsip Global HRFS ke dalam elemen-elemen hubungan komunitas sekolah berikut: hubungan staf-siswa, hubungan siswa-siswa, hubungan staf-staf, hubungan sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas, serta membangun kemitraan – baik secara lokal maupun global.



1. HUBUNGAN STAF-SISWA

Hubungan yang baik antara staf dan siswa merupakan kunci untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran yang efektif di sekolah, serta memastikan agar seluruh warga sekolah merasa aman dan dihargai. Hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling memahami, sementara prosedur disiplin harus disusun bersama-sama dengan staf dan siswa serta diterapkan secara jelas dan transparan.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana interaksi antara guru dan siswa saat ini, dan apakah ada masalah atau tantangan yang perlu diatasi (misalnya kurangnya rasa hormat)?
- Apakah siswa dan staf bekerja sama untuk menyusun kebijakan disiplin, pedoman kelas, dan kode etik lainnya?
- Mekanisme apa saja yang tersedia untuk menangani konflik antara siswa dan staf?
- Bagaimana kebebasan berekspresi didorong, dan bagaimana kontribusi setiap individu dihargai?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Gunakan dewan sekolah sebagai wadah untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan hubungan antara staf dan siswa.
- Buatlah mekanisme untuk memediasi konflik antara staf dan siswa, seperti pedoman untuk menangani konflik secara konstruktif; libatkan kedua belah pihak dalam proses tersebut.
- Berikan pelatihan bagi guru dan siswa mengenai komunikasi dan mediasi konflik.
- Dorong terjalinnya hubungan yang positif antara staf dan siswa dengan menganjurkan penggunaan pujian serta pendekatan manajemen perilaku yang positif.

Guru dan murid dari Lycée Abi
Dar El Ghifari di Rabat,
Maroko, 2011.



© Amnesty International

STUDI KASUS HUBUNGAN STAF-SISWA

MONGOLIA

Di Sekolah Menengah Bersama Mongolia-India di Ulaanbaatar, hubungan antara guru dan siswa membaik berkat penyelenggaraan sesi brainstorming mengenai konsep hak dan tanggung jawab, perundungan, serta perubahan perilaku. Pertama, para guru bekerja sama dalam proses brainstorming untuk berbagi praktik baik terkait kebijakan hak dan tanggung jawab di kelas masing-masing. Selanjutnya, para guru memfasilitasi sesi brainstorming bersama siswa di kelas agar para siswa dapat bekerja sama mengatasi masalah bersama dan merumuskan solusi kolektif.

DENMARK

Di KonTiki Skolen di Hillerød, hubungan antara staf dan siswa sangat erat dan cukup santai. Para siswa memanggil guru-guru dengan nama depan mereka. Siswa-siswa disebut “anak-anak” atau “anak-anak kecil”, sedangkan orang dewasa disebut “orang dewasa” alih-alih “Tuan” atau “Nyonya”, sehingga mengurangi kesan superioritas atau hierarki di antara mereka.

BRITANIA RAYA

Di Villiers High School di London, para siswa dan staf bekerja sama di berbagai bidang untuk menumbuhkan budaya saling menghormati di lingkungan sekolah. Para siswa dan staf secara bersama-sama menandatangani ikrar sekolah yang menguraikan nilai-nilai bersama yang menjadi landasan Sekolah HRFS. Para siswa juga terlibat dalam kerja sama dengan tim kepemimpinan sekolah sebagai Penasihat Pembelajaran untuk mengamati pelajaran yang disampaikan guru dan memberikan umpan balik, yang telah membantu meningkatkan praktik pengajaran serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai cara mereka diajar. Sebagai hasil dari proses ini, siswa dan guru sering bekerja sama merencanakan kegiatan di kelas, dan guru-guru berkomentar betapa bermanfaatnya umpan balik siswa bagi perencanaan pelajaran mereka. Siswa dan staf juga bekerja sama merancang dan menyampaikan presentasi di Institute of Education di London mengenai perjalanan mereka menuju sekolah yang ramah hak asasi manusia.

“

Hubungan guru dan siswa meningkat sebagai dampak dari sesi tukar pikiran perihal konsep hak dan kewajiban

”



2. HUBUNGAN ANTAR SISWA

Interaksi antar siswa merupakan aspek penting dalam mewujudkan Sekolah HRFS. Sekolah harus memastikan bahwa semua siswa didorong untuk mempromosikan prinsip non-diskriminasi, saling memperlakukan dengan martabat dan rasa hormat, serta belajar menghargai keberagaman; dan bahwa setiap konflik, kekerasan, atau perundungan yang terjadi ditangani dengan cepat dan adil.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah terdapat interaksi yang bermakna antara siswa dari berbagai latar belakang di dalam dan di luar kelas?
- Apakah siswa laki-laki dan perempuan saling menghormati dan menjalin interaksi yang positif?
- Apakah konflik antar siswa ditangani secara efektif di sekolah?
- Dengan cara apa siswa diajarkan untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan martabat dan rasa hormat?
- Apakah siswa didukung untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain, misalnya melalui kerja kelompok di kelas atau kegiatan membangun kerja sama tim?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Pertimbangkan bagaimana badan dewan siswa dapat menengahi konflik antar siswa.
- Sediakan wadah bagi siswa (baik di dalam kelas maupun dalam seminar atau acara khusus) untuk menyuarakan pandangan dan kekhawatiran mereka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar siswa, seperti perundungan.
- Masukkan kegiatan interaktif dan pelatihan ke dalam pembelajaran di kelas yang secara langsung mendukung pengembangan keterampilan komunikasi, saling menghormati, dan tanggung jawab serta hak-hak siswa.
- Bentuk kelompok pendampingan sesama siswa atau kelompok dukungan di mana siswa dapat berbincang dengan siswa lain mengenai masalah yang mungkin mereka hadapi.

Para siswa di Missirah, Senegal, mengecam pelecehan seksual di sekolah melalui teater pendidikan hak asasi manusia, April 2011



© Amnesty International

STUDI KASUS HUBUNGAN ANTAR SISWA

MONGOLIA

Dengan dukungan dari para guru, siswa di Sekolah Menengah Gabungan Mongolia-India di Ulaanbaatar bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola konflik dan perselisihan, meningkatkan hubungan antar-siswa, serta saling memahami dan menerima satu sama lain. Konflik antar-siswa didiskusikan dan ditangani oleh siswa itu sendiri. Bersama-sama, para siswa telah membuat peraturan kelas untuk mendorong rasa saling menghormati. Pihak sekolah juga berencana untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada siswa dengan menyediakan pelatihan tentang mediasi konflik antar-siswa.

DENMARK

Di KonTiki Skolen di Hillerød, sistem pertemanan "Little Friends, Big Friends" (Teman Kecil, Teman Besar) di sekolah tersebut mendorong dukungan sebaya bagi siswa yang lebih muda oleh siswa yang lebih tua, serta mediasi sebaya ketika terjadi konflik antar-siswa.

BRITANIA RAYA

Villiers High School di London telah mengembangkan sistem mediasi sebaya yang kuat melalui dewan asrama (house councils) yang dijalankan oleh siswa dan dipilih secara demokratis untuk setiap kelompok angkatan. Siswa dari setiap kelompok angkatan menjadi anggota Juri Siswa (Student Juries), yang bertemu secara rutin untuk mendampingi siswa yang terlibat konflik dengan siswa lain melalui mekanisme panel disiplin antar-sebaya. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam dukungan sebaya serta mengembangkan rasa saling menghormati satu sama lain dan terhadap kebijakan sekolah secara keseluruhan yang bertujuan untuk menjadi lingkungan yang ramah hak asasi manusia.

“Sebuah sistem mediasi sebaya yang kuat dikembangkan melalui dewan asrama yang dipilih secara demokratis.”



3. Hubungan Antar Staf

Staf merupakan anggota kunci dalam sekolah yang ramah HAM, dan penting bagi semua anggota untuk merasa dihargai serta hak asasi manusia mereka dihormati setiap saat, terlepas dari apakah mereka adalah pimpinan sekolah, guru, staf administrasi, tukang kebun, atau petugas kebersihan sekolah. Dalam hal hubungan antar staf, sekolah dapat mempertimbangkan bagaimana menangani insiden perundungan di antara staf, bagaimana memastikan bahwa staf merasa terlibat dalam pengambilan keputusan secara bermakna, serta apakah semua anggota staf merasa dihormati secara setara dan dapat bekerja sama dengan baik.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah pimpinan sekolah memperlakukan anggota staf lainnya dengan hormat?
- Apakah tenaga pengajar, administrator sekolah, pimpinan sekolah, dan tenaga pendukung lainnya menjadi teladan dalam menjalin hubungan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menerapkannya dalam interaksi mereka dengan rekan kerja dan siswa?
- Apakah terdapat prosedur yang berlaku untuk menangani perundungan dan pelecehan di kalangan staf?
- Bagaimana konflik di antara anggota staf ditangani?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Lakukan survei kesejahteraan staf secara berkala kepada seluruh staf dan ambil tindakan terhadap setiap masalah yang terungkap dari hasil survei tersebut.
- Pastikan tersedia wadah di mana staf dapat mengemukakan masalah yang menjadi perhatian dan mendiskusikan cara-cara untuk mengatasinya, misalnya melalui rapat staf.
- Libatkan staf dalam pengambilan keputusan di sekolah dan pastikan ada pemahaman bahwa tanggung jawab ini dibagi bersama.
- Bekerja sama dengan staf untuk memastikan adanya kebijakan yang sesuai dalam menangani konflik dan perundungan di antara anggota staf



Anggota parlemen Israel bergabung dengan aktivis dari Amnesty International Israel untuk mendukung kampanye Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yerusalem, 2004

STUDI KASUS HUBUNGAN ANTAR STAFF

IRLANDIA

Seluruh staf dari Presentation Secondary School Warrenmount di Dublin mengikuti sesi latihan tentang keadilan restoratif di sebuah pusat pembelajaran masyarakat. Para peserta didorong untuk mengenali cara-cara alternatif dalam menangani konflik serta mendorong bentuk-bentuk disiplin yang lebih positif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Tiga anggota staf setuju untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif di sekolah dengan mengikuti pelatihan lanjutan, agar dapat mempromosikan model tersebut di seluruh komunitas sekolah. Staf merasa diberdayakan untuk mendiskusikan bersama visi mereka dalam mengembangkan hubungan positif di antara sesama staf dan dengan siswa, dan hari pelatihan tersebut menciptakan bahasa bersama tentang keadilan di seluruh sekolah yang dapat digunakan guru dalam praktik pengajaran sehari-hari mereka.

ISRAEL

Pusat Pendidikan Leo Baeck di Haifa berhasil mempererat hubungan antara staf dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempertemukan para guru dan staf sekolah lainnya di luar lingkup profesional mereka. Misalnya, melalui kelas memasak yang diadakan setelah jam sekolah, para staf memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dan membangun hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling pengertian. Kegiatan-kegiatan ini turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan positif.

“Mendorong bentuk-bentuk disiplin yang lebih positif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif”



4. SEKOLAH, ORANG TUA, DAN HUBUNGAN SELURUH KOMUNITAS

Sekolah yang ramah HAM menyadari bahwa sekolah tersebut merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas; sekolah ini secara aktif melibatkan berbagai warga dalam kehidupan sekolah, serta menawarkan layanan dan dukungan kepada komunitas yang lebih luas. Warga dapat mencakup orang tua, warga setempat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, kepolisian, media, lembaga komersial, organisasi non pemerintah, sekolah-sekolah lokal lainnya, dan—dalam beberapa kasus—pihak berwenang pemerintah. Sekolah yang membangun hubungan positif dengan komunitas yang lebih luas berdasarkan hak asasi manusia dapat membantu mengatasi masalah yang ada di komunitas tersebut. Hal ini dapat berarti meningkatkan pemahaman dan mengambil tindakan terhadap isu-isu hak asasi manusia yang memengaruhi kelompok minoritas tertentu yang tinggal di komunitas tersebut, atau mengambil tindakan terhadap isu hak asasi manusia yang memengaruhi semua orang. Sekolah yang menjadi ramah hak asasi manusia juga memiliki kesempatan untuk menyesuaikan proses yang ramah hak asasi manusia dengan kebutuhan komunitas dan berfungsi sebagai titik fokus atau sumber daya utama untuk mempromosikan hak asasi manusia secara lebih luas.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana orang tua dilibatkan dalam kehidupan sekolah?
- Bagaimana orang tua dan anggota masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam program Sekolah HRFS serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah?
- Bagaimana sekolah dapat menjalin hubungan yang bermakna, saling mendukung, dan timbal balik dengan masyarakat luas?
- Bagaimana proses sekolah terkait hubungan antara orang tua atau wali dan warga sekolah lainnya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi?
- Siapa saja anggota kunci komunitas yang perlu dilibatkan untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu hak asasi manusia di komunitas?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Undang orang tua dan anggota masyarakat ke pertemuan atau acara awal yang berfokus pada program Sekolah HRFS, dan ajak mereka untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan mengenai cara mereka dapat mendukung pelaksanaan inisiatif ini, serta bagaimana sekolah dapat mendukung peningkatan kualitas masyarakat.
- Buatlah buletin komunitas, atau edisi khusus dari buletin sekolah yang sudah ada, untuk memberi tahu orang tua dan anggota masyarakat lainnya tentang cara mereka dapat terlibat dalam Sekolah HRFS mereka.
- Pertimbangkan bagaimana sekolah saat ini berinteraksi dengan orang tua, identifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman di bidang ini, dan tentukan area mana yang perlu ditingkatkan sesuai dengan itu.
- Jika sekolah memiliki situs web, sediakan kesempatan secara daring bagi keterlibatan masyarakat dan masukan.
- Rencanakan apa yang ingin dicapai melalui keterlibatan dengan anggota masyarakat dan mintalah ide dari mereka mengenai cara terbaik untuk melibatkan mereka dalam kegiatan program.
- Lakukan brainstorming dengan tim manajemen program mengenai anggota masyarakat kunci yang akan diajak bekerja sama dan kemungkinan keterlibatan mereka dalam program.
- Tanyakan pendapat siswa dan staf sekolah – adakan diskusi bersama untuk membahas hal ini atau sediakan kotak saran di aula utama sekolah.
- Memulai program penjangkauan sekolah ke masyarakat, seperti program perbaikan masyarakat yang dipimpin oleh siswa.



STUDI KASUS MENINGTEGRASIKAN HUBUNGAN SEKOLAH, ORANG TUA, DAN SELURUH KOMUNITAS SEKOLAH

POLANDIA

Dengan bantuan Amnesty International Polandia, Sekolah Menengah Atas II dengan Kelas Inklusif C.K. Norwid di Tychy membentuk kelompok kerja Program Sekolah HRFS untuk mengimplementasikan program tersebut. Kelompok kerja tersebut terdiri dari seluruh warga sekolah – siswa, pengelola sekolah, guru, dan orang tua – dan membantu melaksanakan berbagai inisiatif di sekolah, seperti mendirikan dewan siswa, menerjemahkan Pedoman Human Rights Friendly School serta sumber daya program lainnya ke dalam bahasa Polandia, dan menyesuakannya dengan konteks lokal. Mereka juga mengadakan konferensi pers untuk meningkatkan kesadaran tentang program tersebut. Kelompok kerja tersebut kemudian menyelenggarakan beberapa acara di sekolah, termasuk konferensi Hari Pendidikan Nasional, pelatihan keselamatan bagi staf dan siswa, serta partisipasi dalam Pekan Aksi Pemuda Internasional. Bekerja sama dengan Amnesty International, sekolah juga menyelenggarakan sesi pelatihan bagi siswa, guru, dan orang tua yang turut berkontribusi dalam memperkuat hubungan di antara anggota kelompok-kelompok tersebut.

SENEGAL

Para siswa dari Lycée Technique André Peytavin di Saint-Louis menyelenggarakan berbagai kegiatan di lingkungan mereka untuk meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia dan melibatkan anggota masyarakat luas dalam program-program sekolah. Para siswa menyelenggarakan acara musik di jalan-jalan utama Saint-Louis, mengundang masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Sekolah HRFS dan kegiatan sekolah. Menjelang pemilihan umum nasional 2012, antara bulan Februari dan Maret, para siswa secara aktif berkontribusi dalam upaya mendorong kaum muda untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka menyelenggarakan aksi damai, serta konferensi tentang hak asasi manusia.

“

‘Sesi pelatihan untuk siswa, guru, dan orang tua juga berkontribusi untuk memperkuat hubungan

”



5. MEMBANGUN KERJASAMA – LOKAL DAN GLOBAL

Menjadi ramah hak asasi manusia merupakan tujuan jangka panjang bagi sebuah sekolah yang dapat diwujudkan dan dipertahankan melalui pembentukan kemitraan.

KERJASAMA DENGAN SEKOLAH LAIN

Sekolah HRFS menjalin kemitraan baru dengan sekolah-sekolah di lingkungan sekitarnya maupun di luar wilayah tersebut, tidak hanya untuk belajar dari pengalaman dan pelajaran yang dipetik oleh komunitas sekolah lain, tetapi juga untuk menginspirasi mereka dan melibatkan sekolah-sekolah lain dalam pengembangan budaya hak asasi manusia secara global.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana cara menjalin kemitraan dengan Sekolah HRFS lainnya di negara Anda?
- Bagaimana cara mengidentifikasi sekolah-sekolah utama yang dapat diajak bekerja sama?
- Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan program ini di sekolah-sekolah lain?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Pertimbangkan kerja sama yang sudah terjalin dengan sekolah-sekolah lain dan pikirkan cara untuk mengembangkannya.
- Ajukan pertanyaan ini kepada siswa dan staf: apakah Anda mengetahui sekolah lain yang dapat kita ajak bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan program ini?
- Selenggarakan Hari Terbuka dan undang sekolah-sekolah lain untuk mengetahui perjalanan sekolah ini dalam mewujudkan lingkungan yang ramah hak asasi manusia. Anda juga dapat mengundang panel ahli untuk membahas isu-isu hak asasi manusia..

STUDI KASUS KERJASAMA DENGAN SEKOLAH LAIN

MONGOLIA

Sekolah Menengah Bersama Mongolia-India di Ulaanbaatar telah mempromosikan program ini di kalangan guru sekolah menengah di daerah pedesaan. Melalui upaya peningkatan kesadaran akan program ini, mereka telah menjalin kemitraan dan mengidentifikasi dua sekolah menengah lainnya yang tertarik untuk ikut serta dalam program ini serta mendukung gerakan global menuju budaya hak asasi manusia.



KERJASAMA DENGAN ORGANISASI LOKAL DAN NASIONAL

Sekolah HRFS berkembang dan bertumbuh melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi lokal dan nasional, yang semuanya berupaya mewujudkan budaya hak asasi manusia secara global. Kemitraan lokal dapat diinisiasi melalui program dengan berbagai jenis entitas, misalnya organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, atau pemangku kepentingan lokal maupun nasional. Terdapat banyak organisasi aktif yang menangani berbagai isu yang mempengaruhi komunitas mereka. Organisasi yang mempromosikan non-diskriminasi, martabat, dan penghormatan dapat mencakup mereka yang memerangi kekerasan, membantu lansia, memberi makan tunawisma, melakukan lobi terkait isu kesehatan, atau mengkampanyekan isu lingkungan.

Sekolah HRFS dapat belajar dan memperoleh manfaat dari kemitraan dengan organisasi masyarakat dan nasional melalui pelatihan, undangan bagi para ahli untuk berbicara mengenai berbagai topik, serta dukungan dalam perencanaan dan manajemen program. Bekerja sama dengan organisasi mitra dapat menambah kedalaman dan kreativitas dalam pengembangan rencana aksi tahunan serta dapat menginspirasi anggota sekolah untuk berpartisipasi secara aktif dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi komunitas mereka yang lebih luas.

Mind Map (Peta Pikiran) adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan kata-kata, ide, tugas, atau berbagai hal lainnya yang saling terhubung dan diatur di sekitar sebuah kata kunci atau ide pokok. Mind Map (Peta Pikiran) bermanfaat untuk mengembangkan, memvisualisasikan, menyusun, dan mengelompokkan ide, sekaligus menjadi alat bantu dalam belajar, mengorganisir informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Organisasi-organisasi utama apa saja yang menangani isu-isu hak asasi manusia di tingkat lokal dan nasional?
- Bagaimana cara melibatkan organisasi-organisasi masyarakat dan nasional dalam program ini? Apa saja manfaat yang dapat diperoleh kedua belah pihak dari keterlibatan tersebut?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Dalam kelompok kerja program, buatlah peta pikiran yang berisi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang-bidang yang ingin dilibatkan oleh sekolah Anda. Perlihatkan peta pikiran tersebut kepada seluruh komunitas sekolah dan ajaklah siswa, staf, serta anggota masyarakat untuk memberikan masukan.
- Tentukan tujuan yang jelas dalam bekerja sama dengan organisasi lain. Tanyakan : apa yang ingin kita capai? Bagaimana cara mencapainya? Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut?

STUDI KASUS KERJASAMA DENGAN ORGANISASI LOKAL DAN NASIONAL

IRLANDIA

Castleknock Community College di Dublin menghidupkan kembali hubungan yang sebelumnya terjalin dengan sebuah asosiasi lansia setempat. Kini, sekelompok lansia menghadiri acara Hari Kakek-Nenek tahunan sekolah tersebut, meskipun mereka tidak memiliki cucu yang bersekolah di sana. Sebuah mata pelajaran tentang Menua dengan Positif (Positive Ageing) juga disediakan bagi para siswa, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan manfaat kegiatan antar generasi. Kemitraan ini mudah dikembangkan dan meningkatkan kesadaran akan non-diskriminasi, kesetaraan, dan rasa hormat dengan menyoroti manfaat menua dengan bermartabat.



KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat kehidupan sekolah serta didukung oleh dampak positif yang telah terbukti, Sekolah HRFS dapat menjadi model pendidikan yang teladan dan mampu menarik perhatian dinas pendidikan terhadap pentingnya pendidikan hak asasi manusia. Kemitraan dengan dinas pendidikan dapat mendorong integrasi pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum nasional serta penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Kemitraan dengan pihak berwenang dari pemerintah juga mungkin diperlukan, tergantung pada struktur sistem pendidikan formal nasional, serta bermanfaat untuk memastikan dukungan jangka panjang dan keberlanjutan proyek di lingkungan sekolah.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah ada kemitraan yang sudah terjalin dengan pihak otoritas pendidikan yang dapat dikembangkan lebih lanjut?
- Siapa saja pihak berwenang di pemerintahan daerah yang mungkin tertarik dengan program ini? Bagaimana cara melibatkan mereka?
- Bagaimana Sekolah HRFS Anda dapat dipromosikan sebagai model pendidikan yang mungkin menarik minat pihak otoritas pendidikan?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Ajaklah staf sekolah untuk berdiskusi dan susunlah daftar lembaga pendidikan terpilih di wilayah Anda, atau di tingkat nasional. Perlihatkan daftar tersebut kepada para siswa dan mintalah pendapat mereka mengenai cara berinteraksi dengan lembaga-lembaga tersebut.
- Undanglah pihak berwenang di bidang pendidikan untuk datang ke sekolah dan melihat upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah hak asasi manusia. Para pejabat tersebut dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, misalnya diskusi panel, hari-hari penyadaran, atau diskusi dalam upacara bendera mengenai hak asasi manusia.

STUDI KASUS KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

MAROKO

Amnesty International Maroko dan perwakilan dari Lycée Ibn Youssef memaparkan program Sekolah HRFS kepada Akademi Regional Kementerian Pendidikan di Marrakech, otoritas lokal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum sekolah nasional di tingkat regional. Direktur Akademi Regional terkesan dengan program tersebut dan mendorong sekolah untuk sepenuhnya melaksanakan rencana aksi programnya. Sebagai bentuk dukungan, staf otoritas pendidikan setempat sering menghadiri acara-acara Sekolah HRFS. Direktur Akademi Regional mendukung program Sekolah HRFS dan berkeinginan untuk memperluasnya ke sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut. Berkat hubungan baik antara Amnesty International Maroko dan otoritas pemerintah setempat, program Sekolah HRFS kini telah diterapkan di dua wilayah lain di negara tersebut dan didukung oleh otoritas setempat.



KERJASAMA GLOBAL

Sekolah HRFS merupakan bagian dari jaringan sekolah internasional yang berupaya menciptakan budaya hak asasi manusia secara global. Ini merupakan aspek penting dan inspiratif dari program ini, yang memungkinkan siswa, guru, dan anggota sekolah lainnya untuk belajar melalui kerja sama dan pertukaran pengalaman dengan sekolah-sekolah lain di lingkungan budaya, sosial, dan politik yang beragam. Kemitraan-kemitraan ini tidak saling bertentangan; justru saling memperkuat satu sama lain. Dengan menjalin kemitraan baru atau mengembangkan kemitraan yang sudah ada, Sekolah HRFS dapat menjadi kekuatan perubahan yang kuat dan berkelanjutan karena menghubungkan upaya berbagai pihak yang bekerja menuju budaya hak asasi manusia global.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana cara Anda mencari tahu dan menjalin komunikasi rutin dengan Sekolah HRFS lainnya di berbagai negara?
- Tantangan apa saja yang Anda hadapi yang dapat dibagikan dan diatasi bersama dengan sekolah lain yang juga menjalankan program ini?
- Bagaimana cara Anda memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa melalui kerja sama dengan Sekolah HRFS lain di negara yang berbeda?
- Bagaimana cara Anda melibatkan berbagai warga sekolah dalam kemitraan dengan sekolah lain?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Bangun kemitraan (atau kerja sama) dengan Sekolah HRFS lain di negara yang berbeda. Bekerja sama untuk melaksanakan program serta berbagi rencana dan pengalaman belajar.
- Kembangkan program kurikulum bersama dengan sekolah lain yang menantang para siswa untuk bekerja sama dalam menangani suatu masalah bersama.
- Kembangkan inisiatif pelatihan guru bersama staf dari dua sekolah, untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan program di konteks yang berbeda.
- Menyelenggarakan konferensi siswa internasional dan mengundang siswa serta guru dari Sekolah HRFS dari negara yang berbeda untuk hadir. Karena perjalanan internasional sangat mahal dan tidak memungkinkan bagi semua sekolah peserta, konferensi daring dan kerja sama antar sekolah melalui media cetak dan digital merupakan cara alternatif untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan pemahaman antarbudaya.

STUDI KASUS KERJASAMA GLOBAL

BRITANIA RAYA, DENMARK, ISRAEL, MONGOLIA

Sekolah Menengah Villiers di London mengundang sekolah-sekolah ramah hak asasi manusia lainnya dari seluruh dunia untuk menghadiri Konferensi Siswa Internasional tahunannya. Tema konferensi tahun 2009 adalah hak asasi manusia, dan delegasi siswa serta guru dari Denmark, Israel, dan Mongolia turut hadir. Konferensi ini memberikan kesempatan bagi pertukaran budaya yang kaya di antara para siswa seputar tema hak asasi manusia, serta memungkinkan para siswa untuk bekerja sama membahas pendekatan berbeda mereka dalam mewujudkan sekolah yang ramah hak asasi manusia di negara masing-masing.



BIDANG UTAMA 3: KURIKULUM DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM KURIKULUM, KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN PRAKTIK PENGAJARAN

Sekolah Human Rights Friendly School berupaya mendukung terwujudnya hak atas pendidikan bagi seluruh siswa dengan mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia tidak hanya berarti siswa mempelajari standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berarti bahwa guru mengajar dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, yaitu dengan cara yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini mencakup pengembangan pedagogi partisipatif yang melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran aktif.

Sudah menjadi hal yang umum bahwa kurikulum di beberapa sekolah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sekolah memiliki kendali atau keleluasaan yang terbatas terhadap materi yang diajarkan. Sekolah lain juga mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk memasukkan pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum formal. Oleh karena itu, penting untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari serta mengambil tindakan dalam mendukung hak asasi manusia melalui klub dan kegiatan ekstrakurikuler.

Tabel dalam bagian ini menjelaskan bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan 10 Prinsip Global untuk Sekolah HRFS ke dalam unsur-unsur kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, yang mencakup kebijakan dan isi kurikulum, metodologi pengajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler.



1. KEBIJAKAN DAN ISI KURIKULUM

Sekolah yang ramah hak asasi manusia perlu menentukan cara terbaik bagi staf dan siswa untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum. Sekolah dapat memperkenalkan hak asasi manusia sebagai mata pelajaran tersendiri atau sebagai bagian dari mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial, atau Hukum.

Selain itu, sekolah juga dapat mengintegrasikan tema, isu, perspektif, dan pendekatan hak asasi manusia secara luas ke dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada, seperti Sejarah, Ekonomi, Geografi, Filsafat, Sastra, Bahasa, Seni, dan Drama (lihat halaman 52–53 untuk strategi yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah).

Sekolah memiliki tingkat otonomi yang bervariasi dalam mengembangkan kurikulum dan mungkin perlu berkonsultasi dengan otoritas pendidikan di berbagai tingkat. Tidak semua sekolah dapat memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian dari kurikulum formal. Dalam hal ini, sekolah perlu berupaya menyediakan klub dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai alternatif.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah siswa saat ini sudah mendapatkan pembelajaran tentang hak asasi manusia? Jika ya, melalui mata pelajaran apa saja?
- Dari berbagai opsi untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah yang disajikan pada halaman 52–53, manakah yang paling sesuai untuk sekolah?
- Apakah para guru telah memahami konsep dan prinsip hak asasi manusia? Dukungan apa yang dibutuhkan agar mereka lebih percaya diri dalam mengajarkannya?
- Bagaimana siswa dapat didorong untuk mengambil tindakan terkait isu-isu hak asasi manusia yang sudah dipelajari?

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

- Merancang strategi yang realistis untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum, dengan mempertimbangkan kebutuhan, keterbatasan, dan peluang yang dimiliki sekolah.
- Menyediakan pelatihan bagi guru serta peluang pengembangan profesional untuk mendukung pemahaman mereka tentang hak asasi manusia, sekaligus memperkuat kapasitas dalam mengajarkan dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.
- Bekerja sama dengan kantor Amnesty International setempat dan organisasi hak asasi manusia lainnya untuk mengakses sumber daya pembelajaran serta peluang pelatihan.
- Mendorong para guru yang berminat untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan serta ide terkait pengajaran hak asasi manusia. Kelompok ini dapat memberikan masukan kepada dewan kurikulum atau pimpinan sekolah, yang selanjutnya dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian berdasarkan masukan tersebut.
- Merujuk pada Panduan Human Rights Friendly School sebagai sumber pendidikan HAM dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.

STRATEGI UNTUK MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM KURIKULUM

1 Mengintegrasikan hak asasi manusia sebagai mata pelajaran tersendiri

Hak asasi manusia dapat ditawarkan sebagai mata pelajaran pilihan yang berdiri sendiri. Keuntungan dari pendekatan ini adalah mata pelajaran tersebut dapat menarik minat siswa yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap hak asasi manusia serta memungkinkan mereka mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang tersebut. Hak asasi manusia juga dapat dikembangkan sebagai mata pelajaran interdisipliner yang menarik bagi siswa sekolah menengah, dengan menggabungkan unsur-unsur Hukum, Hubungan Internasional, Filsafat, Sejarah, Politik, dan Antropologi.

Namun, tidak semua sekolah memiliki keleluasaan dan kapasitas untuk menerapkan pendekatan ini pada tahun pertama pelaksanaan program. Dalam hal ini, mata pelajaran hak asasi manusia yang berdiri sendiri dapat dijadikan sebagai tujuan jangka panjang.

2 Mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran yang sudah ada

Metode ini melibatkan pengintegrasian tema, isu, perspektif, dan pendekatan hak asasi manusia ke dalam sejumlah mata pelajaran dan/atau unit pembelajaran yang sudah ada. Sekolah yang menerapkan pendekatan ini umumnya berfokus pada integrasi hak asasi manusia dalam mata pelajaran ilmu sosial, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Ekonomi, Geografi, Filsafat, Pendidikan Agama, Demokrasi, dan/atau Etika. Pendekatan yang digunakan dapat berupa eksplorasi mata pelajaran yang sudah ada melalui perspektif hak asasi manusia, misalnya dengan menggunakan contoh-contoh berbasis isu atau konsep hak asasi manusia. Di samping itu, sekolah juga dapat mengintegrasikan topik-topik tertentu terkait hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran Sejarah, sekolah dapat mengintegrasikan pembahasan mengenai genosida, lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum internasional, perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil, serta kekerasan berbasis gender.

Salah satu keuntungan utama dari mengintegrasikan topik-topik hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran wajib adalah bahwa siswa akan terpapar pada isu-isu hak asasi manusia, sehingga melatih kepekaan mereka dalam mempertimbangkan berbagai situasi dan topik dari perspektif hak asasi manusia. Salah satu potensi kelemahan dari metode ini adalah hak asasi manusia mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai jika para guru tidak terlibat secara aktif dalam prosesnya dan pemahaman yang diperoleh pun mungkin tidak akan mendalam atau berkelanjutan.

STUDI KASUS MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM KURIKULUM

SEBAGAI MATA PELAJARAN TERSENDIRI: ITALIA

Anggota komunitas sekolah di Liceo Norberto Rosa di Susa menyortir isu pengungsi internasional melalui dua kegiatan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Sekolah tersebut mengundang calon aktivis dari Amnesty International Italia untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pengungsi politik dan diskriminasi terhadap imigran. Seorang siswa asal Afghanistan di sekolah tersebut juga berbagi kisah perjalanannya sebagai pengungsi dari Afghanistan ke Italia. Sekolah juga menyelenggarakan sesi presentasi oleh penulis Italia, Fabio Geda, penulis buku tentang pengungsi berjudul *In the Sea There are Crocodiles*, yang membacakan kutipan dari karyanya serta menjawab pertanyaan dari para siswa.

KE DALAM MATA PELAJARAN YANG SUDAH ADA: MAROKO

Kurikulum di Lycée Ibn Youssef di Marrakech didasarkan pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah ini berhasil mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam beberapa mata pelajaran, termasuk Bahasa Arab, Sastra, Ilmu Sosial, dan Geografi. Para guru mengikuti pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Amnesty International Maroko untuk mempelajari cara mengintegrasikan serta membahas berbagai isu hak asasi manusia dalam mata pelajaran. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri para guru, sehingga mereka lebih terdorong untuk memperkenalkan isu-isu hak asasi manusia di kelas. Selain itu, metode maupun proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan interaktif. Alhasil, siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar.



3 Mengintegrasikan hak asasi manusia secara luas ke dalam kurikulum sekolah

Pendekatan ketiga adalah mengintegrasikan tema, isu, perspektif, dan pendekatan hak asasi manusia secara lebih luas ke seluruh kurikulum. Selain mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial, integrasi ini juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain, seperti Sastra, Bahasa, Seni, dan Drama. Hak asasi manusia juga dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti Matematika, misalnya melalui analisis statistik terkait isu hak asasi manusia, atau Ilmu Komputer, seperti pembahasan mengenai kontrol dan sensor internet serta penggunaan program dan perangkat lunak yang berkaitan dengan upaya menghindari sensor. Bahkan, mata pelajaran seperti Musik

dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsep harmoni dan disonansi dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Kegiatan seperti membaca karya sastra, pementasan drama, serta penciptaan musik dan seni visual dengan tema hak asasi manusia telah terbukti efektif di Sekolah HRFS.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan pendekatan ini secara sistematis, terutama dalam hal kebutuhan pelatihan dan dukungan, serta ketergantungannya yang tinggi pada antusiasme guru. Pendekatan ini pernah diterapkan dan cukup berhasil di beberapa sekolah dasar yang perbedaan antara mata pelajarannya cukup samar. Maka dari itu, penting untuk mendorong kreativitas di kalangan staf guru dan siswa guna memperkuat integrasi tema hak asasi manusia secara luas di seluruh kurikulum.

STUDI KASUS MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM KURIKULUM

LINTAS KURIKULUM: MONGOLIA

Sekolah Menengah Bersama Mongolia-India mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam tiga departemen akademiknya. Dengan dukungan Amnesty International Mongolia, sekolah tersebut menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk memperkuat pengajaran hak asasi manusia sekaligus mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Para guru bekerja dalam departemen akademik masing-masing untuk mengembangkan rencana pembelajaran baru yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Hasilnya, sebanyak 46 rencana pembelajaran baru berhasil dikembangkan untuk digunakan di sekolah, mencakup berbagai mata pelajaran seperti Matematika, Kimia, Sejarah, Sastra Mongolia, dan Bahasa Inggris. Melalui upaya tersebut, sekolah berhasil mendorong pemerintah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Amnesty International Mongolia dan organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan guna meninjau kurikulum pendidikan menengah nasional. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum nasional serta memperkuat kapasitas guru baru dalam menyampaikan pendidikan hak asasi manusia.

LINTAS KURIKULUM: POLANDIA

Sekolah Menengah Atas II dengan Kelas Integrasi C.K. Norwid di Tichy mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam seluruh kurikulum melalui koordinasi Departemen Kewarganegaraan. Departemen ini meninjau seluruh rencana pembelajaran untuk mengidentifikasi peluang integrasi hak asasi manusia ke dalam kurikulum, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dari berbagai kelompok usia. Proses ini juga melibatkan perwakilan siswa serta didukung oleh pakar eksternal dalam pengembangan rencana pembelajaran. Rencana tersebut tidak hanya mengintegrasikan konten hak asasi manusia, tetapi juga menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam berbagai mata pelajaran..



2. METODOLOGI PENGAJARAN

Perubahan signifikan dalam praktik pengajaran telah menyertai berkembangnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam proses belajar mengajar di kelas. Metode pengajaran tradisional di banyak negara umumnya berpusat pada guru melalui pendekatan ceramah atau guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan memimpin kelas dari depan. Dalam kelas yang ramah hak asasi manusia, pendekatan ini berkembang dengan mengakui bahwa setiap individu di dalam kelas memiliki pengetahuan dan pengalaman penting. Oleh karena itu, setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran. Seluruh siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif, dan suasana kelas dibangun secara inklusif dan demokratis. Guru tetap merupakan figur otoritas dominan yang penting dan dihormati, dengan peran utama sebagai fasilitator proses pembelajaran. Dalam peran tersebut, guru juga menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman peserta didik serta mendorong kontribusi mereka demi memperkaya proses belajar bersama.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah guru saat ini mengajar dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, misalnya melalui penerapan metodologi partisipatif?
- Apakah konsep kelas yang demokratis sudah terwujud, atau pembelajaran masih didominasi oleh aliran pengetahuan satu arah dari guru kepada siswa?
- Sejauh mana suara siswa diakomodasi dalam proses pembelajaran? Dalam aspek apa suara tersebut memengaruhi kewenangan guru dan pimpinan sekolah?
- Apakah materi pembelajaran dan penugasan telah dirancang agar dapat diakses oleh seluruh siswa, terlepas dari perbedaan kemampuan maupun kebutuhan khusus?
- Apakah siswa dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait apa yang diajarkan dan bagaimana cara penyampaian?

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

- Menyediakan pelatihan bagi guru serta peluang pengembangan profesional, mendorong diskusi mengenai metodologi pengajaran ramah hak asasi manusia atau partisipatif, sekaligus memfasilitasi pertukaran ide dan strategi.
- Mengidentifikasi sumber daya pelatihan dan peluang pengembangan profesional yang dapat memperkaya pengalaman guru dalam mengajarkan hak asasi manusia secara partisipatif.
- Bekerja sama dengan kantor Amnesty International setempat untuk mengakses peluang pelatihan bagi guru terkait metodologi partisipatif di kelas.
- Memastikan penggunaan materi visual dan audio yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas.
- Mendorong guru untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai proses pembelajaran, termasuk sejauh mana pembelajaran telah mencerminkan pendekatan ramah hak asasi manusia.
- Memanfaatkan sesi diskusi singkat di akhir kelas atau menyediakan kotak saran sebagai sarana efektif untuk mendorong umpan balik.
- Mendukung guru untuk melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait apa yang dipelajari dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung.
- Mendorong dan mendukung guru untuk melakukan “audit hak asasi manusia terhadap kurikulum” guna membantu mereka mengevaluasi praktik pengajaran dari perspektif ramah hak asasi manusia



STUDI KASUS METODOLOGI PENGAJARAN

MOLDOVA

Sekolah Menengah Atas Ion Creangă di Chişinău menyelenggarakan tiga sesi pelatihan bagi guru di dua sekolah dengan tema “Pengantar Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Hak Asasi Manusia”, yang diikuti oleh 49 guru. Pelatihan ini mencakup penerapan metodologi partisipatif dalam pendidikan hak asasi manusia. Sekolah tersebut juga menyelenggarakan lomba bertajuk “Guru Paling Ramah Hak Asasi Manusia”, yang terinspirasi dari inisiatif serupa di Sekolah HRFS di Mongolia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para guru mengembangkan keterampilan dalam mengajarkan materi serta menerapkan metodologi hak asasi manusia, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan komunitas sekolah dalam mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia..

DENMARK

Di KonTiki Skolen di Hillerød, para guru didorong untuk merefleksikan sikap serta relasi kuasa yang mereka miliki, sekaligus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dalam pendekatan pengajaran. Mereka juga diajak untuk menekankan dan mempraktikkan nilai-nilai seperti rasa hormat, kesetaraan, penerimaan, dan inklusi dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menuntut perubahan cara berpikir. Para guru perlu meninjau kembali bagaimana mereka menjalankan peran sebagai pendidik serta mengembangkan sikap reflektif dan kritis terhadap praktik mereka sendiri. Membangun kepercayaan terhadap siswa juga penting dilakukan, seiring dengan meningkatnya ruang bagi siswa untuk berperan dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Hasilnya, guru merasakan peningkatan rasa hormat dari siswa, sekaligus mengalami penguatan peran dan perkembangan profesional sebagai pendidik.

MONGOLIA

Sekolah Menengah Bersama Mongolia-India di Ulaanbaatar memanfaatkan kompetisi bertema hak asasi manusia sebagai strategi untuk mendorong kolaborasi antarguru sekaligus meningkatkan praktik pengajaran yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah penyelenggaraan lomba bertajuk “Kelas Percontohan”, yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan konsep serta isu-isu hak asasi manusia ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dalam kurikulum.

“Guru perlu merefleksikan sikap serta relasi kuasa mereka”



3. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang berada di luar komponen wajib dalam jadwal kurikulum sekolah atau berlangsung di luar ruang kelas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah jam sekolah, pada waktu istirahat makan siang, maupun pada akhir pekan. Kegiatan ekstrakurikuler umumnya bersifat sukarela dan dapat diselenggarakan serta dipimpin oleh siswa, guru, atau komunitas sekolah yang lebih luas. Beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler disajikan dalam tabel di bawah ini dan pada halaman 57, namun pilihan yang tersedia sangat beragam. Daripada berupaya mengadopsi seluruh ide yang disajikan, sekolah disarankan untuk merancang strategi yang realistis dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kegiatan yang relevan dengan konteks sekolah serta mampu menarik minat siswa, guru, dan komunitas sekolah secara lebih luas.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang ada dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia?
- Apakah seluruh siswa, tanpa memandang kemampuan maupun kebutuhan khusus, didorong dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sebelum maupun sesudah sekolah?
- Apakah siswa dan guru memiliki kebebasan untuk mendirikan klub atau kegiatan mereka sendiri?
- Apakah ada media sekolah yang dikelola oleh siswa, seperti surat kabar atau stasiun radio?
- Apakah keselamatan siswa dan pendidik yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler menjadi prioritas utama sekolah? Misalnya, bagaimana pengaturan kepulangan siswa yang mengikuti kegiatan setelah jam sekolah?
- Bagaimana rasio pendampingan antara siswa dan guru dalam setiap kegiatan? Apakah orang tua dapat terlibat atau mengawasi kegiatan ekstrakurikuler?
- Apakah komunitas sekolah yang lebih luas didorong untuk memanfaatkan fasilitas sekolah, seperti gedung olahraga?
- Bagaimana kemitraan dengan Amnesty International atau organisasi berbasis masyarakat lainnya dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berbasis hak asasi manusia?

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

- Meninjau kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada untuk mengidentifikasi peluang integrasi nilai dan isu hak asasi manusia. Misalnya, klub debat dapat mengangkat isu hak asasi manusia sebagai topik debat, sementara klub seni dapat mengeksplorasi cara visual untuk menggambarkan dampak pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia.
- Mengadakan sesi curah pendapat (brainstorming) kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan seluruh komunitas sekolah.
- Mendorong siswa untuk mengajukan ide kegiatan atau acara bertema hak asasi manusia. Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan gagasan, kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih satu inisiatif baru setiap semester atau tahun ajaran.
- Bekerja sama dengan kantor Amnesty International setempat untuk menghadirkan sesi interaktif, presentasi, atau pelatihan terkait isu-isu hak asasi manusia dari berbagai konteks global.
- Melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, karena keterlibatan mereka dapat memperkuat dampak dan keberlanjutan program.



CONTOH

AKTIVITAS EKSTRAKURIKULER

- Pertunjukan teater, musik, dan tari yang mengangkat tema hak asasi manusia.
- Lomba yang berkaitan dengan konsep atau isu hak asasi manusia.
- Peringatan atau kegiatan lain dalam rangka hari-hari internasional atau nasional yang relevan dengan hak asasi manusia (misalnya Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember atau Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret).
- Kampanye atau klub yang berfokus pada pencegahan perundungan, pelecehan, atau kekerasan di sekolah maupun di masyarakat.
- Kegiatan penggalangan dana untuk mendukung isu hak asasi manusia, lingkungan, atau perbaikan lingkungan sekolah.
- Kegiatan atau klub yang berfokus pada perdagangan adil atau isu lingkungan (misalnya program sekolah hijau).
- Kunjungan edukatif ke pameran bertema hak asasi manusia.
- Pemutaran film bertema hak asasi manusia yang dilanjutkan dengan diskusi reflektif.
- Seminar atau konferensi yang membahas isu-isu hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Program layanan sukarelawan yang berfokus pada hak asasi manusia bagi masyarakat luas.
- Program pelatihan bagi siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua dalam bidang kampanye dan advokasi isu hak asasi manusia.
- Program “Pasal Bulanan” (atau “Pasal Mingguan”) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): komunitas sekolah diajak untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong penerapan prinsip tersebut dalam lingkungan sekolah.
- Dengan dukungan kantor Amnesty International setempat, sekolah dapat memperkenalkan satu individu rentan setiap bulan dan mendorong siswa untuk mengadvokasi kasus tersebut dengan cara yang kreatif, misalnya melalui pameran foto tentang individu tersebut dan karyanya, kampanye penulisan surat, atau penyelenggaraan hari khusus untuk meningkatkan kesadaran.

**Anggota sebuah klub hak asasi manusia
menampilkan sebuah drama tentang
pernikahan paksa, Senegal, 2012**



© Amnesty International



Sekolah HRFS di Sekolah Menengah Accra, Ghana, 2011

BIDANG UTAMA 4: LINGKUNGAN SEKOLAH

MENDUKUNG LINGKUNGAN BELAJAR DAN MENGAJAR RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Sekolah HRFS tidak hanya mendorong guru untuk mengajar dan siswa untuk belajar tentang hak asasi manusia, tetapi juga menyadari bahwa upaya tersebut akan lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan yang menerapkan dan menjalankan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ruang kelas perlu menjadi ruang yang menghormati hak setiap individu. Sama halnya dengan

dinamika di luar ruang kelas yang memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar. Mengajarkan hak asasi manusia kepada generasi muda tidak akan optimal jika prinsip dan nilai-nilai tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah, termasuk di ruang kelas, koridor, kantin, dan area bermain.

Tabel dalam bagian ini menguraikan bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan 10 Prinsip Global untuk Human Rights Friendly School ke dalam berbagai elemen lingkungan sekolah, yaitu ruang kelas ramah hak asasi manusia, lingkungan fisik sekolah, serta lingkungan sekolah yang lebih luas.



1. RUANG KELAS RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Siswa menghabiskan sebagian besar waktu belajar mereka di ruang kelas, maka penting untuk memastikan bahwa ruang kelas menjadi lingkungan yang ramah dan positif sehingga siswa merasa aman dan dapat belajar secara efektif. Mewujudkan ruang kelas yang ramah hak asasi manusia mencakup upaya memastikan bahwa kondisi fisik ruang kelas memungkinkan seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, perlu dibangun suasana yang menjunjung kesetaraan, non-diskriminasi, inklusivitas, rasa hormat, dan martabat, sehingga setiap siswa didukung untuk berkembang secara optimal. Siswa juga perlu diberi kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan dan tanggung jawab di dalam kelas. Pada saat yang sama, siswa dan guru diharapkan dapat bekerja sama serta menjadi teladan dalam menerapkan partisipasi demokratis, yang kemudian tercermin dalam lingkungan sekolah secara lebih luas.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah tersedia meja dan perlengkapan kelas yang memadai sehingga seluruh siswa merasa nyaman dan dapat belajar secara efektif?
- Apakah terdapat pajangan di kelas yang menarik, yang menampilkan prestasi siswa serta mendorong pembelajaran mandiri?
- Apakah bahasa ibu siswa tercermin dalam lingkungan kelas, misalnya melalui poster dan papan informasi?
- Apakah terdapat aturan perilaku kelas yang jelas, yang disusun bersama oleh siswa dan guru?

AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN

- Melakukan penilaian untuk memahami sejauh mana siswa merasa aman dan nyaman di dalam kelas, dan mengajak siswa untuk memberikan ide tentang cara menciptakan ruang kelas yang lebih ramah hak asasi manusia.
- Mendorong seluruh siswa untuk bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan ruang kelas melalui pembagian peran dan sistem bergilir.
- Mengajak setiap kelas untuk menyusun kode etik kelas bersama-sama dan menampilkannya di ruang kelas.
- Memastikan bahwa poster dan pajangan di kelas mempromosikan nilai kesetaraan dan non-diskriminasi, misalnya dengan memastikan keterwakilan perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas.

■ Melibatkan siswa dalam mendesain label dan papan...

© Amnesty International



“Kelas diadakan di luar ruangan karena sekolah tidak memiliki ruang yang cukup besar untuk menampung seluruh siswa di dalam kelas.” Foto dari pameran “Melalui Mata Kami Sendiri: Masyarakat Adat Paraguay”, karya Javier Florentin, Paraguay, 2010.

STUDI KASUS KELAS RAMAH HAK ASASI MANUSIA

ISRAEL

Di Pusat Pendidikan Leo Baeck, siswa dan guru bersama-sama mengembangkan dua kelas bertema hak asasi manusia. Satu kelas berfokus pada hak atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi, sementara kelas lainnya mengangkat isu perbudakan modern. Sekolah juga menampilkan pameran dari Amnesty International Israel berjudul “We Were All Born Free”, yang memuat poster-poster tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, kutipan-kutipan tentang hak asasi manusia dipajang di ruang kelas dan lorong-lorong sekolah.

DENMARK

Di banyak ruang kelas di KonTiki Skolen, meja siswa ditata membentuk huruf U mengelilingi ruangan dan menghadap ke bagian tengah. Dalam formasi itu tersedia area duduk tambahan menghadap ke tengah yang dapat digunakan siswa selama pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Di ruang kelas lainnya, meja ditata dengan gaya kabaret (meja bundar dengan lima atau enam kursi di sekelilingnya). Berbeda dengan tata letak kelas tradisional yang berpusat pada guru, pengaturan ruang yang lebih santai dan non-hierarkis ini mendorong partisipasi aktif siswa serta dialog antarsiswa.

“
Suasana kelas yang lebih santai mendorong partisipasi aktif dan dialog antar siswa
”



2. LINGKUNGAN FISIK SEKOLAH

Sekolah HRFS perlu memastikan bahwa lingkungan fisik sekolah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Sekolah dapat memulainya dengan meningkatkan kualitas area-area umum utama, seperti lapangan bermain, kantin, kantor, koridor, gedung olahraga atau aula, ruang kelas, dan perpustakaan, agar lebih inklusif dan ramah hak asasi manusia. Misalnya dengan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh area sekolah, menyediakan lapangan bermain yang aman dan ramah, menjamin ketersediaan air minum bersih, serta menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, bersih, dan aman digunakan oleh seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan.

Mungkin terdapat tantangan yang tidak dapat diatasi sekolah dalam jangka pendek, seperti keterbatasan fasilitas, peralatan, atau sumber daya. Namun demikian, penting bagi seluruh komunitas sekolah untuk terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan, menetapkan tujuan, serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah seluruh anggota komunitas sekolah merasa aman dan terlindungi di lingkungan sekolah, tanpa memandang peran, jenis kelamin, atau status lainnya? Apakah terdapat area tertentu di sekolah yang menimbulkan rasa kurang aman? Langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasinya?
- Apakah identitas sekolah sebagai Sekolah HRFS tercermin dalam lingkungan dan penampilan fisik sekolah?
- Apakah area seperti koridor, lapangan bermain, toilet, kantin, kantor, serta ruang olahraga atau aula pertemuan mencerminkan lingkungan yang ramah hak asasi manusia?
- Apakah siswa dan staf memiliki akses terhadap air minum yang bersih?
- Apakah fasilitas sekolah dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas?

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

- Menyelenggarakan forum yang melibatkan seluruh komunitas sekolah untuk membahas kondisi lingkungan sekolah. Melalui forum ini, setiap anggota komunitas memiliki kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran serta memberikan masukan tentang cara menjadikan lingkungan sekolah lebih ramah hak asasi manusia.
- Mendorong dewan sekolah atau komite lingkungan untuk menginisiasi kampanye peningkatan kesadaran hak asasi manusia di seluruh komunitas sekolah, berdasarkan kesepakatan forum atau survei. Kegiatan ini juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan fisik sekolah.
- Mengadakan lomba kesenian atau aktivitas kreatif bagi seluruh kelas untuk mendesain poster, kolase, atau karya visual lain yang meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, kemudian memamerkan hasil karya tersebut di berbagai area sekolah.
- Menyusun daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih ramah hak asasi manusia.



STUDI KASUS LINGKUNGAN FISIK SEKOLAH

MAROKO

Di Marrakech, Lycée Ibn Youssef membangun identitas visual yang kuat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dengan menamai setiap gedung di sekolah berdasarkan prinsip atau nilai hak asasi manusia. Nama-nama yang disematkan untuk gedung di sekolah ini antara lain, Gedung Tata Kelola yang Baik, Gedung Martabat, dan Gedung Kesetaraan Kesempatan. Anggota komunitas sekolah mengecat nama-nama tersebut dengan warna hitam pada latar belakang kuning, sehingga menciptakan asosiasi visual dengan identitas global Amnesty International. Upaya ini sekaligus memperkuat kesadaran akan kerja sama sekolah dengan Amnesty International dalam mewujudkan lingkungan yang ramah hak asasi manusia. Seluruh kegiatan ini direncanakan secara kolaboratif oleh guru, siswa, pimpinan sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan dukungan Amnesty International Maroko.

GHANA

Di Sekolah Menengah Atas Accra, siswa dan guru bekerja sama untuk menjadikan lingkungan sekolah lebih ramah hak asasi manusia dengan membangun sebuah Taman Hak Asasi Manusia di halaman sekolah. Taman ini berfungsi sebagai ruang berkumpul yang damai dan positif bagi seluruh anggota komunitas sekolah, sekaligus menjadi tempat untuk berinteraksi dan bersantai. Area ini juga dilengkapi dengan papan pengumuman komunitas yang digunakan untuk menampilkan ide-ide dalam mempromosikan hak asasi manusia serta mendorong partisipasi aktif. Keberadaan taman ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan fisik sekolah, sekaligus menyediakan ruang dialog di mana isu-isu hak asasi manusia dan topik lainnya dapat didiskusikan secara terbuka.

“Taman Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai ruang berkumpul yang damai dan positif bagi seluruh warga sekolah”



3. LINGKUNGAN SEKOLAH YANG LEBIH LUAS

Lingkungan sekolah yang lebih luas merujuk pada suasana keseluruhan dalam komunitas sekolah. Sekolah HRFS mendorong terciptanya lingkungan dimana kesehatan fisik dan mental seluruh anggota komunitas dihormati, serta nilai-nilai kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, saling menghormati, dan martabat dijunjung tinggi sebagai prinsip utama.

Lingkungan sekolah yang lebih luas mencakup berbagai aspek, seperti perhatian terhadap isu perundungan atau kekerasan; interaksi yang saling menghormati antara guru, siswa, dan staf; serta upaya menumbuhkan rasa inklusi dan kebanggaan agar setiap individu merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah.

Lingkungan sekolah yang lebih luas juga memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan fisik sekolah. Ketika sekolah mengambil langkah untuk memperbaiki ruang fisik, hal tersebut juga dapat berkontribusi pada peningkatan suasana sekolah secara keseluruhan, dengan memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia secara nyata dan mudah dikenali.

PERTIMBANGAN UTAMA

- Apakah identitas sekolah sebagai Sekolah HRFS tercermin dalam suasana sekolah?
- Apakah siswa yang lebih rentan mendapatkan dukungan saat waktu istirahat, makan siang, atau segera setelah jam sekolah berakhir?
- Apakah seluruh anggota komunitas sekolah merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut? Bagaimana rasa bangga terhadap sekolah dapat ditumbuhkan?
- Apakah sekolah menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya dan kegiatan bagi seluruh warga sekolah?

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN

- Melakukan “tamasya dan belajar” (learning walk) di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan siswa dan guru berjalan bersama mengelilingi sekolah untuk menilai apakah berbagai area sudah mencerminkan prinsip Sekolah HRFS, serta mengidentifikasi isu-isu yang perlu ditangani.
- Meningkatkan keamanan pada area yang memungkinkan terjadinya kontak fisik antar siswa (seperti kantin, area bermain, atau area tanpa pengawasan) dengan memasang tanda/pesan atau mengecat area dengan warna-warna cerah. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku siswa di ruang tersebut.
- Memberikan dukungan kepada siswa yang lebih rentan melalui berbagai inisiatif, seperti klub saat jam makan siang atau setelah sekolah, atau dengan menunjuk teman sebaya yang tepat untuk mendampingi mereka.
- Menyusun daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih ramah terhadap hak asasi manusia.



STUDI KASUS LINGKUNGAN SEKOLAH YANG LEBIH LUAS

MAROKO

Di Lycée Ibn Youssef di Marrakech, banyak siswi mengalami pelecehan di luar area sekolah saat waktu istirahat. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menciptakan “ruang aman bagi perempuan”, yaitu area khusus di dalam sekolah tempat para siswi dapat menghabiskan waktu istirahat bersama, makan siang, serta mengembangkan minat mereka melalui berbagai lokakarya. Melalui penyediaan ruang ini, para siswi merasa lebih aman, dan jumlah insiden kekerasan menurun hingga hampir nol. Pimpinan sekolah bersama Dewan Administratif berhasil menggalang dana untuk mempertahankan operasional ruang tersebut, yang kini sepenuhnya didanai dan berjalan dengan baik. Para guru kini juga tertarik untuk menciptakan ruang serupa bagi siswa laki-laki, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tinggal jauh dari sekolah.

KENYA

Sekolah Menengah Kiogo terletak di daerah pedesaan sekitar 500 km di selatan Nairobi. Akses terhadap layanan dasar seperti air minum dan energi sangat terbatas. Dalam upayanya menjadi Sekolah yang ramah hak asasi manusia, sekolah ini memasang sistem penampungan air berkapasitas 10.000 liter untuk menyediakan air minum bersih bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Kelompok Kerja Proyek sekolah, yang terdiri dari siswa dan staf, mengajukan permohonan pendanaan kepada Preferential Trade Area Bank dan Dewan Gubernur untuk pemasangan pasokan listrik dan tangki air. Seluruh komunitas sekolah turut berpartisipasi dalam proses instalasi tersebut. Kini, para siswa tidak lagi membuang waktu untuk pergi ke sungai mengambil air selama maupun di antara jam pelajaran. Dengan adanya listrik, siswa juga dapat mengikuti kelas tambahan setelah jam sekolah.

“
Menciptakan
‘ruang aman’
bagi para siswi di
mana mereka bisa
menghabiskan
waktu istirahat
bersama
”





LIMA

TAHAPAN UNTUK MENJADI HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL



LANGKAH-LANGKAH MENUJU HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL

Bagian ini memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah yang dapat diambil sekolah dalam perjalanannya menjadi Sekolah HRFS. Terdapat dua tahap dalam program HRFS:

Tahap persiapan – mencakup proses persiapan, perencanaan, dan peletakan dasar bagi pelaksanaan proyek.

Tahap Implementasi dan Evaluasi Proyek – mencakup pelaksanaan rencana kerja sekolah untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kehidupan sekolah, serta pemantauan perkembangan yang dicapai.

TAHAP PERSIAPAN

Menjadi Sekolah Ramah HAM merupakan sebuah upaya yang penting sekaligus menarik, yang akan berdampak pada seluruh komunitas sekolah. **Sekolah perlu menginvestasikan waktu dan energi yang memadai dalam tahap persiapan agar proyek dapat dilaksanakan dengan baik serta berkelanjutan dalam jangka panjang.** Jangka waktu tahap persiapan akan bergantung pada kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekolah. Tahap ini dapat berlangsung mulai dari beberapa minggu, beberapa bulan, hingga satu tahun ajaran. Penentuan durasi sepenuhnya menjadi keputusan sekolah.

1 MEMAHAMI PROYEK

Sebagai langkah awal dalam membangun dasar menuju Sekolah Ramah HAM, penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami 10 Prinsip Global Sekolah Ramah HAM. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk mewujudkan sekolah yang ramah terhadap hak asasi manusia. Setiap sekolah diharapkan berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia hingga prinsip-prinsip tersebut benar-benar tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari di sekolah.

Sekolah yang menjalankan proyek ini harus berkomitmen untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Untuk mendukung hal tersebut, penting juga untuk meninjau Bagian Empat dalam panduan ini yang menguraikan empat area utama kehidupan sekolah, yaitu: tata kelola, hubungan antarwarga sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta lingkungan sekolah. Pada bagian tersebut juga disajikan berbagai studi kasus yang memberikan contoh bagaimana sekolah-sekolah telah berhasil mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam keempat area tersebut.

2 MENENTUKAN KESESUAIAN PROYEK UNTUK SEKOLAH ANDA

Setelah memperoleh informasi mengenai proyek ini, Anda, Amnesty International, pimpinan sekolah, dan jika memungkinkan perwakilan komunitas sekolah perlu bersama-sama menentukan apakah proyek Sekolah Ramah HAM sesuai untuk diterapkan di sekolah Anda. Untuk dapat melanjutkan proyek ini, Anda perlu memastikan bahwa Anda memahami apa yang tercakup dalam proyek tersebut, serta bahwa sekolah Anda memiliki komitmen dan kapasitas untuk menjalankannya. Keputusan ini sebaiknya diambil melalui koordinasi dengan kantor lokal Amnesty International atau organisasi pendukung terkait.

3 MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK SEKOLAH DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Peran pimpinan sekolah dalam mendorong terwujudnya Sekolah HRFS sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Tanpa dukungan dari pimpinan sekolah, akan sulit untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia secara menyeluruh, serta memastikan integrasi dan keberlanjutannya. Pimpinan sekolah memegang peran kunci dalam memimpin proses integrasi nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam komunitas sekolah. Salah satu langkah penting dalam tahap persiapan proyek adalah memperoleh persetujuan dari manajemen sekolah dan/atau dewan pengurus atau yayasan (jika ada) untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Dalam beberapa situasi, mungkin juga diperlukan persetujuan dari otoritas pemerintah terkait, tergantung pada struktur sistem pendidikan formal di masing-masing negara.

Selain itu, perlu ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara pihak sekolah dan kantor Amnesty International setempat. MoU ini memuat peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta mencerminkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan proyek. Kantor Amnesty International setempat dapat menyediakan salinan dokumen MoU untuk proyek Sekolah Ramah HAM.

4 MEMBENTUK KELOMPOK KERJA PROGRAM SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Salah satu unsur kunci dari Sekolah Ramah HAM adalah partisipasi. Sekolah dapat mewujudkan prinsip ini dengan memastikan bahwa proyek dipimpin oleh sebuah kelompok kerja yang merepresentasikan berbagai unsur dalam komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, pimpinan sekolah, tenaga administrasi, dewan pengurus atau yayasan, orang tua, serta anggota masyarakat setempat.

Kelompok kerja proyek Sekolah HAM harus bekerja sama dalam memimpin dan mengelola pelaksanaan proyek di sekolah, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan dan pemantauan rencana aksi sekolah. Kelompok ini juga perlu memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam program.

Kelompok kerja program akan menjadi penentu arah dalam upaya sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kesetaraan, non-

diskriminasi, inklusi, penghormatan, martabat, dan partisipasi. Kelompok ini juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh warga sekolah perlu memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai kegiatan kelompok kerja, dan kelompok kerja juga harus bertanggung jawab atas target-target yang ditetapkan atas nama sekolah.

Anda dapat mengundang perwakilan dari kantor Amnesty International setempat untuk menjadi bagian dari kelompok kerja sebagai pengamat, jika diperlukan. Kelompok kerja proyek juga dapat meminta dukungan, arahan, materi, dan sumber daya dari Amnesty International selama pelaksanaan proyek.

Amnesty International Maroko bersama otoritas setempat menandatangani Nota Kesepahaman untuk melaksanakan program Sekolah Ramah HAM di Lycée Ibn Youssef, Marrakech, Maroko, 2009.



© Amnesty International

KELOMPOK KERJA PROGRAM SEBAIKNYA:

- Mengadakan pertemuan secara berkala.
- Menerima pelatihan tentang pendidikan hak asasi manusia dan teknik manajemen proyek, jika diperlukan.
- Memiliki tanggung jawab nyata dalam pelaksanaan proyek Sekolah Ramah HAM di sekolah.
- Bekerja sama untuk menyusun dan menyepakati kerangka acuan (terms of reference) bagi kelompok kerja proyek, yang menjelaskan peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan proyek.



Diskusi kelompok terarah (focus group discussion) di komunitas Bundu, Pelabuhan Harcourt, Nigeria, Desember 2011.

STUDI KASUS MEMBENTUK KELOMPOK KERJA PROYEK

INGGRIS RAYA

Villiers High School di London membentuk kelompok kerja lintas sekolah untuk memimpin proyek Sekolah Ramah HAM. Kelompok ini terdiri dari siswa, guru, pimpinan sekolah, orang tua, serta dewan pengurus sekolah, dan bertanggung jawab atas penyusunan serta pelaksanaan rencana aksi sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Pertemuan awal difokuskan pada kegiatan membangun kerja sama tim (team building), dan kelompok tersebut juga menyusun serta menyepakati seperangkat aturan sebagai pedoman dalam bekerja bersama. Staf dari Amnesty International Inggris diundang untuk berpartisipasi dalam beberapa pertemuan kelompok kerja proyek, serta memberikan pelatihan hak asasi manusia guna mendukung kelompok dalam menyusun rencana aksi mereka.



5 MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG PROGRAM DI DALAM KOMUNITAS SEKOLAH

Jika seluruh warga sekolah terlibat dalam program HRFS, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui adanya proyek ini. Setiap anggota komunitas sekolah perlu memahami apa itu Sekolah Ramah HAM, apa maknanya bagi sekolah mereka, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Meluangkan waktu dan energi untuk meningkatkan kesadaran, serta membangun minat dan antusiasme warga sekolah, akan sangat membantu dalam pelaksanaan proyek pada tahap-tahap selanjutnya. Kelompok kerja program perlu menyusun rencana untuk meningkatkan kesadaran tentang proyek ini di lingkungan sekolah.

IDE UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DALAM KOMUNITAS SEKOLAH

- Mengembangkan dan menyebarkan leaflet serta poster informasi tentang proyek Sekolah Ramah HAM, atau menerjemahkan materi yang sudah ada ke dalam bahasa yang digunakan di sekolah.
- Menyelenggarakan pertemuan atau rapat mengenai proyek ini bagi komunitas sekolah.
- Mendorong guru untuk menjelaskan proyek kepada siswa selama kegiatan pembelajaran.
- Menginformasikan proyek kepada sekelompok inti siswa agar mereka dapat menyebarkan informasi kepada teman sebaya.
- Mengundang orang tua dan anggota masyarakat ke acara pertemuan guru dan orang tua wali murid yang berfokus pada sosialisasi program ini.
- Mempublikasikan informasi tentang proyek Sekolah Ramah HAM di situs web sekolah, jika memungkinkan.
- Mengabarkan pembaruan rutin mengenai perkembangan proyek dalam buletin atau majalah sekolah.

STUDI KASUS MENINGKATKAN KESADARAN DI DALAM KOMUNITAS SEKOLAH

BENIN

Collège d'Enseignement Général de Pahou di Ouidah meluncurkan proyek Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia melalui sebuah acara khusus yang mempertemukan seluruh warga sekolah. Mereka mengundang Direktur Amnesty International Benin untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut. Para guru, siswa, dan orang tua turut hadir dalam momen penting bagi sekolah ini.

MAROKO

Lycée Ibn Youssef di Marrakech mengundang Amnesty International Maroko untuk menyelenggarakan lokakarya selama tiga hari bagi seluruh tenaga pengajar, serta beberapa siswa dan orang tua, guna memperkenalkan program Sekolah Ramah HAM dan mempersiapkan pelaksanaannya. Selain itu, mereka juga mengadakan sesi orientasi selama satu hari bagi seluruh siswa di awal tahun ajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang program serta mendorong keterlibatan mereka.



6 MENGADAKAN PELATIHAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK GURU

Dukungan dan pelatihan yang efektif bagi guru merupakan kunci keberhasilan implementasi program Sekolah Ramah HAM. Pelatihan dasar pendidikan hak asasi manusia hendaknya ditawarkan kepada seluruh guru pada tahap awal pelaksanaan program, disertai kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Kantor Amnesty International di daerah Anda dapat membantu mengidentifikasi dan menyelenggarakan pelatihan yang tepat bagi guru.

7 MENILAI KONDISI SEKOLAH RAMAH HAM SAAT INI

Untuk menyusun rencana kerja sekolah Anda menuju Sekolah Ramah HAM diperlukan pemahaman awal tentang sejauh mana sekolah Anda sudah "ramah hak asasi manusia" pada saat program ini dimulai. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk langkah berikutnya, yaitu menentukan area prioritas yang perlu difokuskan dalam rencana kerja sekolah. Terdapat beberapa metode untuk menilai kondisi keramahan hak asasi manusia di sekolah. Tidak ada satu metode yang diwajibkan, namun setiap sekolah yang berpartisipasi dalam program ini wajib menyelesaikan penilaian kondisi awal keramahan HAM mereka selama fase awal pelaksanaan sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Penilaian terhadap kondisi keramahan hak asasi manusia sekolah dapat dilakukan dengan cara: merefleksikan 10 Prinsip Global Sekolah Ramah HAM dalam kaitannya dengan empat area utama kehidupan sekolah; mengukur Temperatur HAM (lihat halaman 86–90); melakukan analisis SWOT untuk menilai Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) di sekolah; atau merujuk pada Tingkatan Keramahan HAM (lihat halaman 91–100 sebagai panduan).

MEREFLEKSIKAN 10 PRINSIP GLOBAL SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Sekolah dapat memulai dari 10 Prinsip Global Sekolah Ramah HAM (lihat Bagian Tiga panduan ini) sebagai titik awal untuk merefleksikan sejauh mana sekolah sudah ramah HAM. Anggota komunitas sekolah dapat merefleksikan 10 Prinsip Global Sekolah Ramah HAM dalam kaitannya dengan empat area utama kehidupan sekolah: Tata Kelola, Hubungan Antarwarga Sekolah, Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler, serta Lingkungan Sekolah (lihat Bagian Empat untuk informasi lebih lanjut). Proses refleksi ini dapat dilaksanakan bersama warga sekolah melalui diskusi kelompok terarah, lokakarya, sesi curah pendapat, maupun kegiatan di dalam kelas.

STUDI KASUS PELATIHAN PENDIDIKAN HAM BAGI GURU

INGGRIS

Seluruh guru di Villiers High School di London mendapatkan pelatihan pendidikan HAM dalam konferensi internasional HAM yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Para staf pengajar mengikuti sesi pelatihan HAM yang difasilitasi oleh Amnesty International UK dan UNICEF UK, sekaligus mendapat ruang untuk mendiskusikan cara mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam praktik pengajaran dan pembelajaran mereka.

DENMARK

Amnesty International Denmark menyelenggarakan pelatihan bagi para guru KonTiki Skolen di Hillerød mengenai etika HAM dan keterkaitannya dengan proses pembelajaran serta pemikiran pedagogis. Pelatihan ini didasari oleh keyakinan bahwa pendidikan HAM memerlukan pendekatan holistik, yang mencakup cara kita bersikap terhadap sesama. Tidak terkecuali para guru sebagai panutan orang dewasa bagi siswa-siswi. Melalui fasilitasi dan refleksi diri, para guru diajak untuk mengenali sikap dan peran bawah sadar mereka, sekaligus menganalisis relasi kuasa yang ada di sekolah. Pelatihan ini menggali bagaimana guru memandang anak-anak sebagai individu yang cakap, memiliki pendapat dan potensi yang valid, dapat dipercaya untuk mengambil peran, serta mampu mengatur proses belajar dan kehidupan mereka sendiri. Rasa saling menghormati menjadi gagasan mendasar yang melandasi pendekatan ini.



MENGUKUR TEMPERATUR HAM DI SEKOLAH ANDA

Kegiatan Temperatur HAM dapat memberikan gambaran penting tentang bagaimana warga sekolah memandang penerapan HAM di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menggunakan kuesioner pilihan ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan untuk menilai tingkat pemenuhan HAM di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun berdasarkan pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

Setiap pertanyaan memiliki skala penilaian dari 1 sampai 5 (1 = Tidak atau Tidak Pernah / 5 = Ya atau Selalu). Peserta diminta memilih angka yang paling menggambarkan kondisi sekolah mereka untuk setiap pertanyaan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap kuesioner yang telah diisi akan menghasilkan skor total yang disebut sebagai “temperatur” HAM. Skor yang terkumpul kemudian dijumlah dan dirata-rata untuk mengetahui gambaran umum kondisi HAM di sekolah.

Sekolah dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan ini hanya kepada sekelompok kecil orang (misalnya hanya kelompok kerja proyek), atau melibatkan sebagian atau seluruh anggota komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan yang lebih luas. Namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan pelaksanaan survei serta pengumpulan dan analisis hasilnya.

Sebagai alat evaluasi, sekolah dapat mengulang pelaksanaan kuesioner Temperatur HAM di akhir tahun ajaran atau secara berkala untuk menilai apakah sekolah semakin menjadi lingkungan yang ramah HAM dari waktu ke waktu.

👉 Lihat halaman 86–89 untuk contoh kuesioner Temperatur HAM, dan halaman 90 untuk versi sederhana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kuesioner dan dokumen DUHAM juga dapat ditemukan dalam Buku Panduan Sekolah Ramah HAM. Anda dapat menyesuaikan atau mengadaptasi pertanyaan agar lebih tepat dengan konteks sekolah.

STUDI KASUS MENGUKUR “TEMPERATUR” HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH ANDA

IRLANDIA

Di Presentation Secondary School Warrenmount di Dublin, seluruh komunitas sekolah berpartisipasi dalam kegiatan Temperatur HAM. Kuesioner diberikan kepada setiap kelas pada hari tertentu, dan staf yang terlibat telah mendapatkan pengarahannya sebelumnya agar nyaman dalam menyampaikannya kepada siswa. Seluruh siswa, manajemen sekolah, staf (pengajar dan non-pengajar), serta perwakilan orang tua diundang untuk mengisi kuesioner dan mengembalikannya secara anonim ke kotak yang disediakan di ruang staf. Kuesioner yang terkumpul kemudian diserahkan ke kantor Amnesty International di Dublin, dan selama musim panas hasilnya dianalisis. Data tersebut sangat bermanfaat bagi sekolah dalam menyusun rencana kerja tahunan untuk menjadi sekolah yang ramah HAM. Sekolah juga menginformasikan ringkasan temuan melalui buletin bulanan serta menyampaikan laporan kepada manajemen sekolah dan perkumpulan orang tua.



Melakukan Analisis SWOT

Sekolah dapat melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan (Threats) sebagai persiapan dalam menjalankan program Sekolah Ramah HAM.

Sekolah dapat menganalisis keempat aspek tersebut pada setiap bidang utama kehidupan sekolah, seperti tata kelola, hubungan antarwarga sekolah, kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, serta lingkungan sekolah. Hasil analisis ini akan membantu sekolah memahami kondisi internal dan eksternal, menentukan area prioritas yang perlu difokuskan terlebih dahulu, serta menyusun rencana kerja yang tepat. Analisis SWOT dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pandangan dari berbagai anggota komunitas sekolah, misalnya melalui **diskusi kelompok** kecil terarah.

👉 Lihat halaman 85 untuk contoh templat analisis SWOT. Templat ini juga tersedia dalam Human Rights Friendly Schools Toolkit.

MERUJUK PADA TINGKAT KERAMAHAN HAM DI SEKOLAH

Untuk membantu menilai sejauh mana sekolah Anda sudah ramah HAM di awal program, Anda dapat menggunakan panduan Tingkat Keramahan HAM pada tabel di halaman 91–100. **Panduan ini bersifat sebagai acuan, bukan kerangka yang baku.** Tabel tersebut menggambarkan empat Tingkat Keramahan HAM untuk setiap aspek utama kehidupan sekolah.

Sekolah dapat menggunakan tingkatan ini untuk menilai posisi awal, misalnya dengan menentukan berada pada tingkat tertentu untuk satu atau beberapa aspek. Hasil ini kemudian dapat dijadikan tolok ukur untuk memantau perkembangan selama pelaksanaan program. Selain itu, tabel ini juga dapat digunakan saat menyusun tujuan dalam rencana kerja sekolah, serta sebagai indikator dalam menilai atau mengevaluasi kemajuan di akhir tahun.

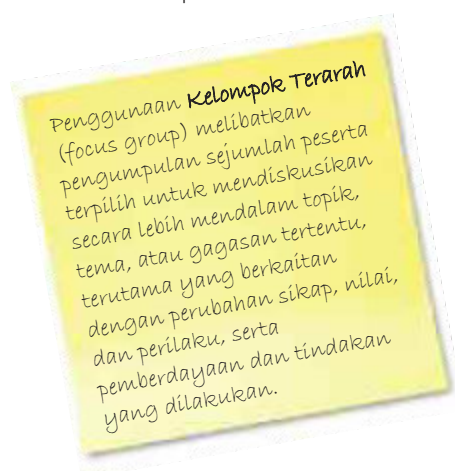
👉 Lihat halaman 91–100 untuk panduan lengkap tingkat “keramahan HAM”. Tabel ini juga tersedia dalam Buku Panduan Sekolah Ramah HAM. Tabel ini juga tersedia dalam Buku Sekolah Ramah HAM.

8 MENGEMBANGKAN VISI UNTUK SEKOLAH HRFS

Setelah memahami posisi sekolah Anda dalam hal keramahan terhadap HAM, langkah berikutnya adalah menyusun visi sebelum membuat rencana kerja. Pernyataan visi untuk Sekolah Ramah HAM adalah gambaran yang jelas dan inspiratif tentang kondisi terbaik yang ingin dicapai. Tujuan dari visi ini adalah untuk menginspirasi, memberi semangat, memotivasi, dan mendorong kreativitas, bukan sebagai alat ukur keberhasilan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN SAAT MENYUSUN VISI SEKOLAH :

- Dengan mempertimbangkan 10 Prinsip Global HRFS, gambaran seperti apa yang Anda inginkan untuk sekolah Anda? Apa yang sekolah Anda ingin capai?
- Anda dapat membayangkan sesuatu yang bahkan lebih baik dari hasil terbaik yang menurut Anda bisa dicapai.
- Pernyataan visi yang kuat perlu melampaui ekspektasi dan aspirasi, sehingga membuat Anda keluar dari zona nyaman.
- Gunakan imajinasi saat menyusun visi. Albert Einstein pernah mengatakan, “Imajinasi lebih kuat dari pengetahuan.” Pengetahuan membantu kita melihat kondisi saat ini, sedangkan imajinasi membantu kita melihat kemungkinan di masa depan.
- Tuliskan visi seolah-olah Anda sedang menggambarkan apa yang Anda lihat, dengar, pikirkan, dan rasakan ketika kondisi ideal tersebut telah tercapai.
- Tinjau kembali visi Sekolah HRFS Anda sepanjang tahun, terutama saat Anda membutuhkan inspirasi dan motivasi.



STUDI KASUS MENYUSUN VISI SEKOLAH

MONGOLIA

Sebelum menyusun pernyataan visi sekolah, Mongolia-India Joint School di Ulaanbaatar menyelenggarakan dua sesi pelatihan guru bekerja sama dengan Amnesty International Mongolia. Setelah memperoleh pelatihan, guru mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran di kelas untuk mengumpulkan pendapat siswa mengenai visi sekolah. Siswa dan guru bekerja bersama untuk merumuskan visi Human Rights Friendly School. Sebelum visi tersebut ditetapkan, seluruh komunitas sekolah dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Pada upacara pembukaan tahun ajaran baru, kepala sekolah mempresentasikan sekaligus memperkenalkan visi sekolah yang baru.



9 MENGEMBANGKAN RENCANA KERJA SEKOLAH

Sekolah yang berpartisipasi dalam program ini perlu menyusun rencana kerja untuk menjadi sekolah yang ramah hak asasi manusia. Proses ini sebaiknya dipimpin oleh tim pelaksana program dan, idealnya, melibatkan partisipasi warga sekolah. Setiap rencana kerja akan berbeda, karena disusun berdasarkan hasil analisis kondisi awal keramahan HAM di sekolah, serta kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekolah.

RENCANA KERJA ANDA HARUS:

- Berlandaskan pada 10 Prinsip Global Human Rights Friendly School yang terdapat pada Bagian Tiga panduan ini, serta informasi tentang empat bidang utama kehidupan sekolah pada Bagian Empat.
- Mengacu pada hasil analisis kondisi awal keramahan HAM di sekolah. Jika Anda sudah menilai tingkat keramahan HAM menggunakan tabel pada halaman 91–100, jelaskan bagaimana sekolah akan naik ke tingkat berikutnya pada setiap bidang yang menjadi fokus. Tujuan dan sasaran dalam rencana kerja dapat disusun berdasarkan tingkat tersebut.
- Memuat tujuan yang spesifik dan realistis untuk meningkatkan keramahan HAM, dengan fokus pada satu atau dua bidang utama terlebih dahulu, atau lebih jika sekolah sudah siap. Gunakan prinsip SMART: Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), Dapat Dicapai (Achievable), Relevan (Relevant), dan Berbatas Waktu (Time-bound).
- Memasukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rencana kerja (lihat halaman 80–81).

PERTANYAAN PANDUAN DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA:

- Di mana posisi kita saat ini? (tingkat keramahan HAM saat ini)
- Apa yang ingin kita capai? (perubahan yang ingin diwujudkan)
- Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya? (aktivitas program)
- Siapa yang akan memimpin? Siapa saja yang terlibat? (pemangku kepentingan utama)
- Bagaimana kita mengetahui bahwa perubahan telah terjadi atau sedang berlangsung? (tonggak capaian)
- Bagaimana dan dari mana kita mengumpulkan bukti atas kemajuan yang dicapai? (pemantauan progres)

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA:

- Idealnya rencana disusun untuk periode satu tahun. Rencana ini dapat ditinjau dan diperbarui setiap tahun dengan mengacu pada capaian sebelumnya.
 - Pastikan sekolah memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, material, maupun pendanaan, untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi.
 - Sekolah lain yang mengikuti program ini dapat menjadi sumber belajar bagi satu sama lain. Manfaatkan pengalaman dan pengetahuan satu sama lain dalam menyusun rencana kerja.
 - Jika memiliki pertanyaan terkait penyusunan rencana kerja, Anda dapat menghubungi kantor Amnesty International setempat.
 - Pastikan rencana kerja Anda dikirimkan ke kantor Amnesty International setempat.
- 👉 Lihat halaman 101 untuk contoh templat rencana kerja Human Rights Friendly School. Templat ini juga tersedia dalam Buku Panduan Human Rights Friendly School. Templat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

STUDI KASUS MENYUSUN RENCANA KERJA ANDA

GHANA

Di Sekolah Menengah Accra, seluruh komunitas sekolah dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja. Kepala sekolah, guru, perwakilan siswa, dan orang tua dikonsultasikan serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan memberikan ide dan masukan. Perwakilan dari setiap unsur komunitas sekolah menjadi anggota Tim Kerja Program Human Rights Friendly School yang bekerja sama dengan Amnesty International Ghana untuk mengimplementasikan rencana aksi.





© Amnesty International

Anak-anak bermain voli di Hatcliffe Extension, Harare,
Zimbabwe, Maret 2010

TAHAP IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN PROYEK

Tahap awal untuk menjadi Human Rights Friendly School dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, bahkan sampai satu tahun ajaran, tergantung pada kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekolah. Jika sudah siap, sekolah dapat melanjutkan ke tahap implementasi dan peninjauan proyek.

1 MENJALANKAN RENCANA KERJA SEKOLAH HRFS

Rencana kerja memberikan kerangka dasar dan strategi bagi sekolah untuk melaksanakan program Human Rights Friendly School selama satu tahun ajaran. Dalam proses ini, sekolah akan mendapatkan dukungan dari kantor Amnesty International setempat. Bentuk dukungan dapat beragam, mulai dari penyediaan materi pembelajaran, kegiatan kunjungan lapangan yang didukung Amnesty International, hingga dukungan dalam membentuk klub ekstrakurikuler di sekolah.

Sumber daya tambahan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi juga tersedia dalam Panduan Human Rights Friendly School, yang memuat berbagai materi pendidikan HAM dari Amnesty International dan organisasi lainnya.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN SAAT MELAKSANAKAN RENCANA KERJA:

- Tim pelaksana proyek tetap memegang peran utama dalam memimpin program dan perlu melakukan pertemuan secara rutin selama periode pelaksanaan.
- Mengadakan pertemuan evaluasi berkala yang melibatkan komunitas sekolah yang lebih luas, misalnya di akhir setiap semester, untuk memberikan informasi dan menghimpun umpan balik terkait program. Pertemuan ini dapat diorganisir oleh tim pelaksana program.
- Mengadakan pertemuan rutin dengan kantor Amnesty International setempat untuk membahas perkembangan serta tantangan yang dihadapi.

- Anda juga dapat menyelenggarakan acara peluncuran Human Rights Friendly School yang melibatkan seluruh komunitas sekolah.
- Anda dapat melibatkan media dalam beberapa kegiatan Human Rights Friendly School yang direncanakan. Pastikan untuk memberi tahu kantor Amnesty International setempat.
- Anda dapat menyelenggarakan acara perayaan di akhir tahun ajaran yang melibatkan seluruh komunitas sekolah.

2 TERHUBUNG DENGAN SELURUH KOMUNITAS SEKOLAH DAN SEKOLAH LAIN

Program Human Rights Friendly School dapat menghubungkan sekolah-sekolah di berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam menerapkan nilai-nilai HAM. Human Rights Friendly School dapat menjalin kerja sama dengan sekolah lain untuk saling bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat pembelajaran tentang menghargai keberagaman dan perbedaan. Sekolah juga dapat meminta bantuan kantor Amnesty International setempat untuk mengidentifikasi dan menghubungi Human Rights Friendly School lainnya di berbagai belahan dunia.

Jaringan internasional Human Rights Friendly School membuka banyak peluang. Jaringan ini mampu memperkuat solidaritas global dengan menghubungkan sekolah, siswa, dan guru melalui kerangka nilai HAM yang sama. Peserta program dapat saling belajar tentang budaya dan pengalaman yang berbeda dalam lingkungan yang saling mendukung dan menghargai. Lebih dari itu, jaringan ini juga mendorong pertukaran pengalaman serta praktik baik terkait program, sehingga membantu meningkatkan kapasitas semua pihak dalam mewujudkan sekolah yang ramah HAM. Selain terhubung dengan Human Rights Friendly School lainnya, sekolah juga memiliki peluang untuk membangun jejaring atau mendapatkan dukungan dari organisasi non-pemerintah maupun organisasi akar rumput yang bergerak di bidang HAM atau kerja berbasis komunitas. Selain itu, terdapat kesempatan bagi Human Rights Friendly School untuk berbagi pengalaman dengan sekolah lain dari negara, wilayah, dan komunitas mereka yang mungkin masih memiliki keterbatasan dalam mempelajari atau menerapkan nilai-nilai HAM.

3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Menilai dampak program dari waktu ke waktu merupakan bagian penting dalam menjadi Human Rights Friendly School. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi perlu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan. Hasil pemantauan dan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas program serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hasil tersebut juga membantu memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekolah dianjurkan untuk melakukan evaluasi mandiri selama pelaksanaan program, dan dapat meminta bantuan serta menggunakan alat yang disediakan oleh kantor Amnesty International setempat. Terdapat pula persyaratan evaluasi tertentu dari Amnesty International yang perlu dipenuhi oleh semua Human Rights Friendly School.

Melakukan tinjauan tengah tahun sangat disarankan untuk menilai perkembangan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama periode pelaksanaan. Evaluasi program akan membantu sekolah mengidentifikasi dan membagikan cerita keberhasilan kepada komunitas sekolah serta mitra lain yang terlibat, termasuk pemerintah

dan serikat guru. Evaluasi ini juga membantu Amnesty International memahami bagaimana sekolah di berbagai negara mengembangkan praktik ramah HAM, sekaligus meningkatkan kerangka program Human Rights Friendly School, dukungan, dan sumber daya yang tersedia.

Keterlibatan seluruh warga sekolah dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program, sekaligus membagi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada lebih banyak pihak.

PERSYARATAN EVALUASI UNTUK SEKOLAH HRFS

Sekolah yang berpartisipasi dalam program Human Rights Friendly School diwajibkan untuk mengirimkan rencana kerja tahunan kepada kantor Amnesty International setempat.

Setiap sekolah juga dianjurkan untuk mengukur Temperatur HAM atau menilai kondisi awal keramahan HAM menggunakan metode lain. Di akhir setiap tahun pelaksanaan program, sekolah wajib menyusun laporan evaluasi yang memuat kegiatan yang telah dilakukan, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi. Templat laporan evaluasi akan disediakan oleh kantor Amnesty International setempat.



© Amnesty International

Lokakarya evaluasi Education for Human Dignity,
Italia, September 2011.

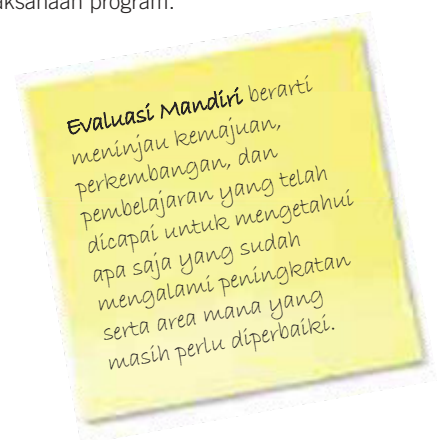
ALAT EVALUASI MANDIRI DAN PEMANTAUAN

Terdapat berbagai alat evaluasi dan pemantauan yang dapat digunakan oleh Human Rights Friendly School untuk membantu melacak kemajuan dalam mewujudkan lingkungan HAM, serta memfasilitasi penyesuaian terhadap rencana kerja jika diperlukan. Informasi mengenai beberapa alat pemantauan dan evaluasi untuk Human Rights Friendly School disajikan dalam tabel berikut.

ALAT EVALUASI DAN PEMANTAUAN UNTUK SEKOLAH

ALAT	PERTIMBANGAN
Aktivitas Temperatur HAM	Mengukur Temperatur HAM di sekolah Anda memberikan gambaran kondisi sebelum dan sesudah terkait sejauh mana sekolah telah ramah terhadap hak asasi manusia. Kegiatan ini juga memungkinkan seluruh anggota komunitas sekolah untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai kinerja sekolah dalam aspek hak asasi manusia.
Rencana kerja tahunan	Rencana kerja tahunan sekolah akan menjadi daftar periksa (checklist) yang memuat berbagai tujuan terkait area-area yang ingin ditingkatkan agar sekolah menjadi lebih ramah HAM (perubahan yang ingin dicapai). Rencana ini juga mencakup tonggak pencapaian (milestone) serta cara untuk memantau kemajuan. Ketika ditinjau pada akhir tahun ajaran, rencana aksi tersebut dapat membantu menganalisis apa saja yang telah dicapai oleh sekolah, serta target mana yang belum terpenuhi.
Diskusi Kelompok Terarah	Diskusi kelompok terarah menyediakan ruang bagi anggota komunitas sekolah untuk memberikan umpan balik dan terlibat dalam dialog mengenai partisipasi mereka dalam proyek Human Rights Friendly School. Jika dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok dalam komunitas sekolah (misalnya orang tua, guru, siswa, dan tenaga administrasi), metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek proyek, termasuk tantangan yang dihadapi serta peluang untuk mencapai keberhasilan.
Survei seluruh sekolah	Survei yang dilakukan di seluruh sekolah dapat menghasilkan sumber data, baik kualitatif maupun kuantitatif, mengenai pengalaman para peserta dalam program Human Rights Friendly School. Survei ini memberikan kesempatan bagi seluruh anggota komunitas sekolah untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pelaksanaan program.
Tingkat Keramahan HAM	Jika Anda sudah menentukan tingkat keramahan HAM di awal program, maka hasilnya dapat menjadi tolok ukur bagi sekolah untuk memantau kemajuan selama pelaksanaan program. Informasi yang terdapat dalam tabel tingkat keramahan HAM dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai perkembangan sekolah pada akhir setiap tahun.

 Silakan merujuk pada bagian Pemantauan dan Evaluasi untuk Sekolah dalam Panduan Human Rights Friendly School untuk menemukan berbagai alat dan sumber daya sederhana lainnya yang dapat disesuaikan dan diterapkan oleh sekolah.



4 MENINJAU ULANG RENCANA KERJA UNTUK TAHUN YANG AKAN DATANG

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri, sekolah dapat meninjau dan merevisi rencana kerja jika diperlukan, terutama pada tahun pertama pelaksanaan program. Program Human Rights Friendly School merupakan sebuah siklus berkelanjutan yang mencakup penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang diperoleh serta menyesuaikan rencana kerja merupakan bagian penting dari siklus ini. Evaluasi tahunan, termasuk penilaian terhadap kemajuan sekolah selama satu tahun, akan memberikan informasi berharga yang dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana program untuk tahun

berikutnya atau jangka waktu yang lebih panjang. Setiap tahun, sekolah dapat mempertimbangkan untuk menambah kegiatan atau memperluas cakupan program, hingga pada akhirnya mampu mencakup seluruh elemen dalam empat area utama kehidupan sekolah.





ENAM ALAT BANTU



ALAT BANTU

Bagian ini memuat berbagai alat yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Alat-alat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Materi dan sumber lainnya terdapat dalam Toolkit Human Rights Friendly School pada CD-Rom yang disertakan.

1. ANALISIS SWOT

Sebuah templat untuk membantu menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan (Threats) terkait setiap area utama kehidupan sekolah.

2. KEGIATAN PENGUKURAN TEMPERATUR HAM

a) Kuesioner untuk membantu mengevaluasi tingkat keramahan HAM sebelum dan setelah pelaksanaan program Human Rights Friendly School, dengan menggunakan pasal-pasal dalam DUHAM sebagai dasar.

b) Versi sederhana dari DUHAM yang digunakan sebagai pendamping kuesioner.

3. TINGKAT KERAMAHAN HAM

Berisi tabel yang menunjukkan tingkatan yang disarankan untuk setiap elemen dalam masing-masing area utama kehidupan sekolah. Tabel ini akan membantu mengidentifikasi posisi sekolah saat ini serta menentukan arah yang ingin dicapai. Empat tingkatan berbeda dalam keramahan terhadap HAM juga diuraikan dalam tabel.

4. RENCANA AKSI SEKOLAH HRFS

Contoh templat rencana aksi yang dapat diisi dengan tujuan, kegiatan yang direncanakan, serta indikator untuk memantau kemajuan dan hasil yang dicapai.



1 ANALISIS SWOT

Sekolah dapat melakukan analisis terhadap **kekuatan**, **kelemahan**, **peluang**, dan **tantangan** terkait setiap area utama kehidupan sekolah (tata kelola, hubungan, kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, serta lingkungan sekolah).

AREA UTAMA KEHIDUPAN SEKOLAH _____

KEKUATAN INTERNAL Sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau keunggulan lain yang dimiliki atau dapat dikembangkan oleh sekolah.	KELEMAHAN INTERNAL Keterbatasan atau kekurangan dalam sekolah yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
PELUANG EKSTERNAL Kondisi, tren, atau lingkungan di luar sekolah yang mendukung atau memberikan keuntungan bagi sekolah.	PELUANG EKSTERNAL Kondisi, tren, atau lingkungan di luar sekolah yang dapat menghambat, mencegah, atau membatasi sekolah dalam mencapai tujuannya.

2a KUESIONER PENGUKURAN TEMPERATUR HAK ASASI MANUSIA

Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan saksama. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan setiap pernyataan sebelum memilih angka pada skala penilaian yang menurut Anda paling menggambarkan kondisi sekolah Anda. Salinan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah disediakan dan pasal-pasal DUHAM yang relevan dicantumkan dalam tanda kurung. Jika sudah terisi, jumlahkan seluruh skor Anda dan tuliskan totalnya di bagian akhir. Nilai tersebut merupakan Temperatur HAM di sekolah Anda.

Skala Penilaian:

1 = Tidak pernah / Tidak sama sekali

2 = Jarang

3 = Kadang-kadang

4 = Sering

5 = Ya / Selalu

CONTOH

Sekolah kami adalah tempat dimana semua orang merasa bahagia. (Jika semua orang di sekolah Anda selalu berjalan dengan senyum lebar di wajah mereka, maka Anda dapat melingkari angka 5 — “ya/selalu”.)

1 2 3 4 5

1 Sekolah saya adalah tempat dimana siswa merasa aman dan terlindungi (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan 5).

1 2 3 4 5

2 Tidak ada seorang pun di sekolah saya yang mengalami diskriminasi atas alasan apa pun, misalnya karena agama, cara berpakaian, pertemanan, warna kulit, kasta atau kelas sosial, atau aktivitas yang mereka lakukan di luar sekolah (DUHAM, Pasal 1 dan 2).

1 2 3 4 5

3 Sekolah saya menyediakan akses, sumber daya, dan kegiatan yang setara bagi semua orang (DUHAM, Pasal 2 dan 7).

1 2 3 4 5



4 Semua anggota komunitas sekolah mendapat informasi dan dorongan yang setara terkait peluang akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan karier (DUHAM, Pasal 2).

1 2 3 4 5

5 Saya memiliki kebebasan untuk menyampaikan keyakinan dan gagasan saya (baik budaya, politik, agama, maupun keyakinan lainnya) tanpa takut didiskriminasi, diejek, atau dipermalukan (DUHAM, Pasal 18 dan 19).

1 2 3 4 5

6 Komunitas sekolah saya menerima siswa, keluarga mereka, guru, dan staf lainnya dari berbagai latar belakang dan budaya (DUHAM, Pasal 2, 6, 13, 14, dan 15).

1 2 3 4 5

7 Sekolah saya bersifat demokratis. Setiap anggota komunitas sekolah (siswa, guru, tenaga pendukung, dan orang tua) memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal yang mempengaruhi mereka, seperti aturan dan kebijakan sekolah (DUHAM, Pasal 20, 21, dan 23).

1 2 3 4 5

8 Ketika terjadi pelanggaran atau insiden di sekolah, semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara oleh guru serta pimpinan sekolah dalam mencari tahu apa yang terjadi dan dalam menentukan konsekuensi yang diberikan (DUHAM, Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10).

1 2 3 4 5

9 Ketika seseorang di sekolah melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap hak orang lain, mereka dibantu untuk belajar memperbaiki perilakunya (DUHAM, Pasal 26).

1 2 3 4 5

10 Ketika terjadi konflik (perbedaan pendapat atau pertengkaran) di sekolah, kami berupaya menyelesaikannya melalui cara-cara yang nirkekerasan dan kolaboratif (DUHAM, Pasal 3, 5, dan 28).

1 2 3 4 5

11 Ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan di sekolah saya, ia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (DUHAM, Pasal 11).

1 2 3 4 5

12 Tidak ada seorang pun di sekolah saya yang diperlakukan atau dihukum dengan cara yang merendahkan, kejam, atau membuatnya merasa tidak dihargai sebagai manusia (DUHAM, Pasal 4 dan 5).

1 2 3 4 5

13 Jika terjadi pengaduan terkait pelecehan atau diskriminasi di sekolah saya, tersedia kebijakan dan prosedur untuk menanganinya (DUHAM, Pasal 3, 6, dan 7).

1 2 3 4 5

14 Anggota komunitas sekolah dapat membuat dan menyebarkan buletin serta publikasi lainnya tanpa takut akan sensor atau hukuman (DUHAM, Pasal 19 dan 27).

1 2 3 4 5

15 Setiap orang di sekolah saya saling mendorong untuk mempelajari isu-isu global yang berkaitan dengan keadilan, lingkungan, kemiskinan, dan perdamaian (DUHAM, Pembukaan serta Pasal 26 dan 29).

1 2 3 4 5

16 Di sekolah saya, terdapat kesempatan untuk mendengar, membaca, dan mempelajari kehidupan, pandangan, serta gagasan orang lain; keberagaman suara tercermin dalam kurikulum, buku pelajaran, perpustakaan, dan ruang-ruang publik (DUHAM, Pasal 2, 19, dan 27).

1 2 3 4 5

17 Orang-orang yang bekerja di sekolah saya menerima upah yang layak untuk memenuhi standar hidup yang memadai bagi diri mereka dan keluarganya, serta memperoleh hari libur dan cuti berbayar sesuai ketentuan (DUHAM, Pasal 4, 22, 24, dan 25).

1 2 3 4 5

18 Di sekolah saya, ruang pribadi dan kepemilikan setiap orang dihormati (DUHAM, Pasal 12 dan 17).

1 2 3 4 5

19 Di sekolah saya, saya turut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melakukan diskriminasi. Setiap orang berperilaku dengan cara yang menjaga keselamatan serta kesejahteraan seluruh komunitas sekolah (DUHAM, Pasal 1 dan 29).

1 2 3 4 5

20 Di sekolah saya, saya yakin bahwa tidak ada pihak yang dapat merampas hak-hak saya (DUHAM, Pasal 30).

1 2 3 4 5

Total Temperatur Hak Asasi Manusia=_____

2b DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

1. Kita semua dilahirkan bebas dan setara. Kita semua memiliki pikiran dan gagasan sendiri. Kita harus diperlakukan dengan cara yang sama.
2. Hak-hak ini dimiliki oleh setiap orang, tanpa memandang perbedaan di antara kita.
3. Kita semua berhak atas kehidupan, serta hidup dalam kebebasan dan keamanan.
4. Tidak seorang pun berhak menjadikan kita sebagai budak. Kita juga tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak.
5. Tidak seorang pun berhak menyakiti, menyiksa, atau memperlakukan kita secara kejam.
6. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum.
7. Hukum berlaku sama bagi semua orang dan harus memperlakukan kita secara adil.
8. Kita semua berhak meminta perlindungan hukum ketika diperlakukan tidak adil.
9. Tidak seorang pun berhak memenjarakan kita tanpa alasan yang sah, menahan kita, atau mengusir kita dari negara kita.
10. Jika kita diadili, prosesnya harus terbuka untuk umum. Orang-orang yang mengadili kita tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun.
11. Tidak seorang pun boleh dianggap bersalah atas suatu perbuatan sampai hal tersebut terbukti. Jika seseorang menuduh kita melakukan hal buruk, kita berhak membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.
12. Tidak seorang pun boleh merusak nama baik kita. Tidak ada yang berhak memasuki rumah kita, membuka surat kita, atau mengganggu kita maupun keluarga kita tanpa alasan yang sah.
13. Kita semua berhak untuk pergi ke mana pun di dalam negara kita sendiri dan bepergian ke luar negeri sesuai keinginan.
14. Jika kita takut diperlakukan buruk di negara kita sendiri, kita semua berhak mencari perlindungan di negara lain agar tetap aman.
15. Kita semua berhak menjadi warga suatu negara.
16. Setiap orang dewasa berhak menikah dan membentuk keluarga jika mereka menginginkannya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pernikahan maupun setelah berpisah.
17. Setiap orang berhak memiliki barang atau berbagi kepemilikan. Tidak seorang pun boleh mengambil milik kita tanpa alasan yang sah.
18. Kita semua berhak untuk meyakini apa yang kita percayai, memiliki agama, atau mengubahnya sesuai kehendak kita.
19. Kita semua berhak untuk berpikir secara mandiri, memiliki pendapat, menyampaikan apa yang kita pikirkan, serta berbagi gagasan dengan orang lain.
20. Kita semua berhak untuk berkumpul dengan teman dan bekerja sama secara damai untuk membela hak-hak kita. Tidak seorang pun dapat memaksa kita untuk bergabung dengan suatu kelompok jika kita tidak menginginkannya.
21. Kita semua berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka.
22. Kita semua berhak atas tempat tinggal, penghidupan yang layak, dan layanan kesehatan ketika sakit. Musik, seni, kerajinan, dan olahraga juga dapat dinikmati oleh semua orang.
23. Setiap orang dewasa berhak atas pekerjaan, upah yang adil, serta hak untuk bergabung dengan serikat pekerja.
24. Kita semua berhak untuk beristirahat dari pekerjaan dan menikmati waktu luang.
25. Kita semua berhak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang memadai. Ibu dan anak, serta mereka yang lanjut usia, tidak bekerja, atau memiliki disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan.



26. Kita semua berhak atas pendidikan, termasuk menyelesaikan pendidikan dasar yang seharusnya diberikan secara gratis. Kita juga berhak mempelajari keterampilan untuk bekerja dan mengembangkan potensi diri.

27. Kita semua berhak menjalani cara hidup kita sendiri dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

28. Harus ada tatanan yang adil agar setiap orang dapat menikmati hak dan kebebasan, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.

29. Kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, dan harus melindungi hak serta kebebasan mereka.

30. Tidak seorang pun dapat merampas hak dan kebebasan ini dari kita.

Ini merupakan versi sederhana dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh Amnesty International Inggris.

Untuk teks lengkap DUHAM, lihat www.un.org/en/documents/index.shtml

3 TINGKAT KERAMAHAN HAK ASASI MANUSIA

Tabel-tabel berikut menggambarkan empat tingkat keramahan terhadap hak asasi manusia untuk setiap area utama kehidupan sekolah. Tabel ini dapat digunakan sebagai panduan bagi sekolah dalam menilai sejauh mana tingkat keramahan HAM pada awal pelaksanaan program. Sekolah dapat menentukan posisinya pada tingkat tertentu untuk satu atau lebih elemen dalam setiap area utama kehidupan sekolah. Penilaian ini kemudian dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memantau perkembangan selama pelaksanaan program. Selain itu, tabel ini juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun tujuan dalam rencana kerja sekolah, serta digunakan sebagai indikator dalam menilai atau mengevaluasi kemajuan sekolah pada akhir tahun. Sekolah dapat menyesuaikan dengan tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Selain itu, penting bagi sekolah untuk bersikap rasional dan objektif dalam merefleksikan tingkat keramahan terhadap HAM, agar kemajuan yang nyata dapat dicapai.

 Tingkat Keramahan HAM ini hanya berfungsi sebagai panduan dan bukan merupakan kerangka yang bersifat baku atau mutlak.

 Selama pelaksanaan program, meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang HAM dapat membuat sekolah menilai posisinya dalam tingkatan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Program Human Rights Friendly School merupakan proses pembelajaran yang terus berkembang. Oleh karena itu, meskipun tampak tidak ada kenaikan tingkat secara langsung sesuai tabel, peningkatan dalam pemahaman, kesadaran, dan kapasitas terkait HAM tetap merupakan suatu kemajuan.

AREA UTAMA 1: TATA KELOLA	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Nilai-nilai Sekolah	Sekolah tidak memiliki pernyataan visi, etos, moto, atau pedoman operasional.	Sekolah memiliki pernyataan visi, namun nilai dan prinsip hak asasi manusia belum dinyatakan secara jelas.	Pernyataan visi sekolah secara eksplisit mencerminkan nilai dan prinsip hak asasi manusia, namun belum secara aktif dipromosikan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.	Sekolah memiliki pernyataan visi yang mencerminkan nilai dan prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai tersebut tercermin dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
Kebijakan Sekolah	Kebijakan ditetapkan oleh manajemen sekolah dan tidak mengintegrasikan atau mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.	Kebijakan mulai mengintegrasikan dan mencerminkan beberapa prinsip hak asasi manusia tertentu, namun masih sepenuhnya ditetapkan oleh manajemen sekolah. Pertimbangan terhadap dampak hak asasi manusia belum menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.	Kebijakan telah mengintegrasikan dan mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tertentu, dan sekolah mulai menyediakan beberapa kesempatan bagi anggota komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam hal-hal terkait kebijakan.	Kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan secara jelas menjelaskan dampaknya terhadap hak-hak anggota komunitas sekolah. Seluruh anggota komunitas sekolah berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Kepemimpinan	Kepemimpinan terpusat pada manajemen sekolah.	Kesempatan dan peran kepemimpinan mulai diberikan kepada sebagian anggota staf di luar manajemen sekolah, namun tidak kepada seluruh anggota komunitas sekolah.	Kesempatan dan peran kepemimpinan mencakup sebagian besar anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, dan anggota komunitas lainnya.	Kesempatan dan peran kepemimpinan terbuka bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Sekolah secara aktif mendukung berbagai pihak untuk mengambil peran kepemimpinan. Anggota komunitas sekolah lainnya juga diberdayakan untuk menjadi pemimpin.
Partisipasi	Keputusan tata kelola diambil oleh sekelompok kecil staf manajemen sekolah.	Struktur tata kelola mulai dibentuk untuk memungkinkan partisipasi aktif anggota komunitas sekolah. Partisipasi tersebut belum mencakup pengambilan keputusan, dan akses untuk berpartisipasi belum tentu setara bagi semua anggota komunitas sekolah.	Badan atau struktur tata kelola komunitas sekolah memfasilitasi partisipasi aktif dan diberikan kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan. Beberapa upaya dilakukan untuk memastikan akses partisipasi yang setara untuk semua.	Seluruh anggota komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sekolah, dan mendapatkan dukungan yang memadai untuk dapat berpartisipasi dalam tata kelola. Upaya untuk memastikan akses partisipasi yang setara bagi semua telah berjalan dengan baik dan efektif.
Akuntabilitas dan Transparansi	Anggota komunitas sekolah tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terhadap kebijakan dan praktik sekolah, serta tidak ada mekanisme untuk menangani isu-isu hak asasi manusia di sekolah.	Akses terhadap kebijakan dan praktik sekolah diberikan kepada seluruh anggota komunitas sekolah jika diminta, namun belum terdapat mekanisme untuk menangani isu-isu hak asasi manusia di sekolah.	Akses terhadap kebijakan dan praktik sekolah diberikan secara terbuka dan proaktif kepada seluruh anggota komunitas sekolah, serta sekolah memiliki beberapa mekanisme untuk menangani isu-isu hak asasi manusia.	Kebijakan dan praktik sekolah bersifat transparan, dapat diakses oleh semua pihak, dan akuntabel terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, terdapat mekanisme yang jelas, berjalan dengan baik, dan efektif untuk menangani isu-isu hak asasi manusia di sekolah.

AREA UTAMA 2: HUBUNGAN	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Hubungan antara guru dan siswa	Siswa tidak menghormati guru, dan guru tidak menghormati siswa. Tidak terdapat mekanisme untuk memediasi konflik antara siswa dan guru, serta keduanya tidak bekerja sama dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi hubungan mereka, seperti penyusunan aturan perilaku dan kebijakan disiplin. Kebebasan berekspresi tidak didorong, dan kontribusi siswa tidak dihargai.	Guru dan siswa mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati. Melalui dialog, guru dan siswa menetapkan aturan dasar perilaku dan kebijakan disiplin untuk memediasi hubungan tersebut. Mekanisme mediasi konflik mungkin belum tersedia.	Sebagian besar guru dan siswa menunjukkan hubungan yang baik dan memiliki proses untuk membangun rasa saling menghormati dan kepercayaan melalui penyusunan aturan perilaku dan kebijakan disiplin. Guru dan siswa juga mulai bekerja sama dalam mengembangkan mekanisme mediasi konflik.	Guru dan siswa saling memperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Terdapat mekanisme mediasi konflik yang jelas, dipahami bersama, dan berfungsi dengan baik. Guru dan siswa bekerja sama dalam seluruh aspek hubungan mereka di sekolah. Kebebasan berekspresi didorong, dan kontribusi seluruh anggota komunitas sekolah dihargai tanpa diskriminasi.
Hubungan antarsiswa	Hubungan antarsiswa cenderung negatif. Konflik seperti perundungan, pelecehan, atau diskriminasi sering terjadi. Tidak tersedia mekanisme untuk memediasi konflik antar siswa.	Siswa mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati. Siswa saling berdialog untuk menetapkan aturan dasar perilaku di antara mereka. Sekolah mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan bekerja sama, namun mekanisme mediasi konflik belum tersedia.	Siswa didorong untuk bekerja sama dalam memperbaiki hubungan serta membangun rasa saling menghormati dan kepercayaan. Dengan dukungan komunitas sekolah, mekanisme mediasi konflik antar siswa mulai dibentuk.	Siswa saling memperlakukan dengan hormat dan menjunjung martabat satu sama lain. Konflik dikelola secara efektif dan damai, serta sekolah mendukung pengembangan keterampilan kerja sama. Semua siswa, tanpa memandang latar belakang, gender, atau status, dapat berinteraksi dan bekerja sama baik di dalam maupun di luar kelas dengan penuh rasa hormat.



(LANJUTAN) AREA UTAMA 2: HUBUNGAN	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Hubungan antarguru/staf	Guru/staf tidak memiliki hubungan kerja yang baik dan saling memperlakukan secara berbeda berdasarkan posisi dan status. Terdapat banyak kasus perundungan dan pelecehan, serta tidak ada mekanisme untuk menangani konflik.	Guru/staf mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati. Melalui dialog, staf menetapkan aturan dasar perilaku bersama. Kasus perundungan dan pelecehan mungkin masih terjadi, dan belum tersedia mekanisme untuk menangani konflik.	Sebagian besar guru/staf, terlepas dari posisi atau peran, memiliki hubungan kerja yang baik, saling menghormati, serta mematuhi aturan perilaku yang telah disepakati. Kasus perundungan dan pelecehan masih dapat terjadi, namun sudah tersedia mekanisme untuk menanganinya.	Seluruh guru/staf saling memperlakukan dengan martabat dan rasa hormat, tanpa memandang posisi atau peran dalam sekolah, serta bekerja sama untuk menjadi teladan bagi siswa dalam membangun hubungan yang baik berbasis nilai hak asasi manusia. Kasus perundungan dan pelecehan jarang terjadi, dan telah tersedia mekanisme yang efektif dan disusun secara bersama.
Hubungan Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas	Sekolah memiliki hubungan yang sangat terbatas atau hampir tidak ada dengan orang tua dan komunitas yang lebih luas. Tidak tersedia mekanisme yang transparan dan akuntabel yang dapat diakses oleh orang tua.	Sekolah mulai menjangkau orang tua dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti acara, pertemuan dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Sekolah juga mulai menjelaskan kepada orang tua dan masyarakat mengenai peran yang ingin dijalankan dalam komunitas serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar kegiatannya.	Sekolah dan anggota komunitas sekolah menjalin dialog dengan orang tua serta komunitas untuk membangun hubungan yang bermakna, saling mendukung, dan timbal balik. Tersedia berbagai kesempatan yang cukup sering bagi sekolah dan komunitas untuk berinteraksi dan saling mendukung.	Sekolah menjalin hubungan yang kuat, bermakna, saling mendukung, dan timbal balik dengan orang tua serta komunitas yang lebih luas. Komunitas memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Sekolah juga dipandang sebagai pusat komunitas yang terbuka bagi semua, serta berperan sebagai sumber daya masyarakat yang mendukung dan mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia.

(LANJUTAN) AREA UTAMA 2: HUBUNGAN	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Membangun Kemitraan – Lokal dan Global	Sekolah tidak memiliki kemitraan dengan sekolah lain, organisasi, otoritas pendidikan, maupun mitra internasional.	Sekolah mulai mengidentifikasi potensi kemitraan di tingkat lokal dan telah menjalin komunikasi awal dengan satu atau dua sekolah, organisasi, atau otoritas pendidikan.	Sekolah telah menjalin kemitraan di tingkat lokal atau nasional.	Sekolah menjalin kemitraan dengan sekolah lain baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah juga bekerja sama dengan organisasi lokal dan memiliki hubungan yang baik dengan otoritas pendidikan. Kemitraan ini memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi siswa dan seluruh komunitas sekolah.

AREA UTAMA 3: KURIKULUM DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler	Tidak terdapat rujukan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan maupun isi kurikulum. Siswa tidak mendapatkan pembelajaran tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari kurikulum. Siswa juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum. Kurikulum belum disesuaikan agar dapat diakses oleh semua siswa.	Sekolah mulai mempertimbangkan cara mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum. Kurikulum belum sepenuhnya ramah terhadap hak asasi manusia, terutama dari sisi aksesibilitas. Siswa mulai memiliki kesadaran tentang upaya integrasi hak asasi manusia dalam kurikulum.	Hak asasi manusia diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran lain atau sebagai mata pelajaran tersendiri. Terdapat mekanisme yang memungkinkan siswa memberikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum. Semua siswa memiliki akses terhadap materi pembelajaran, tanpa memandang kebutuhan mereka.	Hak asasi manusia diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, sekaligus terintegrasi dalam banyak atau seluruh mata pelajaran lainnya. Siswa terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Semua siswa memiliki akses yang setara terhadap pendidikan hak asasi manusia dan materi kurikulum, sesuai dengan kebutuhan mereka.



**(LANJUTAN) AREA
UTAMA 3:
KURIKULUM DAN
KEGIATAN
EKSTRAKURIKULER**

	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Metodologi mengajar	Guru mengajar secara satu arah dari depan kelas dengan metode ceramah. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana pembelajaran berlangsung. Guru belum mempertimbangkan dampak praktik pengajaran terhadap hak asasi manusia.	Tersedia beberapa pelatihan terkait hak asasi manusia bagi guru. Sebagian guru mulai mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sebagian besar guru belum menerapkan pendekatan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Guru tidak memperoleh dukungan yang memadai dari sekolah untuk menerapkan pendekatan tersebut	Guru telah memahami hak asasi manusia serta metodologi pendidikan berbasis hak asasi manusia. Dengan dukungan sekolah, sebagian guru mulai menerapkan pendekatan yang ramah terhadap hak asasi manusia dalam praktik pengajaran. Siswa mulai berpartisipasi dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembelajaran.	Guru memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia dan metodologi pendidikan berbasis hak asasi manusia, yang tercermin dalam praktik pengajaran. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi, sehingga suasana kelas bersifat demokratis. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dihormati. Pembelajaran disesuaikan agar dapat diakses secara setara oleh semua siswa. Sekolah juga memberikan dukungan penuh kepada guru untuk menerapkan pendekatan yang ramah terhadap hak asasi manusia.

(LANJUTAN) AREA UTAMA 3: KURIKULUM DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Kegiatan ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler tidak mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hanya dapat diikuti oleh sebagian kecil siswa. Kegiatan dikelola sepenuhnya oleh staf senior tanpa keterlibatan komunitas sekolah.	Kegiatan ekstrakurikuler tidak mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hanya dapat diikuti oleh sebagian kecil siswa. Kegiatan dikelola sepenuhnya oleh staf senior tanpa keterlibatan komunitas sekolah.	Komunitas sekolah mulai mendorong dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada hak asasi manusia. Sekolah juga mulai melibatkan anggota komunitas dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan ekstrakurikuler.	Terdapat mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diakses oleh semua. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler didorong secara aktif, serta seluruh komunitas sekolah dilibatkan dalam menyusun pedoman perilaku yang ramah terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan tersebut. Terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang secara khusus berfokus pada isu hak asasi manusia, serta pedoman yang ramah hak asasi manusia telah ditetapkan untuk semua kegiatan	Sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada hak asasi manusia atau pemberdayaan komunitas, dan seluruh kegiatan dijalankan dengan prinsip ramah hak asasi manusia. Semua kegiatan dapat diakses oleh semua pihak tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan. Siswa dan anggota komunitas sekolah lainnya berperan aktif bersama masyarakat luas dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan kegiatan. Seluruh anggota komunitas sekolah juga diberdayakan untuk menginisiasi kegiatan ekstrakurikuler mereka sendiri



AREA UTAMA 4: KELAS RAMAH HAM	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Kelas Ramah Hak Asasi Manusia	Siswa tidak merasa aman dan tidak dapat belajar secara efektif di kelas. Tidak terdapat aturan perilaku di kelas. Diskriminasi dan konflik sering terjadi. Fasilitas kelas tidak memadai, seperti kekurangan meja, peralatan belajar, serta ventilasi atau pencahayaan yang buruk.	Sebagian siswa merasa aman dan dapat belajar dalam suasana yang menjunjung non-diskriminasi, rasa hormat, dan martabat. Namun, diskriminasi masih kadang terjadi, begitu juga konflik verbal dan fisik. Sekolah mulai menyadari pentingnya penyediaan fasilitas kelas yang memadai untuk mendukung pembelajaran.	Sebagian besar siswa merasa aman dan dapat belajar secara efektif dalam suasana yang menjunjung non-diskriminasi, rasa hormat, dan martabat. Setiap bentuk diskriminasi yang terjadi ditanggapi dan ditindaklanjuti. Sekolah telah mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan fasilitas di kelas.	Semua siswa merasa aman dan dapat belajar secara efektif dalam suasana yang menjunjung non-diskriminasi, rasa hormat, dan martabat. Aturan perilaku kelas disusun bersama oleh siswa dan guru serta dipajang di kelas. Kelas menjadi ruang yang tidak mentoleransi diskriminasi. Fasilitas kelas memadai dan memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik untuk mendukung pembelajaran. Kelas juga dihiasi dengan poster dan tampilan yang merayakan pencapaian siswa, termasuk dalam bahasa ibu mereka.

(LANJUTAN) AREA UTAMA 4: KELAS RAMAH HAM	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Lingkungan fisik	Tampilan dan suasana sekolah tidak mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Area umum di sekolah belum ramah terhadap hak asasi manusia. Koridor, area bermain, dan kantin tidak mendukung lingkungan yang ramah HAM. Tidak tersedia akses air minum bersih maupun fasilitas sanitasi yang layak.	Sekolah mulai mempertimbangkan cara untuk menjadikan tampilan dan suasana lingkungan lebih ramah HAM. Akses ke air minum bersih dan fasilitas sanitasi masih terbatas.	Tampilan dan suasana area bersama di sekolah mulai mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagian besar koridor, area bermain, dan kantin telah menjadi lingkungan yang lebih ramah HAM. Tersedia sebagian akses ke air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.	Seluruh anggota komunitas sekolah merasa aman dan terlindungi. Bangunan sekolah dapat diakses oleh semua pihak, serta menyediakan kesempatan yang setara, termasuk bagi kelompok rentan. Tampilan dan suasana lingkungan sekolah dibentuk melalui proses pengambilan keputusan bersama untuk mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Koridor, area bermain, dan kantin merupakan lingkungan yang ramah HAM. Tersedia akses penuh ke air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, serta fasilitas yang mendukung kebutuhan gizi siswa.



**(LANJUTAN) AREA
UTAMA 4: KELAS
RAMAH HAM**

	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3	TINGKAT 4
Lingkungan Sekolah yang Lebih Luas	Anggota komunitas sekolah tidak merasa aman dan terlindungi, serta tidak ada perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Diskriminasi, konflik verbal, dan fisik sering terjadi. Sekolah tidak menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya, kegiatan, maupun peluang akademik dan karier. Tidak ada partisipasi anggota komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sekolah.	Sebagian anggota komunitas sekolah merasa aman dan terlindungi, serta beberapa kelompok rentan mulai mendapatkan perlindungan. Diskriminasi dan konflik verbal maupun fisik masih terjadi. Sekolah berupaya menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya, kegiatan, serta peluang akademik dan karier, namun belum konsisten dalam pelaksanaannya. Sebagian anggota komunitas sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sekolah.	Sebagian besar anggota komunitas sekolah merasa aman dan terlindungi, serta siswa yang rentan mendapatkan perlindungan khusus. Diskriminasi ditanggapi dan ditangani ketika terjadi. Sekolah mampu mengelola konflik verbal dan fisik dengan baik. Sekolah menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya, kegiatan, serta peluang akademik dan karier. Anggota komunitas sekolah yang berminat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sekolah.	Seluruh anggota komunitas sekolah merasa aman dan terlindungi, serta diperlakukan dengan martabat, rasa hormat, dan dihargai. Sekolah menjadi lingkungan yang tidak mentoleransi diskriminasi. Semua anggota komunitas sekolah terlibat dalam menciptakan dan menjaga lingkungan sekolah yang positif.

RENCANA HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL

Sekolah dapat menggunakan templat rencana aksi yang tersedia dalam Toolkit Human Rights friendly School untuk menyusun rencana aksi mereka.

NAMA SEKOLAH: _____

VISI SEKOLAH: _____

AREA UTAMA KEHIDUPAN SEKOLAH

TINGKAT KERAMAHAN HAM SAAT INI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI	KEGIATAN PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA	INDIKATOR CAPAIAN DAN PEMANTAUAN KEBERHASILAN
■ Dimana posisi kita saat ini?	■ Apa yang ingin kita capai? ■ Apa tujuan jangka pendek kita? ■ Apa tujuan jangka panjang kita?	■ Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya?	■ Siapa yang akan memimpin? ■ Siapa yang akan terlibat?	■ Bagaimana kita mengetahui bahwa perubahan telah terjadi atau sedang berlangsung? ■ Bagaimana dan dari mana kita mengumpulkan bukti atas kemajuan yang dicapai?
Tata Kelola (Governance) ■ Nilai-nilai sekolah ■ Kebijakan sekolah ■ Kepemimpinan ■ Partisipasi ■ Akuntabilitas dan transparansi				
Hubungan (Relationships) ■ Hubungan guru dan siswa ■ Hubungan antar siswa ■ Hubungan antar staf ■ Hubungan sekolah, orang tua, dan komunitas ■ Membangun kemitraan lokal dan global				
Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler ■ Kebijakan dan isi kurikulum ■ Metodologi pembelajaran ■ Kegiatan ekstrakurikuler				
Lingkungan Sekolah ■ Kelas yang ramah hak asasi manusia ■ Lingkungan fisik sekolah ■ Lingkungan sekolah yang lebih luas				



MENJADI HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOL

SEBUAH PANDUAN UNTUK SEKOLAH DI SELURUH DUNIA

Panduan ini akan membantu sekolah dalam perjalanan mereka untuk menjadi Human Rights Friendly School.

Proyek Human Rights Friendly School bertujuan untuk memberdayakan kelompok muda serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia ke dalam semua aspek kehidupan sekolah. Proyek ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan meningkatkan pengetahuan serta mengubah sikap dan perilaku di seluruh komunitas, budaya hak asasi manusia secara global dapat terwujud.

Panduan ini menjelaskan apa yang dimaksud Human Rights Friendly School dan apa yang dapat dicapai, serta menawarkan saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Panduan ini menjelaskan bagaimana 10 Prinsip Global Human Rights Friendly School, yang didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional, dapat diintegrasikan ke dalam empat area utama kehidupan sekolah: tata kelola, hubungan, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta lingkungan sekolah. Dilengkapi dengan berbagai studi kasus keberhasilan, panduan ini menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil sekolah untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek. Pada bagian akhir, panduan ini menyediakan berbagai perangkat yang berguna untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi perjalanan sekolah.

Sebuah Toolkit Human Rights Friendly School (CD-Rom), yang berisi berbagai sumber daya dan perangkat pendidikan hak asasi manusia yang relevan, disertakan bersama panduan ini.

amnesty.org

September 2012
POL 32/001/2012

HUMAN RIGHTS EDUCATION
AMNESTY
INTERNATIONAL

